

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

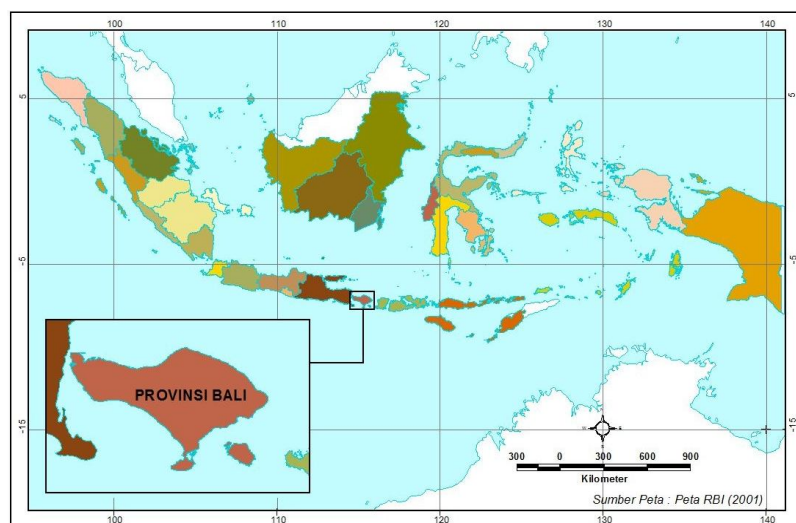
2.1.1 Aspek Geografi

A. Karakteristik Lokasi dan Wilayah

1. Letak, Luas dan Batas Wilayah

Letak Wilayah Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang dikenal dengan sebutan Pulau Dewata (paradise island). Bali terletak di antara Pulau Jawa dan Pulau Lombok. Ibukota provinsinya adalah Denpasar, yang terletak di bagian selatan pulau ini. Pulau Bali adalah bagian dari Kepulauan Sunda Kecil sepanjang 153 km dan selebar 112 km, sekitar 3,2 km dari Pulau Jawa. Provinsi Bali terdiri dari beberapa pulau, yakni Pulau Bali sebagai pulau terbesar, Pulau Nusa Penida, Pulau Nusa Ceningan, Pulau Nusa Lembongan, Pulau Serangan (terletak di sekitar kaki Pulau Bali), serta Pulau Menjangan yang terletak di bagian barat Pulau Bali. Secara astronomis, Provinsi Bali terletak pada posisi titik koordinat 08°03'40" – 08°50'48" Lintang Selatan dan 114°25'53" – 115°42'40" Bujur Timur yang membuatnya beriklim tropis layaknya wilayah lain di Indonesia. Letak wilayah Provinsi Bali sebagai bagian dari Negara Kesatuan RI disajikan pada

Gambar 2.1



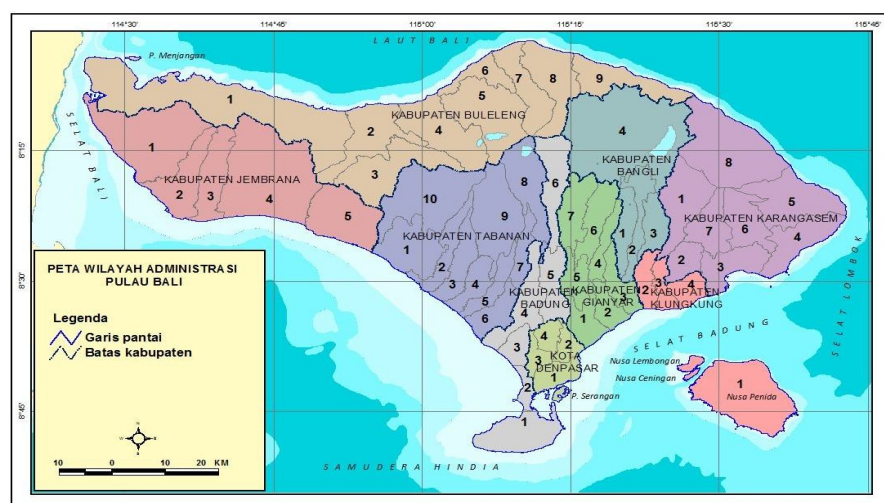
Gambar 2.1
Posisi Provinsi Bali di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Batas-batas wilayah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- Sebelah utara : Laut Bali
- Sebelah timur : Selat Lombok
- Sebelah selatan : Samudera Hindia
- Sebelah barat : Selat Bali.

Luas Wilayah Luas wilayah Provinsi Bali secara keseluruhan mencapai 5.636,66 km² atau 0,29 persen dari luas kepulauan Indonesia. Provinsi Bali terbagi ke dalam delapan kabupaten dan satu kota meliputi Kabupaten Jembrana, Tabanan, Badung, Gianyar, Klungkung, Bangli, Buleleng Karangasem, dan Kota Denpasar. Diantara kesembilan kabupaten/kota tersebut, Kabupaten Buleleng memiliki luas terbesar 1.365,88 km² (24,23%) dari luas provinsi, diikuti oleh Jembrana 841,80 km² (14,93%), Karangasem 839,54 km² (14,89%), dan Tabanan 839,33 km² (14,89%). Sisanya berturut-turut adalah Bangli 520,81 km², Badung 418,52 km², Gianyar 368,00 km², Klungkung 315,00 km², dan Kota Denpasar 127,78 km².

Secara administratif, Provinsi Bali terdiri atas 8 (delapan) kabupaten dan 1 (satu) kota, 57 kecamatan dan 716 desa/kelurahan. Jumlah kecamatan tiap Kabupaten/Kota berkisar 4-10 kecamatan. Luas wilayah, jumlah kecamatan dan jumlah desa/kelurahan menurut Kabupaten/Kota disajikan pada **Gambar 2.2 dan Tabel 2.1**



Gambar 2.2
Wilayah Admnistrasi Provinsi Bali



Tabel 2.1
Luas Wilayah Kab/Kota dan Kec. di Provinsi Bali

| NO | KABUPATEN/ KECAMATAN | DESA 2012 | LUAS (KM ²) | NO | KABUPATEN/ KECAMATAN | DESA 2012 | LUAS (KM ²) |
|------|-------------------------|--------------|----------------------------|-------|-------------------------|--------------|----------------------------|
| I. | KAB. JEMBRANA | 51 | 841,80 | V. | KAB. KLUNGKUNG | 59 | 315,00 |
| 1 | MELAYA | 10 | 197,19 | 1 | NUSA PENIDA | 16 | 202,84 |
| 2 | NEGARA | 12 | 126,50 | 2 | BANJARANGKAN | 13 | 45,73 |
| 3 | MENDOYO | 11 | 294,49 | 3 | KLUNGKUNG | 18 | 29,05 |
| 4 | PEKUTATAN | 8 | 129,65 | 4 | DAWAN | 12 | 37,38 |
| 5 | JEMBRANA | 10 | 93,97 | VI. | KAB. BANGLI | 72 | 520,81 |
| II. | KAB. TABANAN | 133 | 839,33 | 1 | SUSUT | 9 | 49,31 |
| 1 | SELEMADEG BARAT | 11 | 120,15 | 2 | BANGLI | 9 | 56,26 |
| 2 | SELEMADEG | 11 | 52,05 | 3 | TEMBUKU | 6 | 48,32 |
| 3 | SELEMADEG TIMUR | 11 | 54,78 | 4 | KINTAMANI | 48 | 366,92 |
| 4 | KERAMBITAN | 15 | 42,39 | VII. | KAB. KARANGASEM | 78 | 839,54 |
| 5 | TABANAN | 12 | 51,40 | 1 | RENDANG | 6 | 109,70 |
| 6 | KEDIRI | 15 | 53,60 | 2 | SEDEMEN | 10 | 35,15 |
| 7 | MARGA | 15 | 44,79 | 3 | MANGGIS | 12 | 69,83 |
| 8 | BATURITI | 12 | 99,17 | 4 | KARANGASEM | 11 | 94,23 |
| 9 | PENEBEL | 18 | 141,98 | 5 | ABANG | 14 | 134,05 |
| 10 | PUPUAN | 13 | 179,02 | 6 | BEBANDEM | 8 | 81,51 |
| III. | KAB. BADUNG | 62 | 418,52 | 7 | SELAT | 8 | 80,35 |
| 1 | KUTA SELATAN | 6 | 101,13 | 8 | KUBU | 9 | 234,72 |
| 2 | KUTA | 5 | 17,52 | VIII. | KAB. BULELENG | 148 | 1365,88 |
| 3 | KUTA UTARA | 6 | 33,86 | 1 | GEROKGAK | 14 | 356,57 |
| 4 | MENGWI | 20 | 82,00 | 2 | SERIRIT | 21 | 111,78 |
| 5 | ABIANSEMAL | 18 | 69,01 | 3 | BUSUNGBIU | 15 | 196,62 |
| 6 | PETANG | 7 | 115,00 | 4 | BANJAR | 17 | 172,60 |
| IV. | KAB. GIANYAR | 70 | 368,00 | 5 | SUKASADA | 15 | 172,93 |
| 1 | SUKAWATI | 12 | 55,02 | 6 | BULELENG | 29 | 46,94 |
| 2 | BLAHBATUH | 9 | 39,70 | 7 | SAWAN | 14 | 92,52 |
| 3 | GIANYAR | 17 | 50,59 | 8 | KUBUTAMBAHAN | 13 | 118,24 |
| 4 | TAMPAKSIRING | 8 | 42,63 | 9 | TEJAKULA | 10 | 97,68 |
| 5 | UBUD | 8 | 42,38 | IX. | KOTA DENPASAR | 43 | 127,78 |
| 6 | TEGALLALANG | 7 | 61,80 | 1 | DENPASAR SELATAN | 10 | 49,99 |
| 7 | PAYANGAN | 9 | 75,88 | 2 | DENPASAR TIMUR | 11 | 22,54 |
| | | | | 3 | DENPASAR BARAT | 11 | 24,13 |
| | | | | 4 | DENPASAR UTARA | 11 | 31,12 |
| | | | | | TOTAL | 716 | 5.636,66 |

Sumber: BPS Provinsi Bali (2012)

Namun demikian, jika dilihat dari struktur pemerintahannya, agak berbeda dengan daerah lain. Jika dalam struktur pemerintahan umumnya, terdiri dari kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, ketua RW kemudian ketua RT. Di Bali struktur pemerintahannya adalah kepala desa/lurah, kepala dusun/kepala lingkungan, dan yang terbawah adalah Kelian Banjar. Banjar mirip dengan kampung, bisa terdiri dari 50-200 KK (kepala keluarga), keanggotaannya biasanya bersifat turun temurun.



Untuk struktur pemerintahan adat, tiap desa di Bali dipimpin oleh bendesa adat (kelian desa) yang kedudukan hampir setara dengan kepala desa/lurah, hanya saja bendesa adat adalah pemimpin adat yang bertugas untuk menjalankan awig-awig (undang-undang adat) di desa bersangkutan. Di bawah bendesa adat, ada kelian adat/kelian banjar. Di beberapa banjar di Bali, jabatan antara kelian banjar dan kelian adat biasanya dirangkap oleh satu orang, namun ada juga yang membedakannya. Dalam satu desa administratif bisa terdapat beberapa desa adat. Maksudnya adalah desa A bisa terdiri dari desa adat B, desa adat C, dan desa adat D. Hal ini kaitannya dengan historis. Desa adat sudah ada sejak zaman kerajaan, setelah berakhirnya era kerajaan, maka pemerintah republik membentuk desa administratif.

2. TOPOGRAFI

Berdasarkan relief dan topografi, di tengah-tengah Pulau Bali terbentang pegunungan yang memanjang dari barat ke timur dan di antara pegunungan tersebut terdapat gugusan gunung berapi, yakni Gunung Agung yang merupakan titik tertinggi di Bali setinggi 3.142 meter. Gunung berapi ini terakhir meletus pada Maret 1963. Gunung Batur (1.717 meter) yang berlokasi di Bangli juga merupakan salah satu gunung berapi. Sekitar 30.000 tahun lalu, Gunung Batur meletus dan menghasilkan bencana yang dahsyat di bumi. Sedangkan gunung yang tidak berapi antara lain adalah Gunung Merbuk (1.356 meter) di Jembrana, Gunung Patas (1.414 meter) di Buleleng, dan Gunung Seraya (1.058 meter) di Karangasem, serta beberapa gunung lainnya. Adanya pegunungan tersebut menyebabkan daerah Bali secara geografis terbagi menjadi dua bagian yang tidak sama, yakni Bali Utara dengan dataran rendah yang sempit dan kurang landai, serta Bali Selatan dengan dataran rendah yang luas dan landai. Kemiringan lahan Pulau Bali terdiri dari lahan datar (0-2%) seluas 122.652 ha, lahan bergelombang (215%) seluas 118.339 ha, lahan curam (1540%) seluas 190.486 ha, dan lahan sangat curam (>40%) seluas 132.189 ha. Provinsi Bali juga memiliki empat buah danau, yakni Danau Beratan, Danau Buyan, Danau Tamblingan, dan Danau Batur. Berbeda dengan bagian utara, bagian selatan Bali adalah dataran

rendah yang dialiri sungai-sungai, seperti sungai Tukad Ayung 62.500 meter dan sungai sungai lainnya.

3. Geologi dan Tanah

Pada konteks lain, jenis tanah yang ada di Bali sebagian besar didominasi oleh tanah Regusol dan Latasol serta sebagian kecil saja terdapat jenis tanah Alluvial, Mediteran, dan Andosol. Jenis tanah Latosol yang sangat peka terhadap erosi, tersebar di bagian barat sampai Kalopaksa, Petemon, Ringdikit, dan Pempatan. Tanah jenis ini juga terdapat di sekitar Gunung Penyu, Gunung Pintu, Gunung Juwet, dan Gunung Seraya yang secara keseluruhan meliputi 44,90 persen dari luas Pulau Bali. Jenis tanah Regusol yang sangat peka terhadap erosi terdapat di bagian timur Amlapura sampai Culik. Jenis tanah ini terdapat juga di Pantai Singaraja sampai Seririt, Bubunan, Kekeran di sekitar Danau Tamblingan, Buyan, dan Beratan, sekitar Hutan Batukaru, serta sebagian kecil di Pantai Selatan Desa Kusamba, Sanur, Benoa, dan Kuta. Jenis tanah ini meliputi sekitar 39,93 persen dari luas Pulau Bali.

4. Hidrologi

Provinsi Bali memiliki empat buah danau yaitu Danau Batur di Kabupaten Bangli, Danau Beratan di Kabupaten Tabanan, Danau Buyan dan Danau Tamblingan di Kabupaten Buleleng. Danau Batur merupakan danau terbesar di Bali dengan luas permukaan 16,05 km². Danau-danau yang terdapat di Bali merupakan danau vulkanik yang semuanya berada pada rantai pegunungan dengan ketinggian 1000 – 1200 m dpl. Dengan posisinya yang demikian, keempat danau ini merupakan penyangga tata air di daerah hilir dan sekitarnya. Total volume air danau di seluruh Bali adalah 1.007,85 juta m³, dimana 80,9% terdapat di Danau Batur, 11,5% di Danau Buyan, 4,9% di Danau Beratan dan 2,7% di Danau Tamblingan

Terdapat pula waduk dan embung yang merupakan danau buatan (*man made lake*) yang dibuat untuk berbagai kepentingan, seperti penyediaan air irigasi, air baku air bersih, pengendalian banjir dan lain sebagainya. Di Provinsi Bali terdapat lima waduk/embung yaitu Waduk Palasari, Waduk Gerokgak, Waduk Telaga Tunjung, Waduk Muara Nusa Dua dan Embung Seraya dengan Total volume air waduk dan embung 13,53 juta m³

Sementara untuk sungai, berdasarkan Peta DAS di Wilayah Sungai Bali-Penida (BWS Bali-Penida, 2011), di Provinsi Bali terdapat 390 daerah aliran sungai. Sistem sungai di Bali mengalir dari utara atau selatan sebagai akibat dari terbaginya Pulau Bali oleh pegunungan yang membentang dari barat - timur di pulau ini. Sungai-sungai yang ada di sebelah selatan pegunungan mengalir ke arah selatan yang umumnya memiliki panjang dua kali lipat dibandingkan sungai yang mengalir ke utara di belahan utara pegunungan.

Menurut Dinas PU Provinsi Bali, terdapat 401 batang sungai tetapi yang potensial hanya berjumlah 66 sungai dengan karakteristik sebagian besar merupakan sungai intermitten dan annual sehingga pemanfaatan sumber air dari sungai-sungai ini tidak dapat diharapkan sepanjang tahun. Hanya kurang dari 11% sungai yang memiliki debit aliran pada musim kemarau. Potensi air sungai menurut Sub Satuan Wilayah Sungai di Bali adalah 196,4 m³/detik atau 6.195,3 juta m³/tahun.

5. Klimatologi

1). Tipe Iklim

Wilayah Bali secara umum beriklim laut tropis, yang dipengaruhi oleh angin musiman. Terdapat musim kemarau dan musim hujan yang diselingi oleh musim pancaroba. Pada bulan Juni hingga September, arus angin berasal dari Australia dan tidak banyak mengandung uap air, sehingga mengakibatkan musim kemarau. Sedangkan pada bulan Desember hingga Maret, arus angin banyak mengandung uap air yang berasal dari Asia dan Samudra Pasifik, sehingga terjadi musim penghujan. Corak produksi masyarakat Bali ini sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim (siklus alam dan curah hujan). Karena itu, peralihan musim merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mendeteksi musim kemarau atau musim hujan secara lebih dini, sehingga perencanaan pertanian terutama periode tanam dan jenis komoditas dapat disusun sesuai kondisi iklim aktual.

2). Suhu dan Curah Hujan

Menurut catatan Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah III Denpasar, sepanjang tahun 2013, suhu/temperatur udara tertinggi di wilayah Bali terjadi di Kabupaten

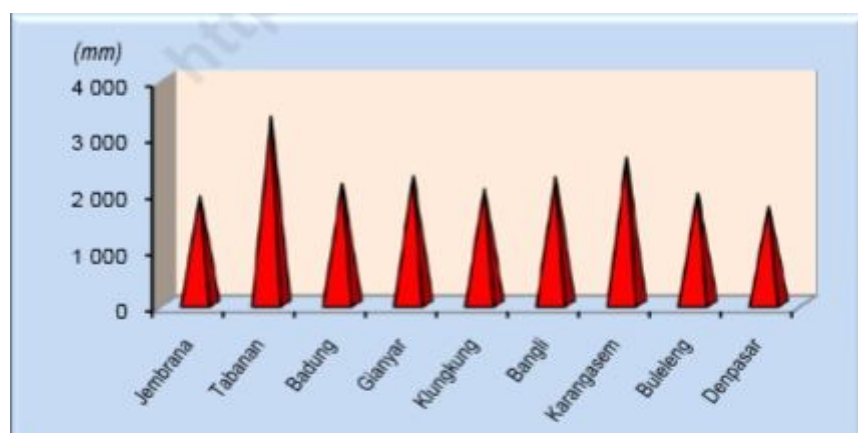
Buleleng yaitu mencapai 28,6°C dengan kelembaban udara 75. Sebaliknya, suhu terendah terjadi di Kabupaten Tabanan yang mencapai 20,2°C dengan tingkat kelembaban udara tertinggi yakni sebesar 80 persen.



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.3
Rata-rata Suhu Udara di Bali per Kabupaten/Kota Tahun 2013

Apabila dilihat dari curah hujan di masing-masing kabupaten/kota se-Bali tercatat Kabupaten Tabanan memiliki curah hujan tertinggi yang mencapai 3.348,1 mm selama tahun 2013. Sebaliknya, curah hujan terendah terjadi di Kabupaten Jembrana yang mencapai 1.936,2 mm. Rata-rata intensitas curah hujan tertinggi selama tahun 2013 terjadi di bulan Januari tercatat disemua stasiun pencatatan di Bali yakni Stasiun Ngurah Rai, Sanglah, Negara, dan Karangasem.



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.4
Total Curah Hujan per Kabupaten/Kota Tahun 2013

6. Penggunaan Lahan

Secara umum, penggunaan lahan dibedakan atas penggunaan lahan pertanian dan bukan pertanian. Potensi penggunaan lahan dipengaruhi oleh jenis tanah, sumber daya mineral, vegetasi, topografi, iklim, dan lokasi. Dalam beberapa tahun terakhir ini, alih fungsi lahan dari lahan pertanian ke lahan bukan pertanian di wilayah Provinsi Bali mengalami peningkatan. Pada tahun 2013, lahan pertanian di Bali mencapai 355.568 hektar yang terdiri dari lahan sawah seluas 81.165 hektar dan lahan bukan sawah seluas 274.403 hektar. Sedangkan lahan bukan pertanian mencapai 208.098 hektar. Penggunaan lahan bukan sawah di Bali paling banyak diperuntukkan bagi tegal/kebun sebesar 123.741 hektar atau 45,09 persen dari 274.403 hektar lahan bukan sawah. Penggunaan lahan bukan sawah paling banyak terdapat di Kabupaten Buleleng, di mana pada tahun 2013 sebesar 70.392 hektar, disusul kabupaten karangasem dengan 53.734 hektar. Khusus penggunaan lahan sawah, Kabupaten Tabanan masih menempa posisi pertama di tahun 2013 dengan luas lahan sawah mencapai 22.184 hektar. Namun luas areal lahan sawah ini berkurang 0,91 persen dari tahun sebelumnya seluas 22.388 hektar. Hal ini sesuai dengan julukan Tabanan sebagai “lumbung beras” Bali.



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.5
Persentase Luas Lahan Provinsi Bali Menurut Penggunaannya Tahun 2013

B. Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan wilayah merupakan strategi memanfaatkan dan mengkombinasikan faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan eksternal (peluang dan tantangan) yang ada sebagai potensi dan peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi wilayah akan barang dan jasa yang merupakan fungsi dari kebutuhan baik secara internal maupun eksternal wilayah. Faktor internal ini berupa sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya teknologi, sedangkan faktor eksternal dapat berupa peluang dan ancaman yang muncul seiring dengan interaksinya dengan wilayah lain.

Dalam Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang, wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur yang terkait kepadanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Batasan wilayah tidaklah selalu bersifat fisik dan pasti tetapi seringkali bersifat dinamis. Komponen-komponen wilayah mencakup komponen biofisik alam, sumberdaya buatan (infrastruktur), manusia serta bentuk-bentuk kelembagaan. Dengan demikian istilah wilayah menekankan interaksi antar manusia dengan sumberdaya-sumberdaya lainnya yang ada di dalam suatu batasan unit geografis tertentu.

Pengembangan wilayah pada umumnya mengacu pada perubahan produktivitas wilayah, yang diukur dengan peningkatan populasi penduduk, kesempatan kerja, tingkat pendapatan, nilai tambah industri pengolahan, pengembangan sosial, berupa aktivitas kesehatan, pendidikan, kualitas lingkungan, kesejahteraan dan lainnya. Pengembangan wilayah lebih menekankan pada adanya perbaikan wilayah secara bertahap dari kondisi yang kurang berkembang menjadi berkembang. Pengembangan wilayah mengandung 2 (dua) sisi yang saling berkaitan yaitu sisi sosial dan ekonomis. Dengan kata lain pengembangan wilayah adalah merupakan upaya memberikan kesejahteraan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, misalnya menciptakan pusat-pusat produksi, memberikan kemudahan prasarana dan pelayanan logistik

Pengembangan wilayah dalam jangka panjang lebih ditekankan pada pengenalan potensi sumber daya alam dan potensi pengembangan lokal wilayah yang mampu mendukung (menghasilkan) pertumbuhan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat, termasuk pengentasan kemiskinan, serta



upaya mengatasi kendala pembangunan yang ada di daerah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan. Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam rencana pembangunan daerah, pengembangan wilayah lebih ditekankan pada penyusunan paket pengembangan wilayah terpadu dengan mengenali sektor strategis (potensi) yang perlu dikembangkan di suatu wilayah.

Pertumbuhan dan pembangunan yang terjadi di Bali terjadi ketimpangan pembangunan yang sangat jauh antara Bali bagian selatan dengan Bali bagian utara, timur dan barat sebagai faktor dominan kondisi geografis, dan kualitas infrastruktur yang belum merata dan memadai, namun memiliki wilayah dan potensi sumber daya alam dan pengembangan yang belum optimal.

Untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah di provinsi Bali sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan secara optimal beberapa aspek kegiatan pengembangan wilayah yang perlu dikembangkan dan dibangun antara lain:

1. Penetapan sistem pelayanan perkotaan dilakukan berdasarkan kondisi geografis dan aksesibilitas wilayah, mencakup:
 - a. Sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Utara dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Singaraja yang berfungsi sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) didukung oleh wilayah pelayanan Kawasan-kawasan Perkotaan Seririt sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan Kawasan-kawasan Perkotaan Gerokgak, Busungbiu, Banjar, Pancasari, Sawan, Kubutambahan, Tejakula dan Kintamani yang berfungsi sebagai Pusat Pelayanan Kawasan (PPK)
 - b. Sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Timur dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Semarapura yang berfungsi sebagai PKW didukung oleh wilayah pelayanan Kawasan Perkotaan Amlapura dan Kawasan Perkotaan Bangli yang berfungsi sebagai PKL serta Kawasan-kawasan Perkotaan Kubu, Selat, Sidemen, Bebandem, Rendang, Manggis, Dawan, Tembuku, Banjarangkan, Abang, Susut, Sampalan, yang berfungsi sebagai PPK.
 - c. Sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Selatan dengan pusat pelayanan Kawasan Metropolitan Sarbagita yang berfungsi sebagai PKN yang terdiri atas Kawasan Perkotaan Denpasar dan Kawasan Perkotaan Kuta sebagai pusat pelayanan inti didukung Kawasan Perkotaan Mengwi, Gianyar, Tabanan dan Jimbaran sebagai pusat



pelayanan sub sistem metropolitan dan Kawasan Perkotaan Mengwi, Kerobokan, Blahkiuh, Kediri, Sukawati, Blahbatuh, dan Ubud sebagai bagian dari Kawasan Metropolitan Sarbagita, serta Kawasan Perkotaan di luar Kawasan Metropolitan Sarbagita terdiri atas Kawasan Perkotaan Lalanglinggah, Bajera, Megati, Kerambitan, Marga, Baturiti, Penebel, Pupuan, Petang, Tampaksiring, Tegalalang, Payangan, yang berfungsi sebagai PPK.

- d. Sistem wilayah pelayanan perkotaan Bali Barat dengan pusat pelayanan Kawasan Perkotaan Negara yang berfungsi sebagai PKW didukung oleh wilayah pelayanan Kawasan Perkotaan Mendoyo, Melaya, Gilimanuk dan Pekutatan yang berfungsi sebagai PPK.
2. Peningkatan pelayanan infrastruktur berupa pengembangan dan pembangunan jaringan transportasi darat, laut dan udara mencakup :
 - a. Rencana pengembangan 11 (sebelas) jalan bebas hambatan antar kota dan dalam kota mencakup: Kuta-Tanah Lot-Soka; Canggu-Beringkit-Batuan-Purnama; Tohpati-Kusamba-Padangbai; Pekutatan-Soka; Negara-Pekutatan; Gilimanuk-Negara; dan Mengwitani-Singaraja; Serangan-Tanjung Benoa; Serangan-Tohpati; Kuta-Bandar Udara Ngurah Rai; dan Kuta-Denpasar-Tohpati.
 - b. Rencana pengembangan pelabuhan laut : Pelabuhan Benoa, sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang, pariwisata, angkutan peti kemas ekspor-impor barang kerajinan, garmen, seni, sembilan bahan pokok dan ekspor ikan; Pelabuhan Celukan Bawang berfungsi sebagai jaringan transportasi laut untuk pelayanan kapal penumpang dan barang; dan Pelabuhan Tanah Ampo, sebagai pelabuhan untuk pelayanan kapal *cruise* dan *yatch*.
 - c. Rencana pembangunan bandar udara baru di Kabupaten Buleleng berfungsi sebagai bandar udara umum setelah melalui kajian.
 - d. Rencana pengembangan prasarana wilayah mencakup pengelolaan persampahan, dan limbah.
3. Pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mempercepat pengembangan wilayah mencakup:
 - a. Pembangunan sektor-sektor ekonomi yang berkelanjutan dan mampu meningkatkan pendapatan daerah.



- b. pengembangan perekonomian, khususnya pengembangan investasi, diupayakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan perkembangan antar wilayah kabupaten/kota.
- c. Pengembangan kawasan budidaya tanaman pangan yang berupa pertanian tanaman pangan lahan basah (sawah), diarahkan pada upaya untuk mengoptimalkan pemanfaatannya dan menekan alih fungsi lahan yang ada;
- d. Pengembangan sektor kepariwisataan yang berlandaskan kebudayaan Daerah Bali yang dijiwai Agama Hindu, diarahkan pada kepariwisataan berbasis masyarakat melalui pengembangan wisata perdesaan (desa wisata), wisata agro, wisata eko, wisata bahari, wisata budaya, wisata spiritual dengan penyediaan kelengkapan sarana dan prasarana daya tarik pariwisata yang tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan daya dukung dan pengembangan ekonomi kerakyatan.
- e. Pengembangan investasi pariwisata diprioritaskan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat.
- f. Pengembangan sektor industri diarahkan pada pengembangan sentra-sentra, industri kreatif pada zona-zona industri dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
- g. Pengembangan kegiatan perekonomian perdesaan berbasis: pertanian, kerajinan, industri kecil, dan pariwisata kerakyatan yang berlandaskan falsafah *Tri Hita Karanayang* ditunjang dengan pemenuhan sarana dan prasarana untuk menekan urbanisasi.
- h. Mendorong pengembangan kawasan andalan di Kawasan Singaraja dan sekitarnya (Bali Utara) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, aneka industri, pertanian, dan perikanan;
- i. Mendorong pengembangan kawasan andalan di Kawasan Denpasar-Ubud-Kintamani (Bali Selatan) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, industri kecil, pertanian dan perikanan;
- j. Mendorong pengembangan kawasan andalan Laut Bali dan sekitarnya (Bali Barat) sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, perikanan dan pertambangan lepas pantai; dan
- k. Mendorong pengembangan kawasan andalan Bali Timur sebagai kawasan sentra produksi sektor pariwisata, pertanian dan perikanan.

4. Mendorong pemanfaatan ruang secara optimal pada kawasan strategis provinsi khususnya pada kawasan pariwisata dan daya tarik wisata khusus (DTWK), kawasan pelabuhan dengan membuat pengaturan rencana tata ruang berupa peraturan daerah tentang rencana rinci dan peraturan zonasi sebagai pedoman perizinan dan pemanfaatan ruang secara efektif.

C. Daerah Rawan Bencana

Ditinjau dari kondisi geografis, geologis dan hidrometeorologis, Daerah Bali termasuk wilayah yang berpotensi dan rawan mengalami bencana alam. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan/angin kencang/angin puting beliung, gelombang pasang dan tanah langsor.

1). Daerah Rawan Bencana Banjir

Seluruh wilayah Kabupaten/Kota di Bali termasuk memiliki daerah yang berpotensi banjir ditinjau dari aspek curah hujan, kemiringan lereng, kerapatan sungai, jenis tanah dan penggunaan lahan serta ketinggian tempat dari permukaan laut. Akan tetapi daerah yang tergolong rawan banjir tersebar pada 8 (delapan) Kabupaten/Kota, kecuali Kabupaten Bangli. Kabupaten/Kota yang memiliki daerah rawan banjir tergolong relatif luas adalah Kabupaten Jembrana, Denpasar, Buleleng dan Badung. Sedangkan persentase luas daerah rawan banjir terhadap luas masing-masing wilayah menunjukkan bahwa Kota Denpasar memiliki angka tertinggi dimana 22,04% wilayahnya termasuk daerah rawan banjir.

2). Daerah Potensi Kekeringan

Daerah potensi kekeringan di Bali secara dominan terdapat di beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Buleleng bagian timur, yaitu Kecamatan Tejakula dan bagian barat yaitu Kecamatan Gerokgak. Daerah Kabupaten Karangasem yang sering terjadi kekeringan terutama di Kecamatan Kubu yang merupakan bekas lahar Gunung Agung dan Gunung Seraya. Untuk wilayah Kabupaten Klungkung potensi kekeringan yang tinggi terdapat di wilayah Kecamatan Nusa Penida dan sebagian di wilayah Kecamatan Dawan. Di Kabupaten Badung potensi kekeringan yang tinggi terdapat pada Badung bagian selatan, yaitu perbukitan Jimbaran di Kecamatan Kuta Selatan.

Kekeringan di Bali dipengaruhi oleh kondisi curah hujan, penggunaan lahan, kemiringan lereng dan jenis tanah. Total potensi kekeringan di Provinsi Bali mencapai 114.255,81 ha atau 20,45% dari luas wilayah.

3). Daerah Rawan Tanah Longsor

Sesuai dengan karakteristik fisik wilayah menurut Kabupaten/Kota, daerah-daerah rawan longsor terluas terdapat di Kabupaten Karangasem, Bangli dan Buleleng. Sedangkan dilihat dari sebaran daerah rawan longsor menurut kecamatan, terdapat 11 kecamatan memiliki daerah rawan longsor relatif luas yaitu Kintamani, Banjar, Rendang, Pupuan, Busungbiu, Kubu, Tembuku, Penebel, Baturiti, Selemadeg dan Tegallalang.

4). Daerah Rawan Bencana Gempa Bumi

Berdasarkan pada seismik gempa merusak dan sejarah gempa maka di Bali dibagi menjadi 3 zone daerah rawan gempa. Daerah sangat rawan gempa (zone 1) meliputi wilayah Bali timur (Kabupaten Karangasem dan Klungkung; daerah rawan gempa (zone 2) mencakup seluruh wilayah Bangli, Buleleng, Jembrana dan Tabanan. Sedangkan zone 3 daerah agak rawan gempa meliputi Denpasar, Badung dan Gianyar.

Pengaruh tektonik utama untuk Pulau Bali, didominasi oleh adanya tumbukan lempeng Samudera Hindia-Australia dan busur Sunda yang membentang dari Selat Sunda di barat sampai Pulau Romang (Alor) di timur. Tumbukan ini menyebabkan timbulnya pusat-pusat gempa di zona subduksi Jawa yang dimulai dari Selat Sunda di bagian barat dan berakhir di Pulau Banda di bagian timur serta gempa pada patahan busur belakang (*back arc thrust*).

Menurut data aktivitas kegempaan di Bali yang dipantau oleh Pusat Gempa Regional III menunjukkan intensitasnya lebih banyak terjadi di zona generator pembangkit gempa dari selatan dalam skala kekuatan kecil yaitu busur kepulauan Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Gempa subduksi lempeng di bawah Pulau Bali umumnya terdapat pada kedalaman 100 sampai 200 km.

D. Demografi

Penduduk merupakan aset pembangunan bila mereka dapat diberdayakan secara optimal. Kendati begitu, mereka juga bisa menjadi beban pembangunan jika tidak dibarengi dengan kualitas penduduk (SDM) yang memadai pada wilayah/daerah bersangkutan.

Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2014 tercatat jumlah penduduk di Bali sebanyak 4.104,9 ribu jiwa yang terdiri dari 2.066,7 ribu jiwa (50,35%) penduduk laki-laki dan 2.038,2 ribu jiwa (49,65%) penduduk perempuan. Jumlah penduduk tahun 2014 ini naik 1,20 persen dari tahun sebelumnya yang sebanyak 4.056,3 ribu jiwa. Dengan luas wilayah 5.636,66 km², maka kepadatan penduduk di Bali telah mencapai 728 jiwa/km².

Di antara kabupaten/kota yang ada di Bali, Kabupaten Buleleng memiliki luas wilayah terbesar dengan jumlah penduduk mencapai 642,3 ribu jiwa atau 15,65 persen dari seluruh penduduk Bali. Dengan luas wilayah yang mencapai 1.365,88 km², dan kepadatan penduduknya sebesar 470 jiwa/km² atau masih di bawah rata-rata kepadatan penduduk Bali secara umum. Semua potensi tadi tentu akan sangat menunjang dalam pelaksanaan program-program pembangunan di Kabupaten Buleleng. Sebaliknya, Kota Denpasar menunjukkan fenomena lain. Kepadatan penduduk di daerah ini adalah yang tertinggi di Bali yaitu 675 jiwa/km², dimana jumlah penduduk Kota Denpasar mencapai 863,6 ribu jiwa, dengan luas wilayah yang hanya sebesar 127,78 km². Dengan ini masuk akal apabila problem kependudukan menjadi sorotan penting bagi kelangsungan pembangunan Kota Denpasar yang berwawasan budaya. Hal inilah hendaknya menjadi perhatian pihak/instansi kependudukan di Kota Denpasar dengan melakukan program pendataan ulang penduduknya.

Untuk rasio jenis kelamin (perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan) di Bali di tahun menunjukkan angka 101,40. Rasio jenis kelamin tertinggi dicapai oleh Kota Denpasar sebesar 104,31. Sedangkan rasio jenis kelamin terendah berada di Kabupaten Klungkung sebesar 98,53.



Tabel 2.2
Luas Wilayah, Proyeksi, Rasio Jenis Kelamin dan Kepadatan Penduduk Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2014

| Kabupaten/Kota Regency/City | Luas Wilayah Area (Km ²) | Jumlah Penduduk (000 jiwa) Number of Population | | | Rasio Jenis Kelamin Sex Ratio | Kepadatan per km ² Density per Km ² (000) |
|--------------------------------|--|--|---------------------|-----------------|-------------------------------------|--|
| | | Laki-laki Male | Perempuan Female | Jumlah Total | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Jembrana | 841,80 | 133,9 | 135,9 | 269,8 | 98,53 | 0,321 |
| 2. Tabanan | 839,33 | 215,1 | 218,2 | 433,3 | 98,58 | 0,516 |
| 3. Badung | 418,52 | 307,4 | 295,3 | 602,7 | 104,10 | 1,440 |
| 4. Gianyar | 368,00 | 247,5 | 243,0 | 490,5 | 101,85 | 1,333 |
| 5. Klungkung | 315,00 | 86,5 | 88,3 | 174,8 | 97,96 | 0,555 |
| 6. Bangli | 520,81 | 112,0 | 109,3 | 221,3 | 102,47 | 0,425 |
| 7. Karangasem | 839,54 | 203,4 | 203,2 | 406,6 | 100,10 | 0,484 |
| 8. Buleleng | 1 365,88 | 320,0 | 322,3 | 642,3 | 99,29 | 0,470 |
| 9. Denpasar | 127,78 | 440,9 | 422,7 | 863,6 | 104,31 | 6,758 |
| Jumlah / Total : | 5 636,66 | 2 066,7 | 2 038,2 | 4 104,9 | 101,40 | 0,728 |
| 2013 | 5 636,66 | 2 042,0 | 2 014,3 | 4 056,3 | 101,38 | 0,720 |
| 2012 | 5 636,66 | 2 017,0 | 1 990,2 | 4 007,2 | 101,35 | 0,711 |
| 2011 | 5 636,66 | 1 991,8 | 1 965,8 | 3 957,6 | 101,32 | 0,702 |
| 2010 | 5 636,66 | 1 966,2 | 1 941,2 | 3 907,4 | 101,29 | 0,693 |

Sumber : BPS Provinsi Bali

Jumlah penduduk Bali terbanyak ada pada kelompok umur (5-9 tahun) yakni mencapai 352,3 ribu jiwa atau 8,58 persen, diikuti pada kelompok umur (10-14) tahun sebanyak 337,5 ribu jiwa atau 8,22 persen dan kelompok umur (35-39) tahun sebanyak 333,6 ribu jiwa atau 8,12 persen. Sementara itu, penduduk Bali yang masuk ke dalam kelompok umur tua (>64 tahun) ada 194,7 ribu jiwa atau 4,74%.

Tabel 2.3
Proyeksi Penduduk Provinsi Bali Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2014

| Kelompok Umur Age Group | Laki-laki Male | Perempuan Female | Jumlah Total |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 0 - 4 | 167,9 | 160,4 | 328,3 |
| 5 - 9 | 181,9 | 170,4 | 352,3 |
| 10 - 14 | 173,6 | 163,9 | 337,5 |
| 15 - 19 | 157,7 | 151,3 | 309,0 |
| 20 - 24 | 166,0 | 161,2 | 327,2 |
| 25 - 29 | 167,0 | 157,8 | 324,8 |
| 30 - 34 | 162,2 | 161,3 | 323,5 |
| 35 - 39 | 167,6 | 166,0 | 333,6 |
| 40 - 44 | 167,2 | 164,4 | 331,6 |
| 45 - 49 | 152,9 | 151,0 | 303,9 |
| 50 - 54 | 117,2 | 117,3 | 234,5 |
| 55 - 59 | 90,9 | 92,4 | 183,3 |
| 60 - 64 | 69,2 | 71,4 | 140,6 |
| 65 - 69 | 50,9 | 56,8 | 107,7 |
| 70 - 74 | 36,2 | 41,9 | 78,1 |
| 75 + | 38,3 | 50,7 | 89,0 |
| Jumlah / Total : | 2 066,7 | 2 038,2 | 4 104,9 |
| 2013 | 2 042,0 | 2 014,3 | 4 056,3 |
| 2012 | 2 017,0 | 1 990,2 | 4 007,2 |
| 2011 | 1 991,8 | 1 965,8 | 3 957,6 |
| 2010 | 1 966,2 | 1 941,2 | 3 907,4 |

Sumber : BPS Provinsi Bali

2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Aspek kesejahteraan masyarakat memfokuskan peninjauan terhadap perkembangan kesejahteraan Provinsi Bali dari sisi kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, seni budaya dan olah raga sebagai berikut:

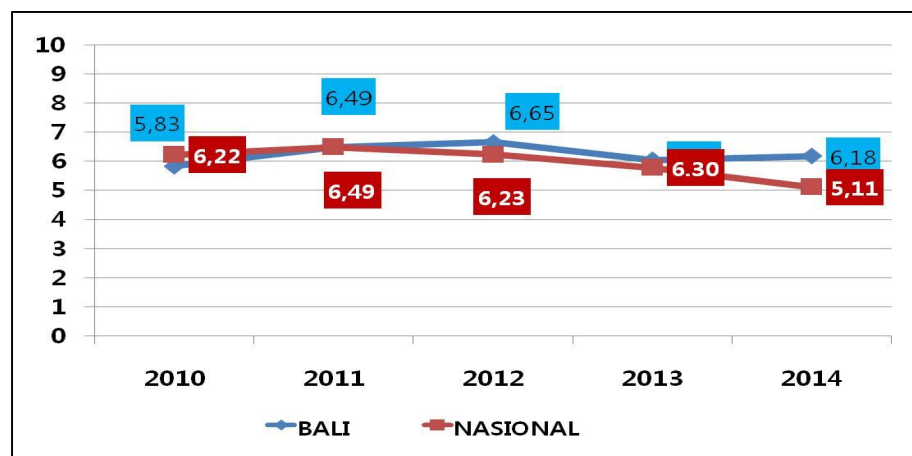
2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dapat diukur dari perkembangan beberapa indikator yang membentuknya, antara lain; pertumbuhan PDRB, PDRB per kapita, laju inflasi, gini rasio, kondisi kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

1. Pertumbuhan Ekonomi

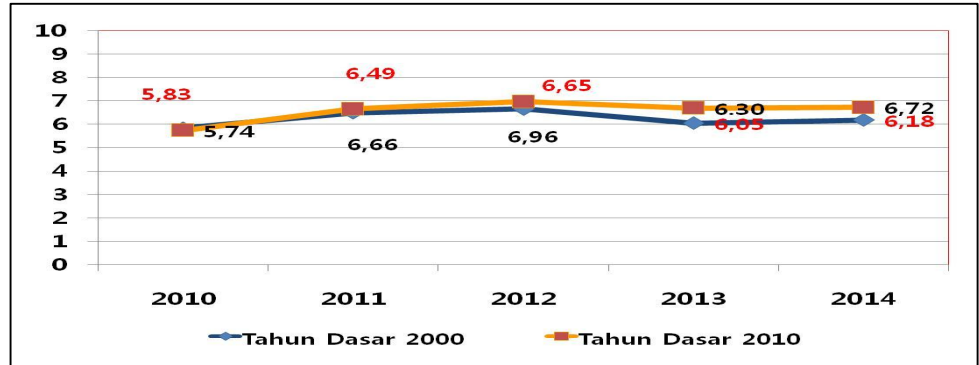
Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang mencerminkan peningkatan kue ekonomi yang tercipta di suatu wilayah. Sehingga semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, akan mampu membawa dampak yang semakin baik bagi kondisi ekonomi masyarakat di daerah bersangkutan.

Selama 5 tahun terakhir perekonomian Bali menunjukkan pertumbuhan yang cukup mengembirakan. Berdasarkan tahun dasar tahun 2000, pada tahun 2010 perekonomian Bali tumbuh sebesar 5,83 persen, terus mengalami peningkatan menjadi 6,49 persen pada tahun 2011 dan sebesar 6,65 pada tahun 2012. Meski pada tahun 2013 sedikit mengalami penurunan menjadi 6,05 persen namun pada tahun 2014 pertumbuhan perekonomian Bali kembali meningkat menjadi sebesar 6,18 persen. Namun mulai 5 Februari 2015 perhitungan perhitungan PDRB menggunakan tahun dasar tahun 2010 sehingga capaian pertumbuhan perekonomian pada tahun 2014 adalah sebesar 6,72 persen. Pertumbuhan perekonomian Bali dalam 3 tahun terakhir selalu berada di atas rata-rata pertumbuhan nasional.



Sumber : BPS Provinsi Bali

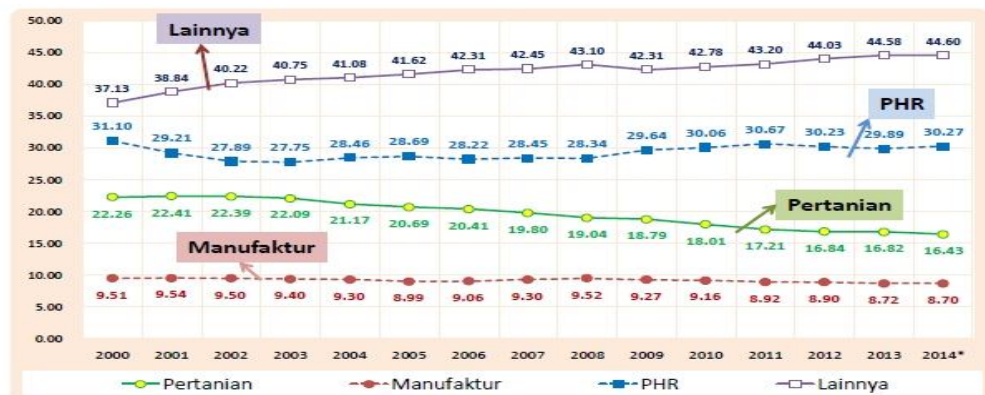
Gambar 2.6
Grafik Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2010 – 2014 Menurut Tahun dasar 2000



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 2.7
Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali Tahun 2010 – 2014
Menurut Tahun dasar 2000 dan 2010

Berkembangnya pariwisata di Bali, membuat struktur perekonomian Bali mengalami pergeseran dari primer ke tersier. Hal ini tampak jelas dari kontribusi masing-masing sektor dalam membentuk PDRB Bali. Sektor perdagangan, hotel, dan restoran (PHR) yang merupakan sektor dengan keterkaitan paling besar terhadap pariwisata memberi share paling dominan bagi PDRB Bali bahkan menunjukkan kecenderungan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kontribusi sektor PHR pada tahun pada tahun 2010 sampai tahun 2012 sebesar 30-an persen, meski sempat turun menjadi 29,89 persen pada tahun 2013, tetapi pada tahun 2014 kembali meningkat menjadi 30,27 persen. Sebaliknya, sektor pertanian meski masih menempati urutan kedua dalam memberi kontribusi terhadap PDRB Bali, namun perannya berangsur-angsur mengalami penurunan. Dari sekitar 18 persen pada tahun 2010 terus mengalami penurunan menjadi 17,27 persen hingga menjadi 16,82 persen pada tahun 2013 dan pada tahun 2014 kembali turun menjadi hanya sebesar 16,43 persen.



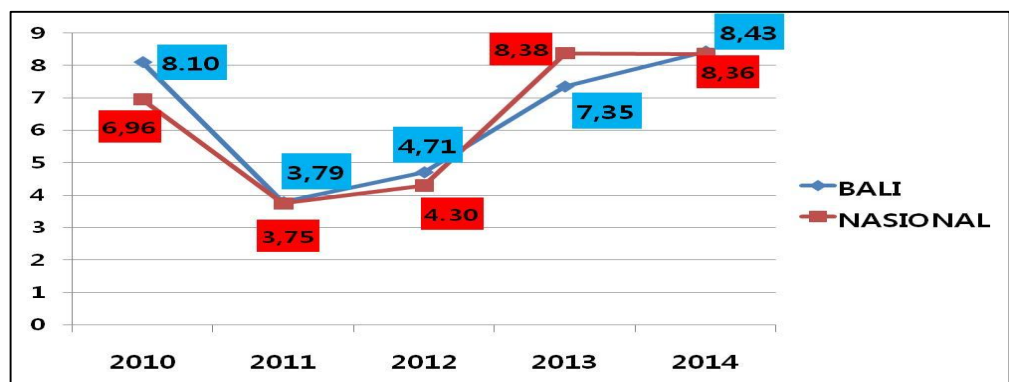
Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 2.8
Grafik Struktur Ekonomi Bali Menurut Lapangan Usaha (Sektoral)
Tahun 2010 – 2014

2. Laju Inflasi

Inflasi dalam ilmu ekonomi diartikan sebagai suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu). Atau bisa juga diartikan sebagai suatu proses menurunnya nilai mata uang secara kontinu. Dilihat dari penyebabnya, inflasi bisa terjadi karena dorongan permintaan (*demand pull inflation*) maupun dorongan kenaikan biaya produksi (*cost push inflation*). Inflasi akibat dorongan permintaan terjadi, ketika permintaan akan barang dan jasa sangat tinggi, sehingga meningkatkan harga barang dan jasa tersebut. Sementara inflasi akibat dorongan biaya produksi terjadi ketika biaya produksi (input) mengalami peningkatan sehingga mengakibatkan harga produk-produk (output) yang dihasilkan ikut meningkat.

Inflasi di Provinsi Bali dalam 5 tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2010, Provinsi Bali (yang diwakili oleh Kota Denpasar) mengalami kenaikan harga barang dan jasa (inflasi) sebesar 6,96 persen. Meski pada tahun 2011 angka inflasi mengalami penurunan menjadi 3,79 persen. Namun mulai tahun 2012 sampai tahun 2014 angka inflasi di Provinsi Bali kembali mengalami kenaikan mulai dari 4,71 persen pada tahun 2012 menjadi 7,35 tahun 2013 dan menjadi 8,43 persen di tahun 2014. Inflasi Bali pada tahun 2014 tersebut sedikit berada diatas inflasi nasional yang sebesar 8,36 persen.



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 2.9
Grafik Perkembangan Inflasi Provinsi Bali dan Nasional,
Tahun 2010 – 2014

Tingginya inflasi khususnya dalam 2 tahun terakhir dominan didorong oleh meningkatnya harga BBM akibat dicabutnya subsidi terhadap BBM oleh pemerintah. Selain memberi dampak langsung terhadap kelompok transportasi, kenaikan kenaikan harga BBM juga

memberi dampak tak langsung pada kenaikan harga barang industri maupun pertanian. Ditambah lagi dengan dampak psikologis yang ditimbulkan baik sebelum kenaikan maupun pasca terjadinya kenaikan.

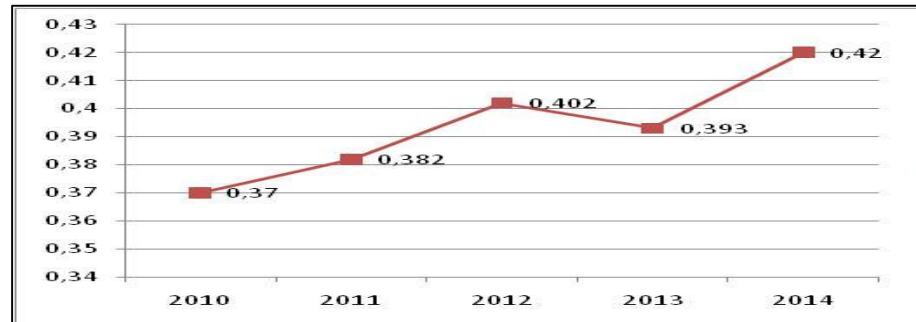
3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita merupakan suatu indikator yang dihitung dengan cara membagi data PDRB dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang seberapa besar rata-rata nilai tambah yang mampu diciptakan oleh penduduk, sehingga secara tidak langsung memberi gambaran akan produktivitas penduduk dalam menciptakan nilai tambah. Semakin besar nilai PDRB per kapita, maka dapat dikatakan suatu daerah/wilayah memiliki produktivitas yang semakin tinggi dalam hal penciptaan nilai tambah, yang diharapkan akan berkorelasi positif terhadap tingkat pendapatan/kesejahteraan penduduk di daerah bersangkutan. Namun mesti diingat kembali bahwa angka ini masih merupakan angka kasar karena tidak sepenuhnya mampu mencerminkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut didasari, antara lain karena: PDRB hanya mengacu pada aspek ekonomi, sedangkan kesejahteraan mencakup aspek ekonomi maupun non ekonomi. Selain itu, pertumbuhan PDRB yang tinggi belum tentu menjamin bahwa distribusi pendapatan relatif merata di kalangan penerima pendapatan. Karena dalam prakteknya tidak semua faktor produksi, khususnya SDM, memiliki akses yang sama untuk terlibat langsung dalam aktivitas produksi.

Perkembangan PDRB per kapita penduduk Bali setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan perhitungan atas Dasar Harga Berlaku (tahun dasar 2000) PDRB per kapita penduduk Bali dalam setiap tahunnya terus mengalami peningkatan, dari sebesar Rp. 17,20 juta pada tahun 2010 menjadi 25,88 juta pada tahun 2013. Sedangkan berdasarkan atas Dasar Harga Berlaku (tahun dasar 2010) PDRB per kapita penduduk Bali pada tahun 2014 telah mencapai 38,11 Juta. Namun demikian PDRB per kapita antara Bali tersebut masih berada di bawah angka rata-rata nasional. Bahkan ada kecenderungan dari waktu ke waktu kesenjangan PDRB per kapita antara Bali dan Nasional semakin melebar. Hal ini harus menjadi perhatian yang serius oleh semua stakeholder untuk lebih meningkatkan PDRB per kapita penduduk Bali.

4. Ketimpangan Pendapatan atau *Gini Ratio*

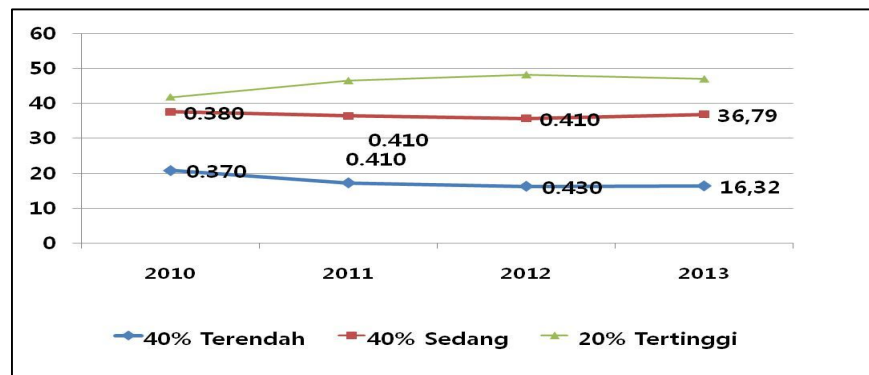
Dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, kesenjangan pendapatan di Provinsi Bali cenderung mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari nilai Gini Ratio Bali dari sebesar 0,320 menjadi 0,382 tahun 2011 dan 0,402 pada tahun 2012. Meski pada tahun 2013, Gini Ratio Bali berhasil mengalami sedikit penurunan menjadi 0,393 namun pada tahun 2014 kembali mengalami peningkatan menjadi 0,420.



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 2.10
Grafik Perkembangan Gini Ratio Provinsi Bali dan Nasional
Tahun 2010 – 2014

Distribusi pendapatan yang diterima oleh penduduk pada masing-masing golongan pendapatan dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 menunjukkan ketimpangan yang semakin melebar. Jika pada tahun 2010, 40 persen penduduk berpendapatan rendah menerima 20,75 persen dari total pendapatan, maka pada tahun 2013 turun menjadi hanya 16,32 persen. Sebaliknya 20 persen penduduk berpendapatan tinggi pada tahun 2010 menerima 41 persen dari total pendapatan, pada tahun 2013 justru meningkat menjadi 46,90 persen dari total pendapatan yang diterima penduduk Bali.



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 2.11
Grafik Perkembangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali
Tahun 2010 – 2013

5. Kemiskinan

Kemiskinan telah menjadi masalah yang kompleks dan kronis baik di tingkat nasional maupun regional, sehingga penanggulangannya memerlukan strategi yang tepat dan berkelanjutan. Program program pembangunan yang dilaksanakan selama ini telah memberikan perhatian besar terhadap upaya pengentasan kemiskinan. Kendati begitu, masalah kemiskinan hingga kini masih menjadi problema kependudukan yang berkepanjangan. Bali yang dikenal sebagai destinasi pariwisata juga tak luput dari permasalahan kemiskinan.

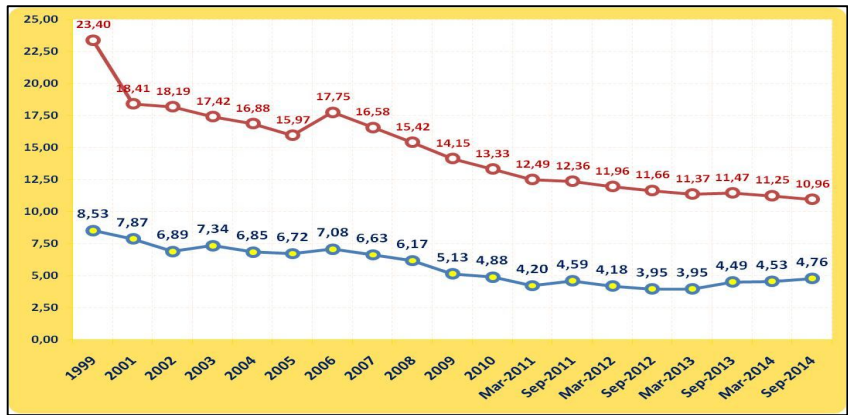
Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional pada periode 2003 – 2008, jumlah penduduk miskin di Bali masih berada di atas kisaran 200 ribu orang tiap tahunnya. Mulai tahun 2009, jumlah penduduk miskin di Bali berada di bawah kisaran 200 ribu yakni 181,7 ribu orang pada tahun 2009; 174,9 ribu orang pada tahun 2010 dan 165,8 ribu di Maret 2011. Pada Maret 2012 jumlah penduduk miskin sedikit bertambah yaitu mencapai 166,93 ribu orang dan 159,89 ribu orang pada Maret 2013. Pada tahun 2014 jumlah penduduk miskin di Bali kembali mengalami peningkatan yakni sebanyak 185,20 ribu orang pada mbulan maret dan sebanyak 195, 95 ribu orang atau mencapai 4,76 persen pada bulan September 2014.



Sumber : Paparan BPS Provinsi Bali

Gambar 2.12
Grafik Perkembangan Persentase dan Penduduk Miskin
Provinsi Bali, Tahun 1999 – 2014

Namun jika dibandingkan dengan Angka Nasional, jumlah penduduk miskin di Bali bisa dikatakan sangat rendah. Secara nasional, jumlah penduduk miskin di seluruh Indonesia mencapai 27,73 juta orang atau sekitar 10,96 persen.



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 2.13
Grafik Perkembangan Persentase Penduduk Miskin
Provinsi Bali dan Nasional, Tahun 1999 – 2014

Kemudian jika dilihat berdasarkan wilayahnya, tingkat kemiskinan di wilayah pedesaan mencapai 5,39 persen sementara di wilayah perkotaan mencapai 4,35 persen. Daerah perkotaan di Bali pada umumnya memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih banyak dibandingkan daerah pedesaan. Selisih jumlah penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan cukup tinggi bahkan mencapai dua digit selama periode tahun 2006 – 2008. Selisih jumlah penduduk miskin antara daerah perkotaan dan pedesaan mengalami penurunan pada tahun 2009 yakni hanya 2,4 ribu orang. Pada tahun 2010 terjadi pergeseran jumlah penduduk miskin, dimana jumlah penduduk miskin di daerah pedesaan mencapai 91,3 ribu orang sedangkan jumlah penduduk miskin di daerah perkotaan hanya 83,6 ribu orang. Di tahun 2011, selisih yang tinggi antara kemiskinan perkotaan dan pedesaan terjadi lagi yakni sebesar 19,6 ribu orang. Pada tahun 2014 selisih antara perkotaan dan pedesaan sebesar 22,44 ribu orang.

| Daerah/Tahun | Jumlah Penduduk Miskin (Ribu) | Persentase Penduduk Miskin (Persen) |
|----------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| [1] | [2] | [3] |
| Perkotaan | | |
| Maret 2014 | 99,90 | 4,01 |
| September 2014 | 109,2 | 4,35 |
| Pedesaan | | |
| Maret 2014 | 85,30 | 5,34 |
| September 2014 | 86,76 | 5,39 |
| Kota+Desa | | |
| Maret 2014 | 185,20 | 4,53 |
| September 2014 | 195,95 | 4,76 |

Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 2.14
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Daerah
Maret 2014 - September 2014

Sama halnya jumlah penduduk miskin, Garis kemiskinan di Bali pun mengalami peningkatan dari Rp. 295.210 perkapita per bulan di bulan Maret 2014 menjadi Rp. 301.747 perkapita perbulan di Bulan September 2014. Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan di Bali jauh lebih besar jika dibandingkan dengan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM terhadap GK total adalah sebesar 69,14 persen sedangkan untuk Bukan Makanan sebesar 30,86 persen.



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 2.15
Grafik Perkembangan Persentase dan Garis Kemiskinan di
Provinsi Bali Tahun 2005 – 2014

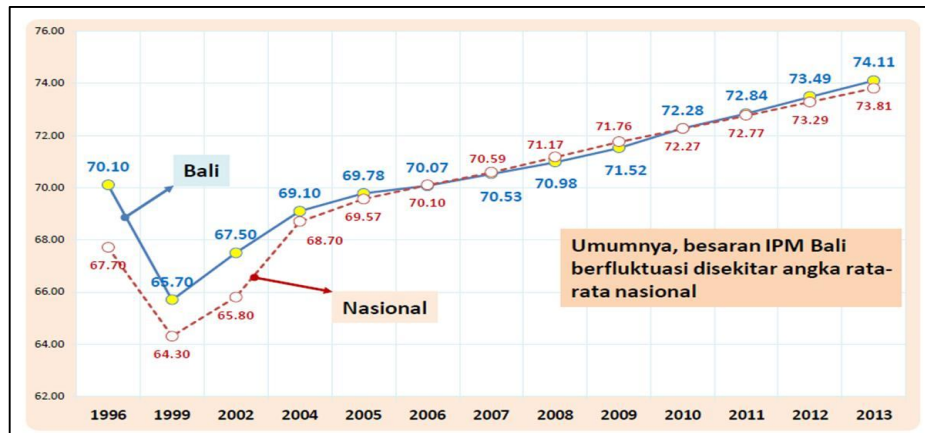
6. Indeks Pembangunan Manusia

Untuk mengukur tingkat perkembangan pembangunan manusia suatu daerah digunakan indikator komposit yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), yang tersusun dari tiga indikator tunggal. Indikator tersebut adalah indeks harapan hidup, indeks pendidikan (melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak. IPM digunakan untuk membandingkan perkembangan antar waktu sehingga dapat memperlihatkan dampak pembangunan yang dilakukan pada periode sebelumnya.

Perkembangan IPM Provinsi Bali dari tahun ke tahun menunjukkan tren yang semakin meningkat. IPM Bali pada tahun 2011 mencapai 72,84, lalu pada tahun selanjutnya meningkat menjadi 73,49.

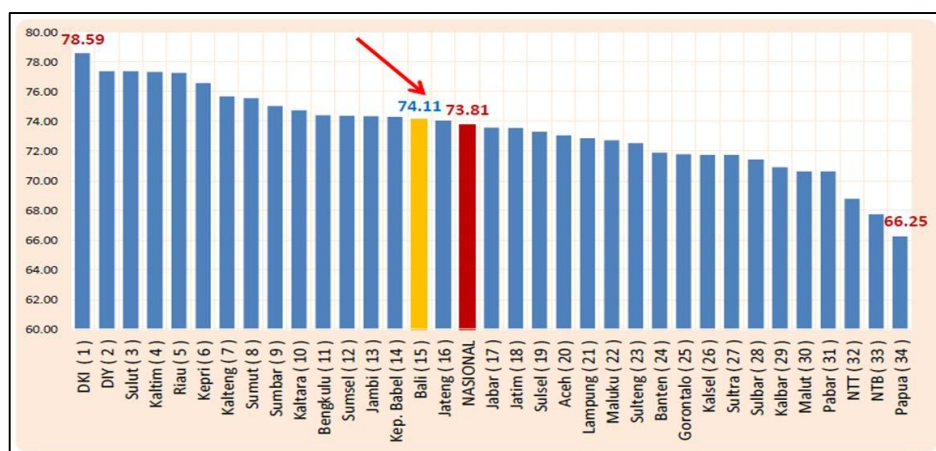


Pada tahun 2013 IPM Bali mencapai 74,11 dan secara nasional berada pada posisi 15 dari seluruh provinsi di Indonesia. Namun IPM Bali pada tahun 2013 masih berada di atas IPM Nasional yang hanya sebesar 73,81.



SUMBER DATA : BPS PROVINSI BALI

Gambar 2.16
Grafik Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Provinsi Bali dan Nasional, Tahun 1996 – 2013

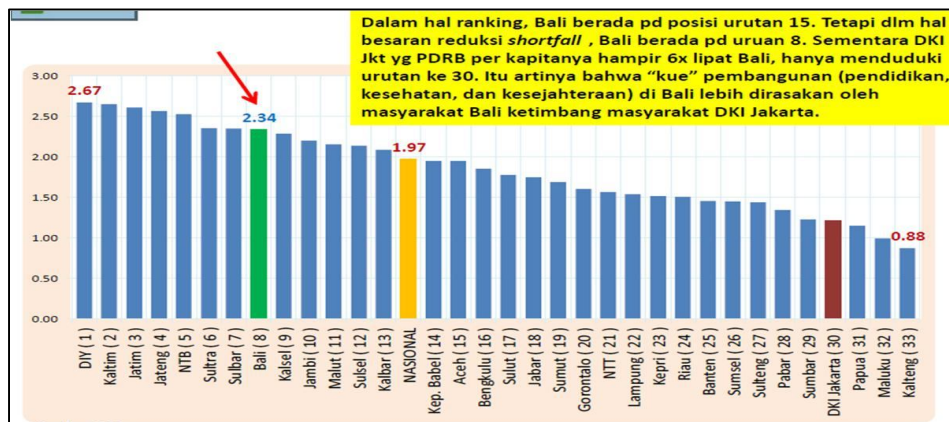


SUMBER DATA : BPS PROVINSI BALI

Gambar 2.17
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali dalam skala Nasional
Tahun 2013

Jika dilihat dari komponen penyusunnya, IPM Bali pada tahun 2013 ditopang oleh angka harapan hidup sebesar 71,20, angka melek huruf sebesar 91,03, rata-rata lama sekolah sebesar 8,58, dan paritas daya beli sebesar 643,78. Pada tahun 2013 IPM tertinggi dicapai oleh Kota Denpasar sebesar 79,41 diikuti oleh Kabupaten Badung sebesar 76,37. Hal ini dapat dimaklumi karena kedua daerah ini merupakan daerah maju diantara daerah lainnya. Selanjutnya IPM terendah pada tahun 2013 disandang oleh Kabupaten Karangasem yaitu sebesar 68,47.

Selain besaran IPM, indikator penting yang harus dicermati adalah reduksi shortfall. Indikator ini merupakan cerminan dari perkembangan IPM dalam satu periode tertentu. Indikator ini dapat digunakan untuk melihat perbandingan antara pembangunan manusia yang telah ditempuh dengan pembangunan manusia pada titik ideal atau IPM ideal sebesar 100. Pada tahun 2013, reduksi shortfall IPM Bali mencapai 2,34. Angka ini meningkat jika dibandingkan dengan 5 tahun yang lalu yang hanya sebesar 1,84, hal ini menandakan bahwa kecepatan Bali untuk mencapai kondisi ideal juga mengalami peningkatan.



SUMBER DATA : BPS PROVINSI BALI

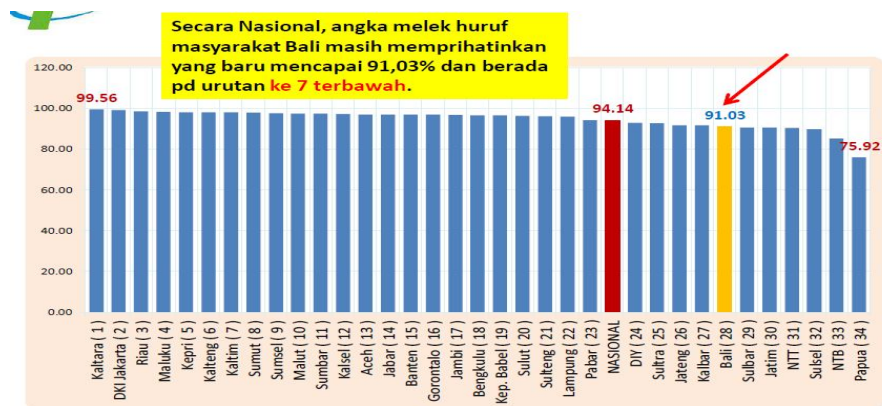
Gambar 2.18
Grafik Reduksi shortfall IPM Provinsi Bali dalam skala Nasional
Tahun 2013

2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain aspek pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan kondisi ketenagakerjaan.

1. Pendidikan

Dari berbagai program dan kegiatan bidang pendidikan di Provinsi Bali selama kurun waktu ini telah mencapai hasil cukup menggembirakan Angka Melek Huruf (AMH) di Provinsi Bali dalam 5 tahun terakhir selalu mengalami peningkatan dari 87,22% pada tahun 2009 menjadi 91,03% pada tahun 2013. Namun demikian angka tersebut masih tergolong relatif rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang sebesar 94,14%. Hal ini bahwa angka buta huruf di Provinsi Bali masih cukup besar yakni sekitar 9%. Penduduk yang buta huruf sebagian besar berada dalam kategori usia non produktif (54 tahun keatas). Sedangkan untuk penduduk usia 25 tahun kebawah hanya sekitar 1%.



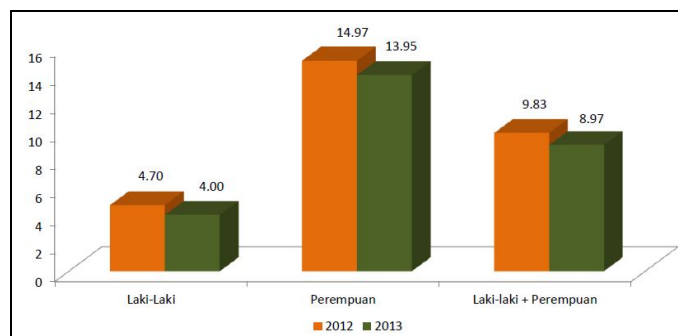
Sumber : Paparan BPS Provinsi Bali

Gambar 2.19
Grafik Peringkat Provinsi Bali menurut Angka Melek Huruf dalam skala Nasional Tahun 2013



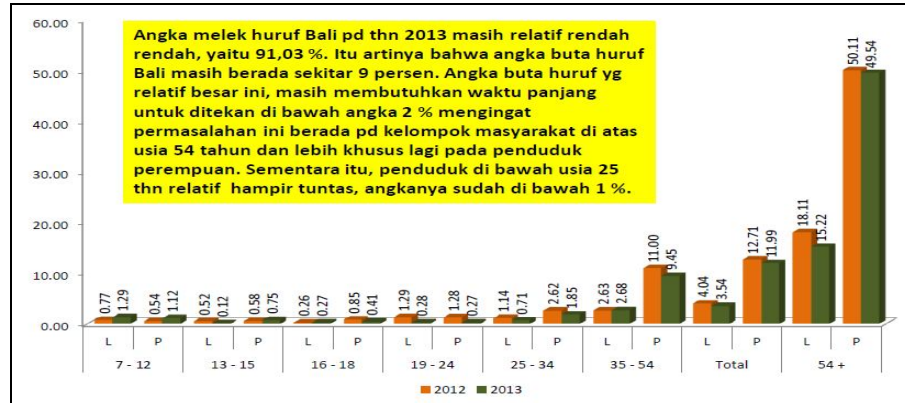
Sumber : Paparan BPS Provinsi Bali

Gambar 2.20
Grafik Posisi Angka Melek Huruf Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2004-2013



Sumber : Paparan BPS Provinsi Bali

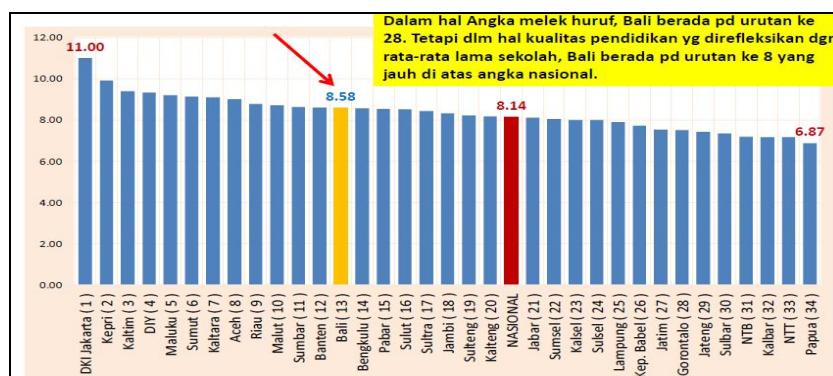
Gambar 2.21
Grafik Posisi Angka Buta Huruf di Provinsi Bali menurut Jenis Kelamin Penduduk Usia 15 Tahun keatas Tahun 2012-2013



Sumber : Paparan BPS Tahun 2014

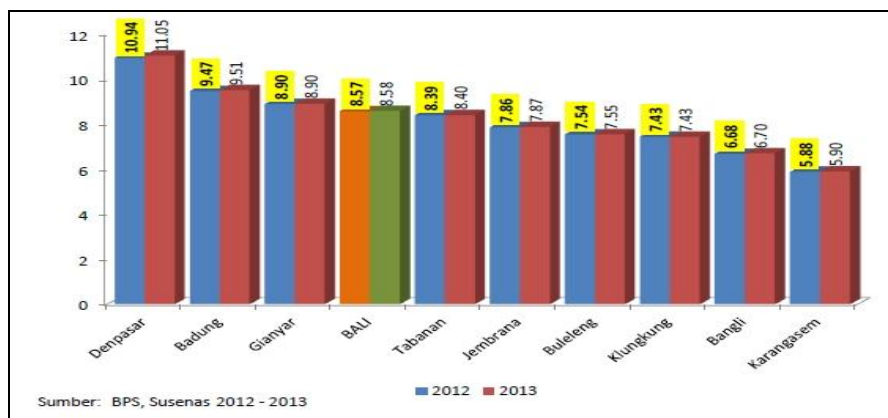
Gambar 2.22
Grafik Penduduk Buta Huruf Usia 7 Tahun keatas berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Bali Tahun 2012-2013

Jika dilihat dari rata-rata lama sekolah yang menunjukkan kualitas pendidikan usia sekolah pada tahun 2013 telah mencapai 8,58 tahun. Angka tersebut telah berada diatas rata-rata nasional dan secara peringkat menempatkan Provinsi Bali pada peringkat ke 8.



Sumber : Paparan BPS Tahun 2014

Gambar 2.23
Grafik Posisi Angka Rata-rata Lama Sekolah Provinsi Bali dengan Nasional Tahun 2013



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 2.24
Grafik Rata-rata Lama Sekolah di Masing-Masing Kaupaten Kota se-Provinsi Bali Tahun 2012 dan 2013



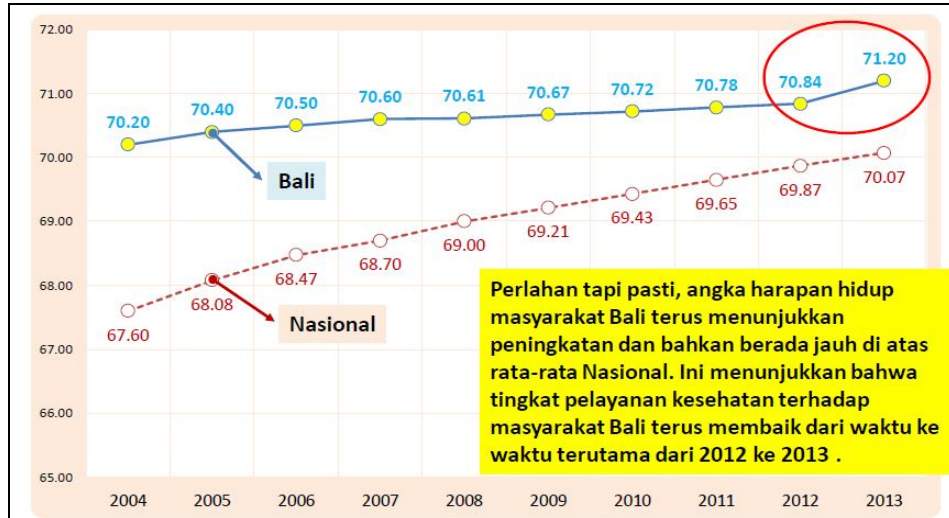
Angka partisipasi sekolah (APK/APM) jenjang SD, SMP dan SMA/SMK di Provinsi Bali dalam setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SD pada tahun 2014 mencapai 107,97%, meningkat dibandingkan tahun 2013 yang sebesar 107,89%. Begitu pula untuk Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD mengalami peningkatan dari 95,29% pada tahun 2013 menjadi 97,21% pada tahun 2014. Angka partisipasi Kasar (APK) untuk SMP tahun 2014 telah mencapai sebesar 106,74 atau mengalami sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun 2013 yang sebesar 106,73. Sedangkan untuk Angka Partisipasi Murni (APM) SMP mencapai 86,85% meningkat sebesar 1,61% dari tahun 2013. Untuk jenjang SMA/SMK, Angka partisipasi Kasar (APK) di Provinsi Bali pada tahun 2014 mencapai sebesar 101,40% dan Angka Partisipasi Murni (APM) sudah mencapai sebesar 76,13%.

2. Kesehatan

Melalui program Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan program lain di bidang kesehatan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Bali telah mampu meningkatkan derajat kesehatan penduduk Bali. Hal ini dapat dilihat berbagai capaian indikator di bidang kesehatan seperti Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Harapan Hidup.

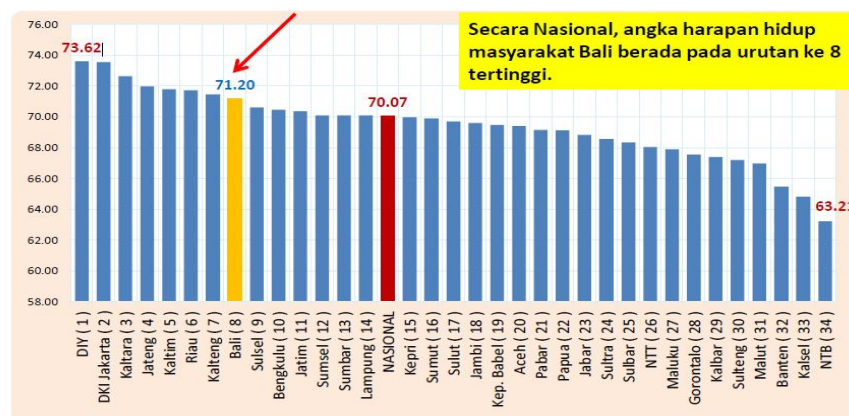
Angka Kematian Bayi (AKB) di Provinsi Bali dalam 5 tahun terakhir telah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan dari sebesar 8.25 pada tahun 2008 menurun menjadi sebesar 7.32 pada tahun 2009, dan menjadi sebesar 7.10 pada tahun 2010. Meski sempat menunjukkan peningkatan pada tahun 2011 menjadi 7.22, namun pada tahun 2012 dan 2013 kembali menunjukkan penurunan menjadi 6.32 dan 5.50.

Demikian pula Angka Harapan Hidup (AHH) di Provinsi Bali selama selama 5 tahun terakhir juga menunjukkan perkembangan yang cukup mengembirakan dari 70,61 tahun pada tahun 2008 menjadi 71,20 tahun pada tahun 2013.



Sumber : Paparan BPS Tahun 2014

Gambar 2.25
Grafik Perbandingan Angka Harapan Hidup Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2004-2013



Sumber : Paparan BPS Tahun 2014

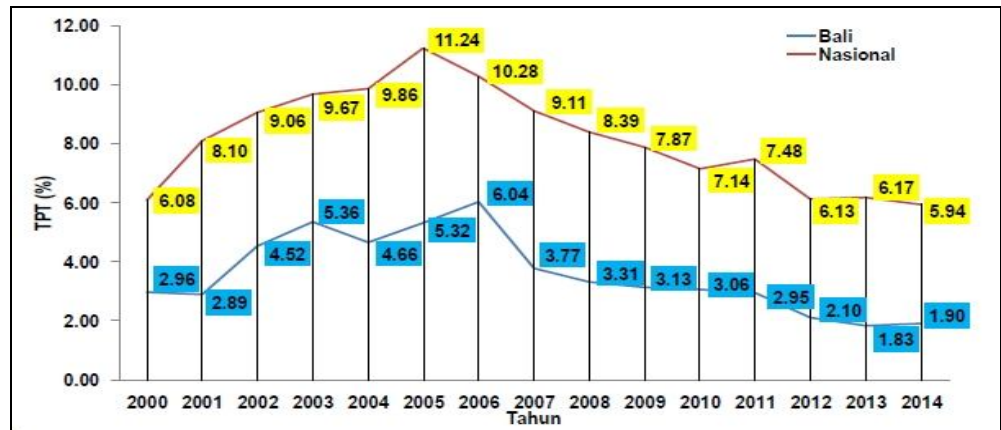
Gambar 2.26
Grafik Posisi Angka Harapan Hidup Provinsi Bali di Tingkat Nasional Tahun 2013

3. Pengangguran

Tingkat kesempatan kerja merupakan suatu ukuran yang menunjukkan proporsi orang yang bekerja dalam angkatan kerjanya. Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari kerja, mempersiapkan usaha, merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, dan penduduk yang sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pada tahun 2014, tingkat kesempatan kerja di Bali mencapai 98,10 persen. Dengan begitu, tingkat pengangguran terbuka di Bali pada tahun 2014 tercatat 1,90 persen. Tingkat pengangguran terbuka di Provinsi

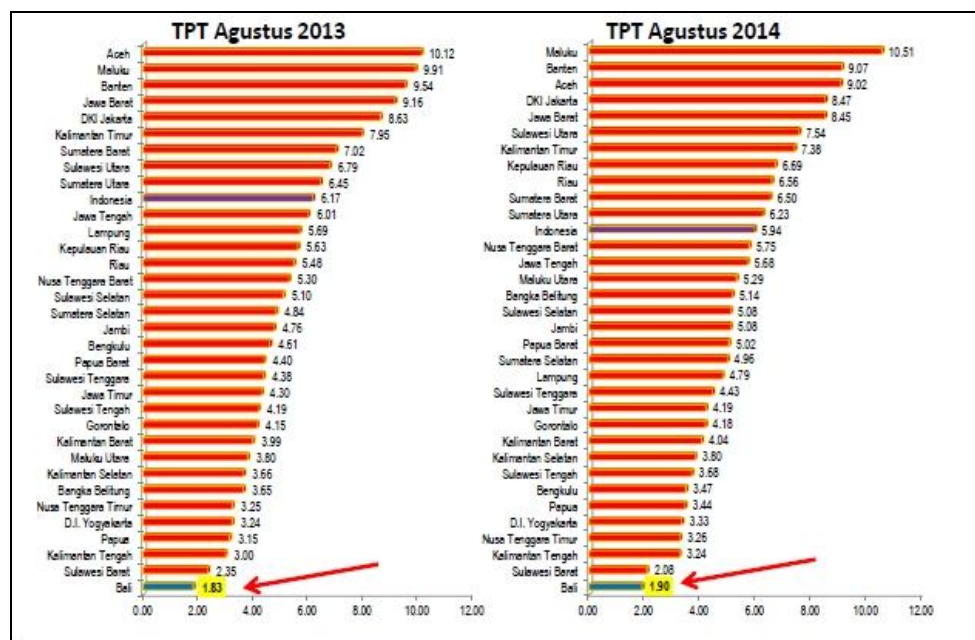


Bali selalu berada dibawah rata-rata nasional, bahkan dalam 2 tahun terakhir merupakan yang terendah diantara seluruh Provinsi di Indonesia



SUMBER DATA : BPS PROVINSI BALI

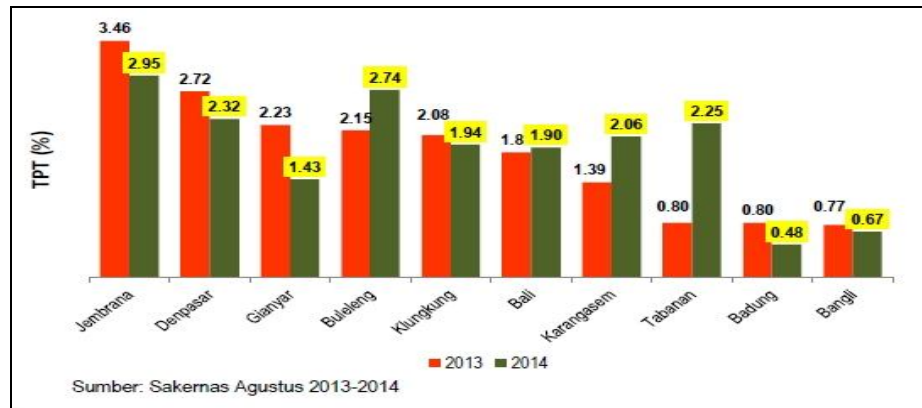
Gambar 2.27
Grafik Perkembangan Persentase Tingkat pengangguran Terbuka Provinsi Bali dan Nasional Tahun 2000-2014



SUMBER DATA : BPS PROVINSI BALI

Gambar 2.28
Posisi persentase Tingkat pengangguran Terbuka Provinsi Bali di Tingkat Nasional Tahun 2013 dan 2014

Selanjutnya jika dipilah berdasarkan Kabupaten/Kota, Kabupaten yang memiliki persentase Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi pada tahun 2014 adalah Kabupaten Jembrana yakni sebesar 2,95 persen dan terendah adalah Kabupaten Badung sebesar 0,48 persen



Sumber : BPS Provinsi Bali

Gambar 2.29
Persentase Tingkat Pengangguran Terbuka
Pada Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013-2014

Meskipun persentase tingkat pengangguran di wilayah Provinsi Bali terbilang kecil, namun setiap daerah di Provinsi Bali diharapkan untuk senantiasa menemukan dan mengembangkan potensi sektor-sektor unggulan terutama yang mampu menyerap banyak tenaga kerja.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Kondisi seni budaya di Bali perkembangannya selama lima tahun ini cukup baik, penyelenggaraan event-event seni budaya selalu banyak diminati masyarakat Bali. Hal ini banyak dilatarbelakangi oleh budaya Bali yang selalu menjaga dan menjunjung tinggi keseimbangan hidup sesuai dengan warisan filsafat leluhur yang terus masih berlangsung di Bali. Landasan falsafah tersebut adalah Tri Hita Karana.

Pusat kegiatan seni budaya di Bali selain berada di Banjar Pekraman juga banyak bermunculan dari sanggar-sanggar tari dan budaya yang lokasinya banyak tersebar di Kabupaten/Kota Provinsi Bali. Jumlah kelompok kesenian di Provinsi Bali mengalami peningkatan dari sebanyak 2871 kelompok pada tahun 2012 menjadi 2.893 kelompok pada tahun 2014 serta dengan jumlah gedung kesenian sebanyak 10 gedung.

Kondisi keolahragaan di Bali cukup berkembang dengan baik, hal ini terlihat dari jumlah klub olahraga di Provinsi Bali pada tahun 2014 tercatat 2.059 klub olahraga. Sedangkan untuk jumlah gedung olahraga di Provinsi Bali, pada tahun 2014 tercatat 69 gedung.

2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

Untuk melihat gambaran umum kondisi daerah pada aspek pelayanan umum di Provinsi Bali dilakukan dengan menganalisis indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang difokuskan pada penyelenggaraan layanan urusan wajib, dan penyelenggaraan layanan urusan pilihan yang diuraikan sebagai berikut:

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

Analisis kinerja atas layanan urusan wajib dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan wajib pemerintahan daerah meliputi urusan :

1. Pendidikan

Banyak yang beranggapan bahwa bangsa yang mempunyai sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan lebih mampu bersaing dalam memasarkan barang dan jasa yang dihasilkannya, sehingga dengan sendirinya akan menguasai perekonomian dunia. Salah satu komponen yang berkaitan langsung dengan peningkatan SDM adalah pendidikan. Karena itu, kualitas SDM selalu diupayakan untuk ditingkatkan melalui pendidikan yang berkualitas, demi tercapainya keberhasilan pembangunan.

Pembangunan SDM memiliki keterkaitan erat pada akses penyediaan fasilitas pendidikan meliputi gedung sekolah, tenaga pengajar (guru/dosen), kelengkapan literatur (buku-buku), dan sarana penunjang pendidikan lainnya. Sarana pendidikan seperti bangunan fisik (gedung sekolah) yang ideal tentunya merupakan dambaan bagi semua lapisan masyarakat untuk dapat menikmatinya. Dalam hal penyediaan prasarana pendidikan pada jenjang SD/ sederajat selama tahun ajaran 2012/2013, terdapat 2.461 SD, yang terdiri dari 2.331 SD Negeri, 80 SD swasta, dan 50 Madrasah Ibtidaiyah. Dari jumlah tersebut sebanyak 501 unit SD (20,36%) berada di Kabupaten Buleleng, sebaliknya di Kabupaten Klungkung baru terdapat 140 unit SD (5,69%). Pada tingkat SLTP, jumlah sekolah mencapai 443 unit (263 SLTP Negeri, 151 SLTP Swasta, dan 29 Madrasah Tsanawiyah). Untuk jumlah bangunan sekolah pada tingkat SMU terjadi penurunan dari tahun sebelumnya.



Dalam konteks lain, rasio murid-guru dan murid-sekolah merupakan indikator penting untuk mengukur daya tampung dan efektifitas proses belajar mengajar. Ketersediaan sarana fisik sekolah misalnya, menjadi semakin efektif kalau jumlahnya sepadan dengan daya tampung muridnya. Demikian juga guru dan murid, proses belajar mengajar akan menjadi semakin terjamin kalau seorang guru tidak mengajar terlalu banyak murid.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan Provinsi Bali, jumlah murid SD/MI selama tahun 2012/2013 mencapai 439.942 siswa, sedangkan tenaga guru sebanyak 25.682 orang. Ini berarti rasio murid-guru pada jenjang SD/MI sebesar 17,13. Dengan kata lain, tiap guru SD/MI dapat mendidik/mengajar rata-rata 17 murid. Pada tingkat SLTP/MTs, jumlah murid mengalami peningkatan 3,56 persen, dari 182.794 orang di tahun 2011/2012 menjadi 189.301 orang di tahun 2012/2013. Dengan tenaga guru sebanyak 12.008 orang, yang berarti rasio murid-guru mencapai 15,76. Dengan kata lain, tiap tenaga guru SLTP/MTs dapat mendidik/mengajar rata-rata 16 orang murid.

Tabel 2.4
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru Sekolah Dasar/M.I. Menurut Kabupaten/Kota Tahun 201/2013

| Kabupaten/ Kota Regency/ City | Sekolah / Schools | | | | Murid / Pupils | | | Guru Teachers |
|--|-------------------|-------------------|------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | Negeri State | Swasta Private | M.I. Madrasah | Jumlah Total | Laki-laki Male | Prp. Female | Jumlah Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. Jembrana | 181 | 3 | 9 | 193 | 15 220 | 14 619 | 29 839 | 1 492 |
| 2. Tabanan | 323 | 6 | 2 | 331 | 19 858 | 18 879 | 38 737 | 2 547 |
| 3. Badung | 247 | 18 | 2 | 267 | 31 405 | 29 663 | 61 068 | 3 217 |
| 4. Gianyar | 280 | 6 | 1 | 287 | 24 720 | 23 589 | 48 309 | 3 144 |
| 5. Klungkung | 138 | 0 | 2 | 140 | 9 685 | 8 881 | 18 566 | 1 529 |
| 6. Bangli | 162 | 0 | 0 | 162 | 12 258 | 11 383 | 23 641 | 1 420 |
| 7. Karangasem | 355 | 2 | 6 | 363 | 24 476 | 23 597 | 48 073 | 3 856 |
| 8. Buleleng | 476 | 4 | 21 | 501 | 42 526 | 42 126 | 84 652 | 4 435 |
| 9. Denpasar | 169 | 41 | 7 | 217 | 42 766 | 44 291 | 87 057 | 4 042 |
| Jumlah/Total : | 2 331 | 80 | 50 | 2 461 | 222 914 | 217 028 | 439 942 | 25 682 |
| 2011/2012 | 2 331 | 84 | 51 | 2 466 | 225 648 | 209 186 | 434 834 | 27 414 |
| 2010/2011 | 2 368 | 87 | 47 | 2 502 | - | - | 437 666 | 26 942 |
| 2009/2010 | 2 376 | 80 | 50 | 2 506 | - | - | 428 462 | 25 422 |
| 2008/2009 | 2 347 | 79 | 48 | 2 474 | - | - | 428 546 | 21 990 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014



Tabel 2.5
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru SLTP/MTs
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 201/2013

| Kabupaten/ Kota Regency/ City | Sekolah / Schools | | | | Murid / Pupils | | | Guru Teachers |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | Negeri State | Swasta Private | MTs. Madrasa h | Jumlah Total | Laki-laki Male | Prp. Female | Jumlah Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. Jembrana | 18 | 8 | 8 | 34 | 6 455 | 5 912 | 12 367 | 739 |
| 2. Tabanan | 36 | 3 | 4 | 43 | 9 943 | 9 174 | 19 117 | 1 953 |
| 3. Badung | 19 | 33 | 1 | 53 | 13 789 | 12 768 | 26 557 | 1 440 |
| 4. Gianyar | 21 | 26 | 1 | 48 | 11 208 | 10 333 | 21 541 | 733 |
| 5. Klungkung | 20 | 3 | 1 | 24 | 4 635 | 4 056 | 8 691 | 1 449 |
| 6. Bangli | 24 | 6 | 0 | 30 | 5 031 | 4 777 | 9 808 | 795 |
| 7. Karangasem | 57 | 6 | 2 | 65 | 10 393 | 8 937 | 19 330 | 1 805 |
| 8. Buleleng | 56 | 21 | 8 | 85 | 16 782 | 15 488 | 32 270 | 1 478 |
| 9. Denpasar | 12 | 45 | 4 | 61 | 20 308 | 19 312 | 39 620 | 1 616 |
| Jumlah/Total : | 263 | 151 | 29 | 443 | 98 544 | 90 757 | 189 301 | 12 008 |
| 2011/2012 | 251 | 146 | 28 | 425 | 95 421 | 87 373 | 182 794 | 13 874 |
| 2010/2011 | 202 | 174 | - | 376 | 91 864 | 84 543 | 176 407 | 12 910 |
| 2009/2010 | 213 | 194 | - | 407 | 91 708 | 82 360 | 174 068 | 12 920 |
| 2008/2009 | 242 | 134 | - | 376 | 101 811 | 96 110 | 197 921 | 11 922 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Masih bersumber dari data yang sama, jumlah murid pada jenjang SMU/SMA mencapai 79.494 orang di tahun 2012/2013. Sedangkan jumlah tenaga guru yang mengajar di jenjang SMU/SMA sebanyak 7.605 orang, sehingga rasio murid-guru sebesar 10,45. Dari sini dapat dikatakan bahwa tiap tenaga pengajar di jenjang SMU/SMA dapat mendidik rata-rata 10 orang murid. Hal yang sama juga terjadi pada jumlah murid pada jenjang SMK meningkat 2,80 persen dari 68.045 orang di tahun 2011/2012 menjadi 69.949 orang di tahun 2012/2013. Banyaknya murid pada jenjang SMK dididik oleh tenaga guru sebanyak 6.906 orang, yang berarti rasio murid-guru sebesar 10,13. Dengan kata lain, tiap tenaga guru SMK dapat mendidik/mengajar rata-rata 10 orang murid.

Tabel 2.6
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru SMU/MA
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 201/2013

| Kabupaten/ Kota Regency/ City | Sekolah / Schools | | | | Murid / Pupils | | | Guru Teachers |
|--|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | Negeri State | Swasta Private | M.A. Madrasa h | Jumlah Total | Laki-laki Male | Prp. Female | Jumlah Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. Jembrana | 6 | 8 | 4 | 18 | 3 615 | 3 841 | 7 456 | 518 |
| 2. Tabanan | 9 | 8 | 4 | 21 | 3 874 | 3 867 | 7 741 | 1 058 |
| 3. Badung | 8 | 11 | 0 | 19 | 4 898 | 5 382 | 10 280 | 813 |
| 4. Gianyar | 7 | 10 | 1 | 18 | 4 246 | 3 674 | 7 920 | 739 |
| 5. Klungkung | 6 | 4 | 1 | 11 | 2 715 | 2 115 | 4 830 | 492 |
| 6. Bangli | 5 | 3 | 0 | 8 | 1 319 | 1 124 | 2 443 | 334 |
| 7. Karangasem | 9 | 8 | 1 | 18 | 5 014 | 4 220 | 9 234 | 752 |
| 8. Buleleng | 17 | 16 | 4 | 37 | 5 840 | 4 894 | 10 734 | 1 441 |
| 9. Denpasar | 8 | 22 | 3 | 33 | 8 994 | 9 862 | 18 856 | 1 458 |
| Jumlah/Total : | 75 | 90 | 18 | 183 | 40 515 | 38 979 | 79 494 | 7 605 |
| 2011/2012 | 75 | 97 | 16 | 188 | 39 422 | 37 239 | 76 661 | 7 898 |
| 2010/2011 | 78 | 89 | - | 167 | 47 129 | 43 338 | 90 467 | 7 505 |
| 2009/2010 | 79 | 103 | - | 182 | 37 561 | 33 822 | 71 383 | 7 553 |
| 2008/2009 | 72 | 99 | - | 171 | 34 251 | 31 797 | 66 048 | 7 022 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014



Tabel 2.7
Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru SMK
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 201/2013

| Kabupaten/ Kota Regency/ City | Sekolah / Schools | | | Murid / Pupils | | | Guru Teachers |
|--|-------------------|-------------------|-----------------|-------------------|----------------|-----------------|------------------|
| | Negeri State | Swasta Private | Jumlah Total | Laki-laki Male | Prp. Female | Jumlah Total | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| 1. Jembrana | 3 | 5 | 8 | 1 919 | 1 474 | 3 393 | 296 |
| 2. Tabanan | 3 | 10 | 13 | 3 072 | 2 660 | 5 732 | 581 |
| 3. Badung | 2 | 17 | 19 | 6 107 | 4 594 | 10 701 | 902 |
| 4. Gianyar | 7 | 20 | 27 | 6 403 | 5 954 | 12 357 | 1 407 |
| 5. Klungkung | 2 | 4 | 6 | 1 545 | 1 297 | 2 842 | 281 |
| 6. Bangli | 9 | 3 | 12 | 2 151 | 1 514 | 3 665 | 429 |
| 7. Karangasem | 3 | 5 | 8 | 2 869 | 1 304 | 4 173 | 346 |
| 8. Buleleng | 9 | 16 | 25 | 3 991 | 3 626 | 7 617 | 1 104 |
| 9. Denpasar | 5 | 25 | 30 | 11 227 | 8 242 | 19 469 | 1 560 |
| Jumlah/Total : | 43 | 105 | 148 | 39 284 | 30 665 | 69 949 | 6 906 |
| 2011/2012 | 43 | 105 | 148 | 38 546 | 29 499 | 68 045 | 6 835 |
| 2010/2011 | 39 | 91 | 130 | 35 696 | 27 246 | 62 942 | 4 017 |
| 2009/2010 | 40 | 95 | 135 | 24 346 | 19 015 | 43 361 | 2 711 |
| 2008/2009 | 38 | 75 | 113 | 23 282 | 18 995 | 42 277 | 4 166 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

2. Kesehatan

Pada hakikatnya pembangunan kesehatan bertujuan untuk mencapai kemampuan hidup sehat bagi seluruh rakyat agar dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal. Karena itu, untuk menilai pembangunan kesehatan, salah satu pendekatan yang bisa digunakan adalah dengan melihat faktor mana yang lebih ditekankan saat menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Dalam paradigma sakit (kuratif), penekanan lebih diberikan pada upaya untuk mengobati gangguan penyakit yang muncul. Sedangkan paradigma sehat (preventif dan promotif) lebih menekankan pada upaya apa yang bisa digunakan untuk menghindari terjadinya suatu penyakit. Termasuk dalam pendekatan kedua ini adalah upaya-upaya pencegahan dan penyadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Adalah relevan bila perbaikan derajat kesehatan masyarakat tersebut dibarengi pula dengan ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit umum (RSU) dan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).

Selama tahun 2013, terjadi penambahan jumlah RSU Swasta sebanyak 1 unit. Dengan demikian, jumlah RSU menjadi sebanyak 46 unit (10 unit RSU pemerintah dan 36 unit RSU swasta) dan Rumah Sakit lainnya sebanyak 5 unit (2 unit RS Khusus dan 3 unit RS Hankam). Namun demikian jika dilihat dari daya tampungnya, tampak



ada perbaikan yaitu dengan meningkatnya jumlah kapasitas tempat tidur yang kini mencapai 5.465 buah, dari sebelumnya yang hanya 4.813 buah. Selain RSUD, Puskesmas juga merupakan prasarana kesehatan yang tak kalah pentingnya di Bali. Begitu juga jumlah puskesmas meningkat menjadi sebanyak 120 unit, Pos Pelayanan Terpadu meningkat sebanyak 10 unit dari 4.773 unit menjadi 4.783 unit. Sementara itu, jumlah puskesmas pembantu dan puskesmas keliling mengalami penurunan masing-masing sebanyak 4 dan 19 unit menjadi 523 dan 108 unit.

Tabel 2.8
Banyaknya Rumah Sakit dan Kapasitas Tempat Tidur
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenisnya di Bali Tahun 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | Rumah Sakit Umum Central Hospital | | | | Rumah Sakit Lainnya Another Hospital | | | |
|--------------------------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|----------------|---|----------------|----------------|----------------|
| | Pemerintah Government | | Swasta Private | | Khusus Specialised | | Hankam Army | |
| | Yang Ada | Kapa- sitas | Yang Ada | Kapa- sitas | Yang Ada | Kapa- sitas | Yang Ada | Kapa- sitas |
| | Aval- lable | Capa- city | Aval- lable | Capa- city | Aval- lable | Capa- city | Aval- lable | Capa- city |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. Jembrana | 1 | 122 | 2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tabanan | 1 | 227 | 5 | 278 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Badung | 1 | 132 | 5 | 272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Gianyar | 1 | 210 | 3 | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Klungkung | 1 | 144 | 2 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Bangli | 1 | 310 | 1 | 62 | 1 | 340 | 0 | 0 |
| 7. Karangasem | 1 | 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Buleleng | 1 | 249 | 4 | 328 | 0 | 0 | 1 | 60 |
| 9. Denpasar | 2 | 933 | 14 | 1 034 | 1 | 25 | 2 | 223 |
| Jumlah / Total : | 10 | 2 468 | 36 | 2 349 | 2 | 365 | 3 | 283 |
| 2012 | 10 | 2 252 | 35 | 1 952 | 2 | 365 | 3 | 244 |
| 2011 | 10 | 2 253 | 33 | 1 749 | 2 | 365 | 3 | 244 |
| 2010 | 10 | 2 060 | 30 | 1 613 | 2 | 373 | 3 | 227 |
| 2009 | 10 | 2 042 | 30 | 1 676 | 2 | 310 | 3 | 207 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.9
Banyaknya Fasilitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat
Menurut Kabupaten/Kota dan Jenisnya
di Provinsi Bali Tahun 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | Jumlah Kecamatan Number of Districts | Jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Type of Service Facilities | | | |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|
| | | Puskesmas Public Health Centers | Puskesmas Pembantu Supporting Public Health Centers | Puskesmas Keliling Moving Public Health Centers | Pos Pelayanan Terpadu Coordinated health Centre |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Jembrana | 5 | 10 | 43 | 10 | 328 |
| 2. Tabanan | 10 | 20 | 76 | 21 | 828 |
| 3. Badung | 6 | 13 | 57 | 1 | 572 |
| 4. Gianyar | 7 | 13 | 65 | 13 | 566 |
| 5. Klungkung | 4 | 9 | 53 | 7 | 292 |
| 6. Bangli | 4 | 12 | 59 | 11 | 351 |
| 7. Karangasem | 8 | 12 | 70 | 12 | 671 |
| 8. Buleleng | 9 | 20 | 76 | 21 | 714 |
| 9. Denpasar | 4 | 11 | 24 | 12 | 461 |
| Jumlah / Total : | 57 | 120 | 523 | 108 | 4 783 |
| 2012 | 57 | 115 | 527 | 127 | 4 773 |
| 2011 | 57 | 114 | 528 | 150 | 4 751 |
| 2010 | 57 | 114 | 525 | 138 | 4 757 |
| 2009 | 57 | 114 | 526 | 138 | 4 738 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014



Untuk ketersediaan tenaga medis (dokter dan dokter gigi) serta para medis lainnya, tampak juga menunjukkan kecenderungan menurun ditahun ini. Jumlah tenaga kesehatan di Bali pada tahun 2013 tercatat sebanyak 3.523 orang, terdiri dari 413 dokter, 232 dokter gigi, dan 2.878 paramedis.

Untuk tahun ini, penderita TBC di Provinsi Bali mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya yakni TBC dari 1.827 di tahun 2012 menjadi 2.999 di tahun 2013 dan kusta menjadi 84 penderita ditahun ini. Hal sebaliknya terjadi pada penderita malaria yang menurun bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya menjadi 10 penderita. Sementara penderita demam berdarah melonjak jadi 7.077 penderita.

Tabel 2.10
Banyaknya Penderita Yang Dijangkiti Penyakit Menular Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali Tahun 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | TBC, BTA, ACID Tuberculosis, Fast Baceli | Kolera Cholera | Malaria Malaria | Kusta Leprosy | Demam Berdarah Fever Dengue |
|--------------------------------|---|-------------------|--------------------|------------------|-----------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Jembrana | 138 | 0 | 3 | 15 | 175 |
| 2. Tabanan | 162 | 0 | 0 | 2 | 793 |
| 3. Badung | 250 | 0 | 0 | 12 | 1 802 |
| 4. Gianyar | 302 | 0 | 1 | 6 | 808 |
| 5. Klungkung | 95 | 0 | 3 | 12 | 266 |
| 6. Bangli | 59 | 0 | 0 | 2 | 106 |
| 7. Karangasem | 233 | 0 | 1 | 12 | 309 |
| 8. Buleleng | 669 | 0 | 2 | 12 | 1 052 |
| 9. Denpasar | 1 091 | 0 | 0 | 11 | 1 766 |
| Jumlah / Total : | 2 999 | 0 | 10 | 84 | 7 077 |
| 2012 | 1 827 | 0 | 22 | 84 | 2 649 |
| 2011 | 1 591 | 0 | 23 | 65 | 2 993 |
| 2010 | 1 451 | 0 | 54 | 94 | 12 490 |
| 2009 | 1 536 | 0 | 29 | 98 | 5 810 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

3. Pekerjaan Umum

Pembangunan urusan pekerjaan umum mencakup kegiatan penyediaan sarana dan prasarana dasar dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Program Pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya, dilaksanakan melalui kegiatan pemeliharaan jaringan irigasi khususnya yang menjadi kewenangan provinsi. Data tahun 2013 menunjukkan, jaringan irigasi kewenangan provinsi tercatat sepanjang 1.412.032 Km, dalam kondisi baik sepanjang 1.063.388 Km (75,31%), dan dalam kondisi rusak sepanjang 348.644 Km (24,69%). Pada tahun 2013 telah dilaksanakan rehab pada 5 (lima) Daerah Irigasi (DI) yaitu DI Palasari Kab. Jemberana dan DI Yeh Lehdi Kab. Jembrana, DI Balian di Kab.



Jembrana/Tabanan, DI Wongan di Kota Denpasar/Badung, serta DI Tiyingtali di Kab. Buleleng. Disamping itu juga dilakukan pemeliharaan berkala jaringan irigasi yang telah dibangun di 8 (delapan) Kab./Kota kecuali Kab. Karangasem.

Untuk menjaga prasarana dan sarana pengairan agar dapat tetap berfungsi dengan baik telah dilakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi. Pelaksanaan kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi seluas \pm 74.465 ha ditangani oleh Pemerintah Kabupaten/Kota, sedangkan seluas 25.949 ha dan bersifat lintas kabupaten/kotaditangani oleh Pemerintah Provinsi.

Dalam rangka pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan SumberDaya Air lainnya serta untuk menjaga kondisi sumber air, berdasarkan Undang-Undang No.7 Tahun 2004 tentang SumberDaya Air pada tahun 2012 pemerintah Provinsi Bali telah melakukan kegiatan pemeliharaan EmbungTembok Kab. Buleleng, Embung Pura Gae, Embung Ban dan Embung Tukad Mantri di Kab. Karangasem, serta pemeliharaan Danau Buyan. Demikian pula halnya dengan kegiatan pengamanan Mata Air tersebar di 9 (sembilan) Kab./Kota telah dilakukan untuk menjaga/melestarikan fungsi dari mata air sebagai penyangga kebutuhan masyarakat.

Sampai saat ini tingkat pelayanan air bersih perpipaan di perkotaan mencapai 81,29%, dilayani melalui sambungan rumah 137.744 sambungan dan keran umum/hidran umum sebanyak 730 sambungan. Tingkat pelayanan tertinggi untuk air bersih perpipaan (di perkotaan) berada di Kabupaten Buleleng (97,27 %) dan terendah di Kabupaten Karangasem (43,28 %). Kapasitas sumber yang dikelola sebesar 11.362,15 L/dt terdiri atas 9.488,15 L/dt dari sumber Mata Air, 1.240 L/dt Air Tanah dan 634 L/dt Air Permukaan. Kapasitas Mata Air tertinggi berada di Kabupaten Karangasem 7.582 L/dt sementara di Kota Denpasar tidak ada pengelolaan Mata Air. Kapasitas air tanah tertinggi berada di Kabupaten Gianyar 348 L/dt sementara di Kabupaten Tabanan dan Bangli tidak ada pengelolaan dari sumber-sumber air tanah. Pengelolaan air permukaan dengan kapasitas tertinggi berada di Kota Denpasar 300 L/dt, sementara di Kabupaten : Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng



tidak ada pengelolaan air permukaan. Rata-rata pemakaian air di perkotaan 123,21 liter per orang per hari.

Pelayanan air bersih perdesaan dengan sistem perpipaan sampai saat ini melayani 68,72% penduduk perdesaan. Tingkat pelayanan tertinggi berada di Kabupaten Gianyar 95,96% dan terendah di Kabupaten Jembrana 35,42%. Kapasitas sumber yang dikelola 4.666,08 L/dt, sedangkan kapasitas produksi 2.554,96 L/dt. Kapasitas sumber tertinggi berada di Kabupaten Badung 1.017,50 L/dt, dan terendah berada di Kabupaten Jembarana 70,98 L/dt. Rata-rata pemakaian air di perdesaan 106,24 liter per orang per hari.

Untuk meningkatkan cakupan layanan air bersih perkotaan dan perdesaan pada tahun 2013 telah dilaksanakan pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Petanu sebesar 300 lt/dt untuk melayani kebutuhan air bersih di Kota Denpasar, Kab. Badung dan Gianyar, serta pembangunan SPAM Penet sebesar 300lt/dt untuk melayani kebutuhan air bersih di Kota Denpasar dan Kab. Badung. Sedangkan untuk meningkatkan cakupan pelayanan air bersih perdesaan telah dilaksanakan pembangunan dan pengembangan sistem penyediaan air minum perdesaan, antara lain pengembangan sistem air minum Telagawaja di Kab. Karangasem, Pengembangan SPAM Guyangan Nusa Penida serta bantuan biaya operasional sistem air minum Kintamani, Kab. Bangli.

Untuk pengelolaan limbah cair rumah tangga umumnya dibuang dengan pembuatan septic-tank pada masing-masing rumah, sedangkan untuk pembuangan limbah pada saat tertentu atau pada saat pengurasan di buang ke tempat pembuangan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) yang ada pada masing-masing kabupaten/kota kecuali Gianyar. Kapasitas IPLT masih sangat terbatas, belum mampu memenuhi kebutuhan pengelolaan limbah untuk rumah-sakit, hotel dan restoran. Disamping pembuatan septic-tank juga membuat sistem pengelolaan limbah seperti lagoon di Nusa Dua dan DSDP. Sedangkan untuk pengelolaan air hujan telah dibuat saluran drainase dan perbaikan alur pembuangan utama (sungai). Hampir setiap kota dan kabupaten telah memiliki Master-Plan Drainase Kota.



Pengelolaan persampahan umumnya dilaksanakan dengan pembuangan ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) secara open dumping. Saat ini 7 kabupaten/kota memiliki TPA, peralatan dan personil, walaupun masih terbatas. Produksi sampah di daerah Bali relatif besar, apalagi pada saat-saat adanya kegiatan upacara. Pengelolaan sampah disamping oleh pemerintah juga dilakukan oleh swasta dan masyarakat, karena pelayanan pengelolaan sampah dari pemerintah umumnya masih sangat terbatas. Pembuangan sampah oleh masyarakat belum dilakukan pemisahan seperti sampah organik, sampah kertas, plastik dan botol/kaleng-kaleng. Hal ini terlihat pada setiap tempat pembuangan sementara (TPS), depo atau tempat penimbunan lainnya. Banyak tenaga kerja pemulung mengais sampah-sampah yang masih bermanfaat untuk tujuan daur ulang dengan jalan dijual kepada pengusaha/pengumpul.

Volume sampah yang ditangani di masing-masing kabupaten/kota, jumlah keseluruhannya mencapai 4.898 m³/hari. Produksi sampah yang tertinggi berada di Kota Denpasar 1.904 m³/hari, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Bangli 90 m³/hari. Sarana pengumpulan sampah yang tersedia sampai saat ini berupa gerobak sampah 494 buah, sarana pemindahan berupa TPS sebanyak 565 buah, transfer depo sebanyak 51 buah, dan kontainer sebanyak 179 buah. Sarana pengangkutan berupa truck sampah 84 buah, dum truck 119 buah, arm roll truck 41 buah, dan compactor 8 buah. Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPA) tersedia di masing-masing kabupaten/kota dengan luas keseluruhan 48,66 ha. Sistem pengolahan sampah di TPA dengan sistem sanitary landfill dan open dumping. Peralatan di TPA tersedia berupa bulldoser 11 buah, backhoe 1 buah, loader 6 buah, shover 2 buah, dan excavator 5 buah.

Terkait dengan keberadaan pantai yang di daerah Bali mempunyai arti penting karena memiliki berbagai fungsi seperti tempat kegiatan keagamaan, pariwisata, permukiman nelayan, pelabuhan dan lain-lain, berdasarkan citra satelit 2009, panjang pantai di Bali 437,70 km yang mengalami erosi sepanjang 181,70 km dan yang sudah dapat ditangani s/d 2013 sepanjang 94 km. Penanganan pantai dilaksanakan oleh pusat melalui BWS Bali – Denpasar dan provinsi serta diharapkan oleh Kabupaten / Kota.

4. Perumahan

Jumlah rumah di Provinsi Bali pada tahun 2013 mencapai 804.523 unit, dimana distribusi terbesar berada di Kabupaten Buleleng dan terkecil berada di Kabupaten Klungkung. Ditinjau dari tipe bangunan, sebagian besar yakni 69,56% merupakan bangunan permanen, semi permanen 21,65% dan 8,79% merupakan bangunan non permanen. Konsentrasi bangunan permanen berada di Kota Denpasar sementara bangunan rumah non permanen terkonsentrasi di Kabupaten Buleleng dan Tabanan.

Untuk meningkatkan ketersediaan rumah layak huni bagi masyarakat kurang mampu, Pemerintah Provinsi Bali telah mencanangkan program bedah rumah. Program bedah rumah ini juga menyertakan keterlibatan dari LSM dan peran serta pihak swasta dalam wujud CSR. Sampai dengan akhir tahun 2014 Pemerintah Provinsi Bali telah merealisasikan bedah rumah sebanyak 7.584 unit.

Tabel 2.11
Realisasi Bedah Rumah oleh Pemerintah Provinsi Bali
Di Masing-Masing Kabupaten/Kota Tahun 2009 – 2014

| No | Kab/Kota | REALISASI (UNIT) | | | | | TOTAL S/D 2014 |
|----|------------|------------------|------|------|------|------|----------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |
| 1 | Karangasem | 202 | 304 | 140 | 256 | 231 | 1133 |
| 2 | Buleleng | 244 | 371 | 733 | 558 | 530 | 2436 |
| 3 | Bangli | 159 | 163 | 141 | 132 | 154 | 749 |
| 4 | Gianyar | 40 | 193 | 195 | 167 | 125 | 720 |
| 5 | Tabanan | 40 | 197 | 255 | 208 | 198 | 898 |
| 6 | Klungkung | 116 | 180 | 179 | 118 | 110 | 703 |
| 7 | Jembrana | 24 | 177 | 161 | 161 | 162 | 685 |
| 8 | Denpasar | - | 18 | 15 | 6 | 0 | 39 |
| 9 | Badung | - | 33 | 98 | 63 | 27 | 221 |
| | Jumlah | 825 | 1636 | 1917 | 1669 | 1537 | 7584 |

5. Penataan Ruang

Provinsi Bali merupakan satu kesatuan ruang, mencakup ruang daratan, laut, dan udara, dengan cakupan luas ruang daratan kurang lebih 5.636,66 KM², sebagai satu kesatuan ekosistem pulau kecil. Dalam konteks nasional, Provinsi Bali merupakan sebuah pulau kecil yang tidak memiliki sumber daya alam yang melimpah, namun memiliki keunggulan komparatif dari segi keunikan budaya dan keindahan alam, yang merupakan modal dasar bagi Bali dalam menyelenggarakan pembangunan wilayahnya.



Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah Provinsi Bali yang berkualitas, aman, nyaman, produktif, berjatidiri, berbudaya Bali, berwawasan lingkungan dan berlandaskan **Tri Hita Karana** dengan: (1) terwujudnya keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, (2) terwujudnya keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, (3) terwujudnya keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan dan budaya Bali akibat pemanfaatan ruang, (4) terwujudnya pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, (5) terwujudnya keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah kabupaten/kota dan kegiatan antarsektor, selain itu adalah terwujudnya pemanfaatan ruang yang tanggap terhadap mitigasi dan adaptasi bencana.

Capaian kinerja pemerintahan di bidang penataan ruang terlihat antara lain; dengan telah ditetapkan Perda Nomor 16 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029, sampai tahun 2013 telah tersusun sebanyak 18 (delapan belas) dokumen materi teknis rencana tata ruang kawasan strategis provinsi dan rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi Bali.

Untuk mewujudkan tertib ruang pada masing-masing wilayah kabupaten/kota semua pemerintah kabupaten/kota se-Bali telah menetapkan peraturan daerah tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota dan beberapa kabupaten/kota tahun 2014 telah melakukan tahapan proses legalisasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kawasan perkotaan sebagai dasar dan pedoman pemberian perizinan.

Capaian lain dari kinerja pemerintahan di bidang penataan ruang adalah Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB pada Tahun 2013 adalah sebesar 5,29%. Untuk rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan pada Tahun 2013 adalah sebesar 1,57%. Sedangkan ruang publik yang berubah peruntukannya

pada Tahun 2013 adalah sebesar 16%. Keterangan lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.12
Capaian Kinerja Bidang Tata Ruang dan Perumahan

| NO | INDIKATOR | CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN | | | | |
|----|---|------------------------------|------|------|-------|------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Rasio rumah terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB | - | - | - | 5,29% | - |
| 2 | Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan | - | - | - | 1,57% | - |
| 3 | Ruang publik yang berubah peruntukannya | - | - | - | 16% | - |

Sumber : Dinas PU Provinsi Bali

6. Perencanaan Pembangunan

Urusan Perencanaan Pembangunan sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan pemerintahannya diwajibkan menyusun perencanaan pembangunan. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diartikan sebagai satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah. Dalam menyusun perencanaan pembangunan, Pemerintah Daerah Provinsi Bali memadukan pendekatan teknokratis, demokratis, partisipatif, politis, bottom up dan top down process untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang visioner dan implementatif

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam waktu tertentu yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah sesuai dinamika perkembangan daerah. Dalam perumusan perencanaan pembangunan dilaksanakan



secara transparan, responsive,efisien, efektif, akuntabel, partisipatif terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Rencana Pembangunan Daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah SKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Pembangunan Tahunan SKPD. Dokumen RPJP Provinsi Bali untuk periode 2005-2025 adalah RPJP Provinsi Bali Tahun 2005-2025 yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 Pelaksanaan RPJP Provinsi Bali telah berlangsung selama dua periode waktu RPJMD dan saat ini memasuki tahap kedua, yang berarti saat ini merupakan proses awal pelaksanaan RPJP Provinsi Bali. Dokumen RPJMD Provinsi Bali yang digunakan sebagai perencanaan pembangunan untuk periode 2013-2018 adalah RPJMD Provinsi Bali yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014. RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat penjabaran visi, misi, dan program Gubernur untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJPN dan RPJMN. Adapun dokumen perencanaan yang dimiliki sebagaimana tersaji dalam tabel dibawah ini.

Tabel 2.13
Dokumen Perencanaan Pembangunan Tahun 2010-2014

| No | Uraian Kegiatan | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1. | Dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan Perda. | ada | ada | ada | ada | ada |
| 2. | Dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada. | ada | ada | ada | ada | ada |
| 3. | Dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada | ada | ada | ada | ada | ada |
| 4. | Program RPJMD kedalam RKPD (%) | | | | | |
| 5. | Dokumen KUA Dokumen PPAS | ada | ada | ada | ada | ada |



7. Perhubungan

Jalan merupakan sarana vital dalam mendukung perkembangan suatu wilayah. Kemudahan akses yang ditimbulkan oleh ketersediaan jalan secara otomatis akan memberi dampak positif bagi kelangsungan transaksi perekonomian. Panjang jalan di Provinsi Bali pada tahun 2013 mencapai 7.843,98 km, meliputi jalan nasional 535,23 km, jalan provinsi 860,53 km, dan jalan kabupaten 6.448,22 km. Dilihat dari kondisi permukaan jalan, jalan dengan kondisi baik mencapai 4.091,47 km (52,16%), yang tergolong kondisi sedang mencapai 1.742,89 km (22,22%), dan kondisi rusak mencapai 2.009,66 km (25,62%).

Tabel 2.14
Panjang Jalan Di Provinsi Menurut
Menurut Kondisi Jalan Keadaan Akhir Tahun 2013

| <i>Kabupaten/Kota</i> <i>Regency/City</i> | <i>Status Jalan</i> <i>Road Status</i> | | | <i>Jumlah</i> <i>Total</i> | |
|--|---|---|---|---|--|
| | <i>Jalan Nasional</i> <i>National Roads (Km)</i> | <i>Jalan Provinsi</i> <i>Provincial Roads (Km)</i> | <i>Jalan Kabupaten</i> <i>Regency Roads (Km)</i> | <i>Panjang Jalan</i> <i>Length of Roads (Km)</i> | <i>Persentase</i> <i>Percentage (%)</i> |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Jembrana | 71.92 | 28.87 | 941.02 | 1 041.81 | 13.28 |
| 2. Tabanan | 65.38 | 130.78 | 860.95 | 1 057.11 | 13.48 |
| 3. Badung | 46.28 | 103.58 | 628.74 | 778.61 | 9.93 |
| 4. Gianyar | 40.66 | 111.11 | 555.54 | 707.31 | 9.02 |
| 5. Klungkung | 29.37 | 17.39 | 492.92 | 539.68 | 6.88 |
| 6. Bangli | 0 | 149.84 | 733.27 | 883.11 | 11.26 |
| 7. Karangasem | 62.80 | 170.22 | 794.49 | 1 027.51 | 13.10 |
| 8. Buleleng | 168.24 | 105.90 | 878.19 | 1 152.33 | 14.69 |
| 9. Denpasar | 50.58 | 42.84 | 563.10 | 656.52 | 8.37 |
| Jumlah / Total : | 535.23 | 860.53 | 6 448.22 | 7 843.98 | 100.00 |
| 2012 | 535.23 | 860.53 | 6 170.23 | 7 565.99 | 100.00 |
| 2011 | 535.23 | 860.53 | 6 108.39 | 7 504.15 | 100.00 |
| 2010 | 535.23 | 860.53 | 5 981.66 | 7 377.42 | 100.00 |
| 2009 | 501.64 | 883.07 | 5 965.73 | 7 350.44 | 100.00 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014



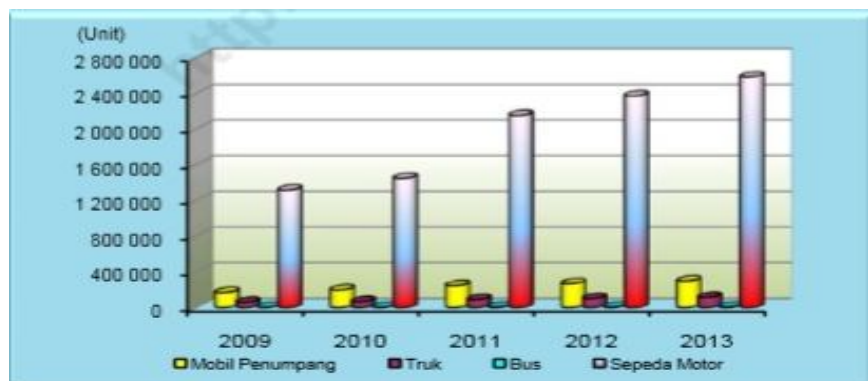
Tabel 2.15
Panjang Jalan Di Provinsi Menurut
Menurut Kondisi Jalan Keadaan Akhir Tahun 2013

| Status Jalan Road Status | Kondisi Condition | | | | Jumlah Total |
|--------------------------------------|----------------------|----------------|----------------------|-------------------------------------|-----------------|
| | B a i k Good | Sedang Fair | R u s a k Damaged | Rusak Berat Seriously Damaged | |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Jalan Nasional National Road | 491.13 | 36.70 | 4.10 | 3.30 | 535.23 |
| 2. Jalan Provinsi Provincial Road | 366.48 | 317.89 | 176.16 | 0 | 860.53 |
| 3. Jalan Kabupaten Regency Road | 3 233.86 | 1 388.30 | 1 293.72 | 532.38 | 6 448.25 |
| Jumlah / Total : | 4 091.47 | 1 742.89 | 1 473.98 | 535.68 | 7 844.02 |
| 2012 | 3 360.75 | 2 012.51 | 1 654.92 | 537.82 | 7 565.99 |
| 2011 | 3 195.17 | 2 152.04 | 1 723.77 | 433.17 | 7 504.14 |
| 2010* | 722.90 | 391.52 | 281.34 | 0 | 1 395.76 |
| 2009* | 768.24 | 426.33 | 190.14 | 0 | 1 384.71 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Sedangkan untuk jembatan, sampai dengan tahun 2013 terdapat sebanyak 342 jembatan dengan panjang bentang 9.029 meter, terdiri dari jembatan nasional sebanyak 234 buah dengan panjang bentang 6.180,80 meter, jembatan provinsi sebanyak 108 buah dengan panjang bentang 2.848,20 meter dan jembatan kabupaten sebanyak 467 buah dengan panjang bentang 6.387,64 meter.

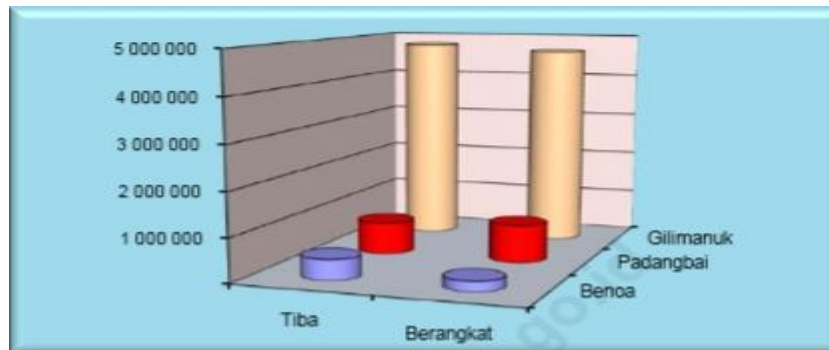
Ketersediaan jalan dan jembatan, tentunya harus didukung pula oleh ketersediaan angkutan. Seperti daerah lain di Indonesia, ketersediaan angkutan darat di Bali terus menunjukkan peningkatan seiring perputaran roda perekonomian. Jumlah kendaraan bermotor tahun 2013 mencapai 3.003.688 unit meliputi mobil penumpang 296.403 unit, mobil barang 113.937 unit, bis 6.533 unit, dan sepeda motor 2.586.715 unit. Dibanding tahun sebelumnya, jumlah kendaraan bermotor tercatat meningkat sebanyak 9,26 persen.



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.30
Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenisnya di Bali
Tahun 2009 - 2013

Untuk lalu lintas angkutan laut, jumlah penumpang yang tiba dan berangkat melalui tiga pelabuhan yaitu pelabuhan Padangbai, Gilimanuk, dan Benoa selama tahun 2013 mencapai 6.003.997 dan 5.769.331 orang. Sementara jumlah volume barang yang tiba dan diberangkatkan di keempat pelabuhan (Benoa, Padangbai, Celukan Bawang, dan Gilimanuk) masing-masing sebesar 8.290.878 ton dan 2.698.798 ton. Dari keempat pelabuhan, bongkar dan muat barang paling banyak terjadi di pelabuhan Gilimanuk.



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.31
Banyaknya Penumpang Tiba dan Berangkat Menurut Pelabuhan di Bali Tahun 2013

Sementara untuk angkutan udara selain dominan dalam melaksanakan mobilitas manusia dari suatu tempat ke tempat lain, juga merupakan salah satu sektor yang terkait langsung dengan dunia pariwisata dalam mendukung perjalanan wisatawan ke suatu tempat.

Berdasarkan data statistik yang dihimpun Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV, dijelaskan bahwa selama tahun 2013 arus keberangkatan pesawat udara mencapai 62.308 kali penerbangan, meningkat 9,97 persen dari tahun sebelumnya. Demikian pula dengan kedatangan yang mencapai 62.259 kali penerbangan atau naik 9,84 persen dibanding tahun sebelumnya. Untuk tahun 2013, arus penerbangan paling padat (baik kedatangan maupun keberangkatan) terjadi pada bulan Agustus dan Desember. Hal ini dapat dipahami mengingat pada bulan-bulan tersebut merupakan high season kedatangan wisman. Sementara itu, jumlah penumpang yang berangkat dan datang tercatat masing-masing sebanyak 7.625.272 orang dan 7.789.797 orang. Pergerakan penumpang ini meningkat masing-masing 4,60 persen dan 11,58 persen dibandingkan tahun 2012 lalu.



Tabel 2.16
Banyaknya Pesawat Terbang, Penumpang yang Datang, dan Berangkat
dari/ke Bandara Ngurah Rai Bali serta Transit
per Bulan Tahun 2013

| Bulan Month | Banyaknya Pesawat Terbang Number of Flights | | | Banyaknya Penumpang Number of Passengers | | |
|--------------------------|---|--------------------|-----------------------------------|---|--------------------|---------------------|
| | Berangkat Departures | Datang Arrivals | Sekitar Bali Around Bali | Berangkat Departures | Datang Arrivals | Transit Transits |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Januari / January | 5 205 | 5 199 | - | 592 049 | 555 231 | 18 640 |
| 2. Pebruari / February | 4 455 | 4 452 | - | 521 746 | 539 999 | 9 930 |
| 3. Maret / March | 4 940 | 4 937 | - | 567 763 | 600 102 | 10 980 |
| 4. April / April | 4 800 | 4 772 | - | 570 254 | 576 933 | 11 954 |
| 5. Mei / May | 5 128 | 5 133 | - | 617 201 | 626 097 | 10 683 |
| 6. Juni / June | 5 230 | 5 221 | - | 678 833 | 715 781 | 13 924 |
| 7. Juli / July | 5 051 | 5 050 | - | 650 329 | 666 262 | 12 707 |
| 8. Agustus / August | 5 590 | 5 586 | - | 721 502 | 735 341 | 19 325 |
| 9. September / September | 5 382 | 5 384 | - | 691 678 | 702 948 | 12 852 |
| 10. Oktober / October | 5 251 | 5 244 | - | 659 587 | 653 375 | 10 046 |
| 11. Nopember / November | 5 410 | 5 412 | - | 657 796 | 654 428 | 2 013 |
| 12. Desember / December | 5 866 | 5 869 | - | 696 534 | 763 300 | 730 |
| Jumlah / Total : | 62 308 | 62 259 | - | 7 625 272 | 7 789 797 | 133 784 |
| 2012 | 56 656 | 56 681 | 227 | 7 289 782 | 6 981 101 | 163 505 |
| 2011 | 51 811 | 51 694 | 422 | 6 307 201 | 6 296 650 | 143 804 |
| 2010 | 42 190 | 42 109 | 707 | 5 519 392 | 5 492 085 | 117 955 |
| 2009 | 38 031 | 38 001 | 766 | 4 717 250 | 4 773 780 | 134 403 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

8. Lingkungan Hidup

Bali merupakan satu kesatuan ekosistem yang unik, mempunyai daya dukung dan daya tampung lingkungan sangat terbatas. Dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup di Bali pengelolaan lingkungan dilaksanakan dengan menerapkan falsafah *Tri Hita Karana* yaitu dengan kearifan lokal masyarakat menjaga keharmonisan hubungan manusia dengan alam lingkungannya.

Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas pembangunan terutama pada sektor pariwisata di Provinsi Bali juga menimbulkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lingkungan hidup. Penurunan jumlah lahan pertanian produktif dan ketiadaan perlindungan terhadap sektor pertanian menjadi pendorong semakin maraknya alih fungsi lahan produktif serta menurunnya kualitas dan kuantitas kawasan hutan, danau, daerah resapan maupun daerah-daerah aliran sungai sehingga menurunkan ketersediaan air.

Pencemaran status mutu air sungai di Tahun 2010 adalah sebesar 54,88% dan Tahun 2011 adalah sebesar 51,22%, sedangkan pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 adalah sebesar 100%. Pengawasan terhadap pelaksanaan amdal cakupannya dari Tahun

2010 sampai dengan Tahun 2012 adalah sebesar 100%, untuk Tahun 2013 dan Tahun 2014 adalah masing-masing sebesar 90,48% dan 106%. Kasus penegakan hukum lingkungan untuk Tahun 2010 dan 2011 adalah masing-masing sebesar 93,75% dan 88%, sedangkan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 sebesar 100%. Data terkait hal diatas dapat dilihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.17
Capaian Kinerja Bidang Urusan Lingkungan Hidup

| NO | INDIKATOR | CAPAIAN KINERJA SETIAP TAHUN | | | | |
|----|---|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| A | Bidang Urusan Lingkungan Hidup | | | | | |
| | 1 Pencemaran status mutu air sungai utama (%) | $45 : 82 \times 100 = 54,88$ | $42 : 82 \times 100 = 51,22$ | $105 : 105 \times 100 = 100$ | $364 : 364 \times 100 = 100$ | $252 : 252 \times 100 = 100$ |
| | 2 Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%) | $38 : 38 \times 100 = 100$ | $30 : 30 \times 100 = 100$ | $65 : 65 \times 100 = 100$ | $38 : 42 \times 100 = 90,48$ | $53 : 50 \times 100 = 106$ |
| | 3 Penegakan Hukum Lingkungan (%) | $15 : 16 \times 100 = 93,75$ | $22 : 25 \times 100 = 88$ | $12 : 12 \times 100 = 100$ | $33 : 33 \times 100 = 100$ | $8 : 8 \times 100 = 100$ |
| | | | | | | |

Sumber : Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bali Tahun 2015

9. Pertanian

Sesuai data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Bali, seperti tercermin pada penerbitan sertifikat, yaitu sertifikat hak milik, hak guna bangunan dan hak pakai selama tahun 2013 mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Penerbitan sertifikat hak milik mengalami penurunan 44,97 persen dari 131.138 buah di tahun 2012 menjadi 72.159 buah di tahun 2013. Penerbitan sertifikat hak guna bangunan mengalami penurunan menjadi 1.967 buah di tahun 2013, sementara penerbitan sertifikat hak pakai mengalami kenaikan sebesar 44,84 persen.

Tabel 2.18
Penerbitan Sertifikat Di Kantor Wilayah BPN Provinsi Bali Tahun 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | Hak Milik Ownership | Hak Guna Bangunan Right for Building Usage | Hak Guna Usaha Right for Business Usage | Hak Pakai Use Right |
|--------------------------------|------------------------|--|---|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 Jembrana | 3 832 | 9 | 0 | 6 |
| 2 Tabanan | 11 596 | 60 | 0 | 38 |
| 3 Badung | 13 487 | 1 240 | 0 | 187 |
| 4 Gianyar | 9 597 | 185 | 0 | 30 |
| 5 Klungkung | 4 077 | 11 | 0 | 3 |
| 6 Bangli | 1 609 | 4 | 0 | 0 |
| 7 Karangasem | 5 373 | 93 | 0 | 29 |
| 8 Buleleng | 14 902 | 66 | 0 | 38 |
| 9 Denpasar | 7 686 | 299 | 0 | 76 |
| Jumlah / Total : | 72 159 | 1 967 | 0 | 407 |
| 2012 | 131 138 | 2 916 | 1 | 281 |
| 2011 | 125 627 | 2 967 | 0 | 273 |
| 2010 | 116 139 | 2 640 | 0 | 143 |
| 2009 | 96 776 | 1 791 | 8 | 250 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Khusus terkait dengan kondisi tanah aset yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Bali sampai tahun 2013, dari **406** bidang tanah dengan total luas 19.418.311,00 m² baru sebanyak **4.297** bidang yang bersertifikat dengan total 1.276.652,00 m².

10. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Program KB merupakan suatu usaha langsung yang ditujukan untuk mengurangi tingkat kelahiran terutama melalui program penggunaan alat kontrasepsi secara konsisten dan berkesinambungan. Disamping juga bertujuan membangun keluarga kecil yang bahagia dan sejahtera dalam rangka usaha pembinaan dan peningkatan mutu fisik SDM. Realisasi jumlah akseptor baru KB pada tahun 2013 mencapai 75.863 peserta dari 685.324 pasangan usia subur (PUS). Jumlah akseptor baru KB ini mengalami penurunan 2,32 persen dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 77.665 peserta dari 678.885 PUS. Jumlah akseptor baru KB pada tahun 2013 ini telah mencapai 120,13 persen atau melewati target yang ingin dicapai sebanyak 63.150 peserta.



Tabel 2.19
Pencapaian Target Akseptor Baru KB Menurut Kabupaten/Kota
Di Provinsi Bali Tahun 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | Target Target | Jumlah Peserta KB Baru New Acceptors | % Peserta KB Baru Terhadap Target % of New Acceptors to Target |
|--------------------------------|------------------|--|--|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Jembrana | 4 148 | 5 467 | 131.80 |
| 2. Tabanan | 7 416 | 7 299 | 98.42 |
| 3. Badung | 7 029 | 8 301 | 118.09 |
| 4. Gianyar | 7 258 | 7 888 | 108.68 |
| 5. Klungkung | 1 988 | 2 398 | 120.65 |
| 6. Bangli | 3 227 | 3 563 | 110.40 |
| 7. Karangasem | 7 943 | 9 154 | 115.25 |
| 8. Buleleng | 12 405 | 15 538 | 125.26 |
| 9. Denpasar | 11 736 | 16 255 | 138.51 |
| Jumlah / Total : | 63 150 | 75 863 | 120.13 |
| 2012 | 61 880 | 77 665 | 125.51 |
| 2011 | 52 970 | 79 076 | 149.28 |
| 2010 | 61 126 | 71 070 | 116.27 |
| 2009 | 54 384 | 63 713 | 117.15 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Lebih jauh jika ditinjau dari cara pemakaian alat/metode kontrasepsi, dapat disimak pada Tabel 4.2.4. Dari kupasan tabel tersebut, metode kontrasepsi yang paling digemari oleh akseptor baru KB di Bali selama tahun 2013 adalah metode suntikan dan IUD yang masing-masing mencapai 42,83 persen dan 30,89 persen dari keseluruhan peserta KB. Selebihnya memakai metode kontrasepsi jenis pil (9,58%), kondom (7,18%), implan (5,08%), MOW (4,02%), dan MOP yang hanya 0,41 persen.

Tabel 2.20
Akseptor Baru KB Menurut Metode Kontrasepsi
di Provinsi Bali Tahun 2013

| Tahun Year | Peserta KB Baru Menurut Metode Kontrasepsi The New Acceptors by Contraception | | | | | | | | Jumlah Total |
|---------------|--|---------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|
| | IUD IUD | Pil Tablet | Kon- dom Con- dom | Obat Vaginal Medicine | MOP Vasec- tomy | MOW Tubec- tomy | Suntikan Injection | Implan Implant | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
| 2003 | 22.72 | 15.18 | 2.87 | 0 | 0.11 | 4.42 | 52.80 | 1.90 | 100.00 |
| 2004 | 22.49 | 12.91 | 1.63 | 0 | 0.02 | 2.17 | 59.94 | 0.84 | 100.00 |
| 2005 | 21.04 | 14.73 | 2.06 | 0 | 0.03 | 1.73 | 58.92 | 1.49 | 100.00 |
| 2006 | 20.03 | 13.69 | 2.11 | 0 | 0.06 | 1.98 | 60.66 | 1.47 | 100.00 |
| 2007 | 20.26 | 12.88 | 2.54 | 0 | 0.08 | 2.14 | 60.44 | 1.66 | 100.00 |
| 2008 | 19.25 | 12.63 | 3.20 | 0 | 0.20 | 2.04 | 60.41 | 2.27 | 100.00 |
| 2009 | 19.73 | 12.66 | 8.37 | 0 | 0.33 | 2.69 | 53.38 | 2.84 | 100.00 |
| 2010 | 24.85 | 10.94 | 8.44 | 0 | 0.39 | 3.03 | 48.67 | 3.69 | 100.00 |
| 2011 | 28.62 | 9.77 | 9.23 | 0 | 0.40 | 3.05 | 45.13 | 3.80 | 100.00 |
| 2012 | 28.95 | 9.48 | 8.73 | 0 | 0.48 | 3.72 | 44.99 | 3.65 | 100.00 |
| 2013 | 30.89 | 9.58 | 7.18 | 0 | 0.41 | 4.02 | 42.83 | 5.08 | 100.00 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

11. Ketenagakerjaan

Jenis pekerjaan/jabatan dapat dikelompokkan menjadi tiga, pertama pekerja terampil meliputi tenaga profesional, teknisi, dan tenaga lain, tenaga kepemimpinan dan ketatalaksanaan, serta pejabat pelaksana dan tenaga tata usaha ,kedua, pekerja setengah terampil meliputi tenaga usaha penjualan dan jasa dan ketiga, pekerja tidak terampil meliputi tenaga usaha pertanian, tenaga produksi, dan pekerja kasar.

Dari hasil Sakernas 2013, sebagaimana terlihat pada tabel 2.20, penduduk yang bekerja di Bali lebih dominan pada jenis pekerjaan tenaga usaha pertanian, tenaga produksi, dan pekerja kasar (pekerja tidak terampil). Jumlahnya mencapai 1.264.320 orang (55,60%). Mayoritas (59,98%) pekerja tidak terampil ini berjenis kelamin laki-laki, dan 40,02 persen adalah perempuan. Sedangkan jenis pekerjaan tenaga profesional, kepemimpinan dan tata usaha (pekerja terampil) hanya berjumlah 402.253 orang (17,69%), terdiri dari pekerja laki-laki (58,21%) dan perempuan (41,79%). Sementara itu, pekerja setengah terampil seperti tenaga usaha penjualan dan jasa sebanyak 580.638 orang (25,53%). Khusus pada jenis pekerjaan ini ternyata lebih didominasi kaum perempuan (58,13%) dan laki-laki (41,87%), serta jenis pekerjaan lainnya menyerap sebanyak 26.686 orang (1,17%).

Tabel 2.21
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan/Jabatan Dalam Pekerjaan Utama Tahun 2013

| Jenis Pekerjaan/Jabatan <i>Main Occupation</i> | Laki-laki <i>Male</i> | Perempuan <i>Female</i> | Jumlah <i>Total</i> |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Tenaga Profesional, Teknisi, dan Tenaga Lain ybdi / <i>Professional, Technical, and Related Workers</i> | 101 591 | 67 420 | 169 011 |
| 2. Tenaga Kepemimpinan dan Ketatalaksanaan <i>Administrative and Managerial Workers</i> | 37 021 | 10 156 | 47 177 |
| 3. Pejabat Pelaksana, Tenaga Tata Usaha, dan Tenaga ybdi / <i>Clerical and Related Workers</i> | 95 532 | 90 533 | 186 065 |
| 4. Tenaga Usaha Penjualan / <i>Sales Workers</i> | 147 065 | 253 356 | 400 421 |
| 5. Tenaga Usaha Jasa / <i>Services Workers</i> | 96 067 | 84 150 | 180 217 |
| 6. Tenaga Usaha Pertanian, Kehutanan, Perburuan, dan Perikanan / <i>Agriculture, Animal Husbandry, Forestry Workers, Fishermen, and Hunters</i> | 273 006 | 260 970 | 533 976 |
| 7. Tenaga Produksi, Operator Alat-alat Angkutan, dan Pekerja Kasar / <i>Production and Related Workers, Transport Equipment Operators, and Laborers</i> | 485 345 | 244 999 | 730 344 |
| 8. Lainnya <i>Others</i> | 24 218 | 2 468 | 26 686 |
| Jumlah / Total : | 1 259 845 | 1 014 052 | 2 273 897 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Hal menarik lagi, kalau dilihat jumlah penduduk yang bekerja dihubungkan dengan tingkat pendidikan yang ditamatkan, ternyata sebanyak 730.023 orang (32,10%) pekerja berlatar pendidikan SLTA (SMU dan SMK). Hanya 322.455 orang (14,18%) yang berpendidikan perguruan tinggi setingkat diploma, akademi, S1, S2, dan S3.

Tabel 2.22
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan Tahun 2013

| Tingkat Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan <i>Educational Attainment</i> | Laki-laki <i>Male</i> | Perempuan <i>Female</i> | Jumlah <i>Total</i> |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Tidak/Belum Pernah Sekolah <i>No Schooling</i> | 50 006 | 99 951 | 149 957 |
| 2. Tidak/Belum Tamat SD <i>Did Not Complete / Not Yet Completed Primary School</i> | 123 433 | 129 711 | 253 144 |
| 3. Sekolah Dasar <i>Primary School</i> | 232 185 | 245 447 | 477 632 |
| 4. SLTP Umum <i>General Junior High School</i> | 191 012 | 133 418 | 324 430 |
| 5. SLTP Kejuruan <i>Vocational Junior High School</i> | 9 456 | 6 800 | 16 256 |
| 6. SMU <i>General Senior High School</i> | 287 140 | 177 669 | 464 809 |
| 7. SMK <i>Vocational Senior High School</i> | 165 426 | 99 788 | 265 214 |
| 8. Diploma I/II <i>Diploma I/II</i> | 44 307 | 23 066 | 67 373 |
| 9. Akademi / D III <i>Academy/Diploma III</i> | 25 486 | 20 452 | 45 938 |
| 10. S1 / D IV <i>Graduate / Diploma IV</i> | 114 632 | 72 082 | 186 714 |
| 11. Program S2 / S3 <i>Post Graduate / Doctoral</i> | 16 762 | 5 668 | 22 430 |
| Jumlah / Total : | 1 259 845 | 1 014 052 | 2 273 897 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Dalam konteks lain, jumlah penduduk yang bekerja paling besar tersegmentasi pada kelompok usia 30-34 tahun, yakni sebanyak 342.511 orang (15,06%) terdiri dari pekerja laki-laki (57,60%) dan perempuan (42,40%). Sebaliknya, penduduk yang bekerja pada kelompok umur 15-19 tahun menyerap tenaga kerja paling rendah, angkanya sebesar 99.011 orang (4,35%) dengan rincian laki-laki 48.764 orang (49,25%) dan perempuan 50.247 orang (50,75%).



Tabel 2.23
Penduduk 15 Tahun ke Atas yang Bekerja Menurut
Kelompok Umur Tahun 2013

| Kelompok Umur Age Group | Laki-laki Male | Perempuan Female | Jumlah Total |
|----------------------------|-------------------|---------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 15 - 19 | 48 764 | 50 247 | 99 011 |
| 20 - 24 | 105 679 | 84 168 | 189 847 |
| 25 - 29 | 147 082 | 115 061 | 262 143 |
| 30 - 34 | 197 287 | 145 224 | 342 511 |
| 35 - 39 | 161 448 | 130 190 | 291 638 |
| 40 - 44 | 182 277 | 141 640 | 323 917 |
| 45 - 49 | 118 166 | 107 141 | 225 307 |
| 50 - 54 | 106 580 | 82 720 | 189 300 |
| 55 - 59 | 67 593 | 58 107 | 125 700 |
| 60 + | 124 969 | 99 554 | 224 523 |
| Jumlah / Total : | 1 259 845 | 1 014 052 | 2 273 897 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

12. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Selain perbankan, koperasi juga merupakan urat nadi perekonomian di Indonesia. Jumlah koperasi yang ada di Provinsi Bali pada tahun 2013 mencapai 4.620 unit atau bertambah sebanyak 139 unit dibanding tahun sebelumnya. Dari total tersebut 91 unit diantaranya adalah Koperasi Unit Desa (KUD) dan 4.511 unit koperasi non KUD dengan jumlah anggota sebanyak 214.334 orang untuk KUD dan 644.480 orang untuk non KUD.

Tabel 2.24
Banyaknya Koperasi Unit Desa, Anggota, Nilai Simpanan, dan Volume
Usaha Menurut Tingkat Koperasi di Bali Tahun 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | Tingkat Koperasi Level of Cooperatives | KUD Village Unit Cooperatives | Anggota Members | Modal Sendiri Deposits by Its Modals (000 Rp) | Volume Usaha Turnover (000 Rp) |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------|--|--------------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Jembrana | a. Primer / Primary | 9 | 20 021 | 16 395 649 | 13 216 853 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tabanan | a. Primer / Primary | 18 | 34 904 | 31 530 000 | 80 094 000 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Badung | a. Primer / Primary | 11 | 16 501 | 8 043 532 | 48 740 173 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Gianyar | a. Primer / Primary | 12 | 28 766 | 9 746 848 | 41 609 739 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Klungkung | a. Primer / Primary | 7 | 17 771 | 5 014 078 | 8 372 358 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Bangli | a. Primer / Primary | 5 | 24 698 | 7 391 247 | 27 865 106 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Karangasem | a. Primer / Primary | 10 | 39 648 | 8 962 755 | 26 854 348 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Buleleng | a. Primer / Primary | 13 | 27 535 | 18 141 027 | 21 047 666 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Denpasar | a. Primer / Primary | 4 | 4 372 | 1 437 269 | 25 328 908 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Nivo Provinsi | a. Primer / Primary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b. Sekunder / Secondary | 2 | 118 | 12 628 947 | 17 405 587 |
| Jumlah / Total : | | 91 | 214 334 | 119 291 352 | 310 534 738 |
| 2012 | | 91 | 215 133 | 124 935 890 | 296 785 506 |
| 2011 | | 91 | 223 121 | 119 042 523 | 213 657 873 |
| 2010 | | 91 | 251 604 | 122 583 641 | 281 027 497 |
| 2009 | | 91 | 251 425 | 112 232 960 | 272 836 820 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014



Tabel 2.25
Banyaknya Koperasi Non KUD, Anggota, Nilai Simpanan,
Volume Usaha, dan Tingkat Koperasi Tahun 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | Tingkat Koperasi Level of Cooperatives | Non KUD Non Village Unit Cooperatives | Anggota Members | Modal Sendiri Deposits by Its Modals (000 Rp) | Volume Usaha Turnover (000 Rp) |
|--------------------------------|---|--|--------------------|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Jembrana | a. Primer / Primary | 213 | 36 674 | 139 612 261 | 134 572 869 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tabanan | a. Primer / Primary | 512 | 41 264 | 165 063 000 | 534 500 000 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Badung | a. Primer / Primary | 503 | 91 492 | 307 634 593 | 900 528 679 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Gianyar | a. Primer / Primary | 1 127 | 145 642 | 133 183 269 | 489 426 398 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Klungkung | a. Primer / Primary | 118 | 25 530 | 56 243 642 | 366 994 173 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Bangli | a. Primer / Primary | 255 | 37 817 | 48 788 300 | 273 391 518 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Karangasem | a. Primer / Primary | 294 | 37 388 | 61 964 653 | 232 551 825 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Buleleng | a. Primer / Primary | 364 | 38 670 | 131 560 118 | 267 246 513 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Denpasar | a. Primer / Primary | 1 010 | 120 939 | 230 675 910 | 1 142 351 832 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Nivo Provinsi | a. Primer / Primary | 115 | 69 064 | 157 307 691 | 757 919 502 |
| | b. Sekunder / Secondary | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah / Total : | | 4 511 | 644 480 | 1 432 033 437 | 5 099 483 309 |
| 2012 | | 4 423 | 628 125 | 1 325 557 006 | 4 880 471 131 |
| 2011 | | 4 261 | 612 392 | 1 267 378 962 | 5 107 804 392 |
| 2010 | | 4 058 | 640 688 | 1 436 089 522 | 6 426 304 403 |
| 2009 | | 3 598 | 608 203 | 1 077 682 150 | 3 755 718 960 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Bila dilihat dari tingkatan koperasi yang ada, sebanyak 4.620 unit merupakan koperasi primer, 32 unit merupakan koperasi pusat, dan satu unit merupakan koperasi gabungan. Volume usaha KUD pada tahun 2013 mencapai Rp 310,53 milyar dengan modal usaha sendiri sebesar Rp 119,29 milyar. Untuk non KUD, volume usaha mencapai Rp 5.099,48 miliar dengan modal usaha sendiri sebesar Rp 1.432,03 miliar.

Tabel 2.26
Banyaknya Koperasi Menurut Tingkat dan Kabupaten/Kota
Tahun 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | Koperasi Primer Primary Cooperatives | Koperasi Pusat Central Cooperatives | Gabungan Joint Cooperatives | Jumlah Total |
|--------------------------------|---|--|-----------------------------------|-----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. Jembrana | 241 | 0 | 0 | 241 |
| 2. Tabanan | 530 | 0 | 0 | 530 |
| 3. Badung | 514 | 0 | 0 | 514 |
| 4. Gianyar | 1 139 | 0 | 0 | 1 139 |
| 5. Klungkung | 125 | 0 | 0 | 125 |
| 6. Bangli | 260 | 0 | 0 | 260 |
| 7. Karangasem | 304 | 0 | 0 | 304 |
| 8. Buleleng | 377 | 0 | 0 | 377 |
| 9. Denpasar | 1 014 | 0 | 0 | 1 014 |
| 10. Nivo Provinsi | 116 | 0 | 0 | 116 |
| Jumlah / Total : | | 4 620 | 0 | 4 620 |
| 2012 | | 4 481 | 32 | 4 514 |
| 2011 | | 4 317 | 34 | 4 352 |
| 2010 | | 4 114 | 34 | 4 149 |
| 2009 | | 3 652 | 36 | 3 689 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014



13. Penanaman Modal

Untuk meningkatkan kinerja ekonomi Bali, terutama mendorong pertumbuhan sektor riil, peningkatan investasi mutlak diperlukan. Berdasarkan data Badan Penanaman Modal (BPM) dan Perizinan Provinsi Bali tahun 2013, realisasi investasi untuk PMDN dan PMA di Bali masingmasing mencapai Rp 7.793,11 miliar dan Rp 3.634,97 miliar.

Tabel 2.27
Perkembangan Penanaman Modal Dalam Negeri di Bali
Tahun 2004-2013

| Tahun Year | Investasi / Investment | | Tenaga Kerja / Employee | | | |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | Rencana Planning (Juta Rp) | Realisasi Realization (Juta Rp) | Indonesia Indonesian | | Asing Foreign | |
| | | | Rencana Planning | Realisasi Realization | Rencana Planning | Realisasi Realization |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2004 | 819 875 | 66 136 | 3 386 | 269 | 71 | 2 |
| 2005 | 3 245 188 | 46 467 | 823 | 1 128 | 5 | - |
| 2006 | 8 527 625 | 40 652 | 660 | 137 | - | - |
| 2007 | 665 877 | 15 652 | 1 025 | 261 | - | - |
| 2008 | 1 185 133 | 28 991 | 710 | 102 | - | - |
| 2009 | 10 655 866 | 50 839 | 12 746 | 267 | - | - |
| 2010 | 2 853 000 | 2 651 000 | 192 | 51 | 8 | - |
| 2011 | 7 294 000 | 7 314 000 | 2 439 | 2 439 | - | - |
| 2012 | 9 740 400 | 7 594 040 | 4 154 | 5 525 | - | - |
| 2013 | 5 148 151 | 7 793 114 | 18 038 | 18 200 | - | - |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.28
Perkembangan Penanaman Modal Asing di Bali
Tahun 2004-2013

| Tahun Year | Investasi / Investment | | Tenaga Kerja / Employee | | | |
|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------|--------------------------|
| | Rencana Planning (Juta Rp) | Realisasi Realization (Juta Rp) | Indonesia Indonesian | | Asing Foreign | |
| | | | Rencana Planning | Realisasi Realization | Rencana Planning | Realisasi Realization |
| (1) | (2) | (3) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 2004 | 3 397 474 | 952 118 | 7 098 | 2 390 | 307 | 8 |
| 2005 | 1 864 050 | 888 752 | 8 124 | 4 750 | 123 | 28 |
| 2006 | 2 069 650 | 900 490 | 9 622 | 2 951 | 29 | 2 |
| 2007 | 1 668 100 | 497 402 | 5 357 | 3 271 | 17 | 14 |
| 2008 | 9 075 110 | 735 069 | 9 175 | 2 946 | 331 | 8 |
| 2009 | 4 304 030 | 2 098 162 | 11 362 | 3 199 | 436 | 9 |
| 2010 | 2 503 800 | 4 210 161 | 1 766 | 1 837 | 71 | 0 |
| 2011 | 6 966 170 | 4 386 960 | 16 978 | 16 978 | 28 | 0 |
| 2012 | 7 435 090 | 4 478 770 | 3 534 | 3 534 | 3 | 0 |
| 2013 | 6 805 163 | 3 634 970 | 5 475 | 21 633 | 137 | 5 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014



Tabel 2.29
Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri di Bali Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2009 - 2013

| (juta rupiah / million rupiahs) | | | | | |
|-----------------------------------|---------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kabupaten/Kota Regency/City | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Jembrana | - | 67 183 | 239 990 | 103 631 | 80 267 |
| 2. Tabanan | - | 667 977 | 1 141 259 | 734 409 | 108 928 |
| 3. Badung | 28 300 | 2 868 | 1 743 362 | 3 098 820 | 3 126 279 |
| 4. Gianyar | - | 43 652 | 1 081 182 | 150 927 | 1 134 498 |
| 5. Klungkung | - | 260 037 | 178 342 | 53 487 | 23 954 |
| 6. Bangli | - | 31 818 | 26 058 | 31 479 | 21 252 |
| 7. Karangasem | - | 60 407 | 45 528 | 74 664 | 163 429 |
| 8. Buleleng | - | 266 716 | 109 615 | 393 575 | 201 727 |
| 9. Denpasar | 22 539 | 1 250 704 | 2 749 143 | 2 965 371 | 2 932 781 |
| Jumlah Bali / Total Bali : | 50 839 | 2 651 362 | 7 314 479 | 7 606 361 | 7 793 114 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.30
Realisasi Penanaman Modal Asing di Bali Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2009 - 2013

| (juta rupiah / million rupiahs) | | | | | |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Kabupaten/Kota Regency/City | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Jembrana | 22 092 | - | 10 829 | 1 860 | 1 395 |
| 2. Tabanan | 3 640 | 238 895 | 25 643 | 54 349 | 331 912 |
| 3. Badung | 1 968 457 | 2 626 328 | 1 430 453 | 4 081 991 | 3 021 220 |
| 4. Gianyar | 28 392 | 2 360 | 79 848 | 180 015 | 95 897 |
| 5. Klungkung | 1 365 | - | 1 001 | 1 853 | 4 937 |
| 6. Bangli | 2 275 | 1 556 | 2 093 | 140 | 140 |
| 7. Karangasem | 6 734 | 1 239 098 | 590 017 | 50 035 | 23 547 |
| 8. Buleleng | 6 370 | 17 019 | 2 058 869 | 70 829 | 60 483 |
| 9. Denpasar | 58 837 | 84 905 | 188 218 | 37 693 | 95 443 |
| Jumlah Bali / Total Bali : | 2 098 162 | 4 210 161 | 4 386 970 | 4 478 765 | 3 634 974 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

17. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

a. Kepegawaian

Pemerintah Provinsi Bali menyadari bahwa keberhasilan atau kegagalannya dalam mewujudkan visi dan misi yang telah dicanangkan sangat bergantung pada kinerja sumber daya aparatur yang menjadi penggerak roda pemerintahan. Salah satu indikator dalam meningkatkan kinerja PNS adalah dengan meningkatkan disiplin PNS serta mengembangkan sistem reward and punishment. Disiplin PNS ditegakkan antara lain dengan penggunaan mesin



presensi elektronik bagi seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Upaya peningkatan kinerja aparatur dimulai dari perencanaan, rekrutmen, peningkatan kompetensi, pengembangan pola karir, serta peningkatan kesejahteraan pegawai sehingga mewujudkan pegawai Pemerintah Provinsi Bali berkualitas, memiliki kompetensi dan motivasi yang tinggi untuk bekerja dan mampu mencukupi kebutuhan diri dan keluarganya secara layak.

Sampai dengan tahun 2014, jumlah pegawai pada Pemerintah Provinsi Bali tercatat sejumlah 7.046 orang yang tersebar di 43 SKPD dan 1 SKPKD yang ada di Provinsi Bali.

Tabel 2.31
Data Pegawai dari tahun 2010 s/d 2014

| No | Data Pegawai | 2010 | 2010 | 2012 | 2013 | 2014 |
|-----|----------------------------------|------|------|------|-------|------|
| 1. | Jumlah PNS | 6851 | 6991 | 7333 | 6.806 | |
| 2. | SK. Kenaikan pangkat | 3091 | 2700 | 2353 | 1.191 | |
| 3. | SK Pengangkatan CPNS | | | | | |
| | - Dari Umum | 46 | 148 | 33 | 43 | |
| | - Dari Tenaga Honorer | 267 | 258 | 206 | 0 | - |
| 4. | Rekrutmen calon Praja IPDN | 18 | 25 | 29 | 50 | 50 |
| 5. | Jumlah peserta Prajabatan | 454 | 313 | 406 | 275 | 276 |
| 6. | Jumlah PNS yang pensiun | 339 | 306 | 320 | 344 | 341 |
| 7.. | Jumlah Penerimaan Tenaga kontrak | 175 | 248 | 325 | 128 | |

Adapun tingkat pendidikan pegawai Pemerintah Provinsi Bali memiliki latar belakang pendidikan yang bervariasi dari tingkat SD hingga Doktor (S3) dengan data sebagai berikut :

Tabel 2.32
Tingkat Pendidikan
Pegawai Pemerintah Provinsi Bali

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|-----|--------------------|--------|
| 1. | SD | 93 |
| 2. | SMP/SLTP | 140 |
| 3. | SLTA | 2264 |
| 4. | Diploma | 448 |
| 5. | Sarjana (S1) | 2.727 |
| 6. | Master (S2) | 759 |
| 7. | Doktor (S3) | 2 |

Sumber : BKD Provinsi Bali

b. Polisi Pamong Praja

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ketentuan pasal 27 ayat (1) huruf c memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat dan pasal 148 ayat (1) untuk membantu Kepala Daerah dalam menegakkan Peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat dan pada ayat (2) menyebutkan tentang pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 86 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali.

Dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat telah dilaksanakan optimalisasi pelaksanaan tugas antara lain patroli wilayah, operasi gabungan, pengamanan dan pengawalan pimpinan serta melakukan pemantauan Upaya Perlindungan Masyarakat di seluruh wilayah kabupaten/kota se-Bali.

Sampai dengan tahun 2014 jumlah polisi pamong praja sebanyak 1.465 orang sehingga rasio jumlah polisi pamong praja per 10.000 penduduk baru hanya mencapai 3,70 persen. Meski demikian cakupan patrol petugas Satpol PP telah mencapai 1.000 kali dengan jumlah penyelesaian penegakan perda sebanyak 294 dari 470 kasus yang ada atau sebesar 62,55 persen. Sementara untuk jumlah limas di Provinsi Bali sebanyak 22.992 orang sehingga rasio limas per 10.000 penduduk adalah sebesar 58,10 persen.

c. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Pelayanan yang berkualitas merupakan kemampuan pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat yang dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dengan standar yang telah ditentukan. Kualitas pelayanan tercermin dari transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipatif, kesamaan hak dan keseimbangan hak dan kewajiban.



Bedasarkan hasil pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap 20 pelayanan publik Pemerintah Provinsi Bali yang tersebar di 9 (Sembilan) kabupaten/kota se- Bali didapatkan hasil sebagai berikut :

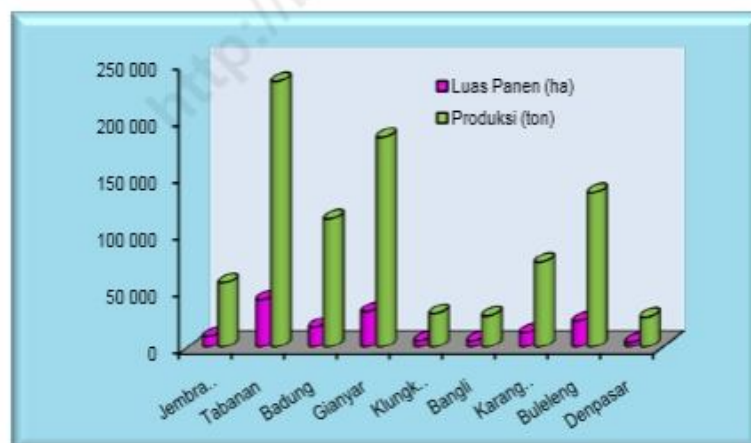
Tabel 2.33
Hasil Penilaian IKM Terhadap Pelayanan Publik
di Instansi Pemerintah Provinsi Bali

| No | Unit Pelayanan | Nilai IKM | | Keterangan |
|-----|---|------------|------------|-------------|
| | | Tahun 2013 | Tahun 2014 | |
| 1. | UPT. Dispenda di Kab. Badung | 85,40 | 79,40 | Baik |
| 2. | UPT. Dispenda di Kab. Tabanan | 79,10 | 80,46 | Baik |
| 3. | UPT. Dispenda di Kab. Jembrana | 78,65 | 84,68 | Sangat Baik |
| 4. | UPT. Dispenda di Kab. Gianyar | 76,40 | 79,80 | Baik |
| 5. | UPT. Dispenda di Kab. Klungkung | 77,75 | 78,26 | Baik |
| 6. | UPT. Dispenda di Kab. Bangli | 77,54 | 75,65 | Baik |
| 7. | UPT. Dispenda di Kab. Karangasem | 75,40 | 77,75 | Baik |
| 8. | UPT. Dispenda di Kota Denpasar | 79,89 | 79,82 | Baik |
| 9. | UPT. Dispenda di Kab. Badung | 76,90 | 79,82 | Baik |
| 10. | RS. Jiwa Provinsi Bali | 79,64 | 77,97 | Baik |
| 11. | RS Indera Provinsi Bali | 80,00 | 81,34 | Sangat Baik |
| 12. | Bidang Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan satu pintu pada BPMP Provinsi Bali | 78,92 | 84,31 | Sangat Baik |
| 13. | UPT. Laboratorium Dinas Kesehatan Provinsi Bali | 79,72 | 80,45 | Baik |
| 14. | Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Bali | | 76,17 | Baik |
| 15. | UPT. JKBM Dinas Kesehatan Provinsi Bali | | 71,49 | Baik |
| 16. | UPT. Monumen Perjuangan Rakyat Bali | | 80,25 | Baik |
| 17. | UPT. Metreologi Disperindag Provinsi Bali | | 75,30 | Baik |
| 18. | UPT. Laboratorium Pengujian Pengendalian Mutu Hasil Perikanan Provinsi Bali | | 78,92 | Baik |
| 19. | UPT. Museum Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | | 76,71 | Baik |
| 20. | UPT. Taman Budaya Dinas Kebudayaan Provinsi Bali | | 72,73 | Baik |

18. Ketahanan Pangan

Sebagian besar, petani di Bali mempunyai kegiatan pokok di subsektor pertanian tanaman pangan. Dalam rangka upaya pengembangan produksi tanaman pangan dapat dilakukan dengan cara intensifikasi atau peningkatan hasil per satuan luas tanah. Sebaliknya, upaya melalui ekstensifikasi sudah tidak memungkinkan karena keterbatasan lahan yang ada.

Berdasarkan Angka Tetap (ATAP) BPS Provinsi Bali, produksi padi selama tahun 2013 tercatat 880.982 ton Gabah Kering Giling (GKG) atau mengalami peningkatan 15.428 ton GKG (1,78%) dari tahun sebelumnya. Sementara itu, produktivitas untuk tahun 2013 juga mengalami peningkatan 1,22 persen yakni dari 58,09 kuintal/hektar di tahun 2012 menjadi 58,80 kuintal/hektar di tahun 2013. Produktivitas terbesar tahun 2013 diberikan oleh Kabupaten Badung. Dalam hal tanaman jagung, produksi jagung selama tahun 2013 hanya 57.573 ton pipilan kering atau menurun 4.300 ton pipilan kering (6,95%) dari tahun sebelumnya. Namun terjadi peningkatan pada produktivitas jagung dari 29,45 kuintal/hektar menjadi 31,59 kuintal/hektar di tahun 2013. Untuk tanaman kedelai, selama tahun 2013 mengalami penurunan 777 ton dari 8.210 ton menjadi 7.433 ton. Pada bagian lain, ubi kayu mengalami peningkatan sekitar 6,62 persen yakni dari 147.201 ton di tahun 2012 menjadi 156.953 ton di tahun 2013. Penyumbang terbesar komoditas ubi kayu ini dihasilkan Kabupaten Karangasem dan Klungkung masing-masing 100.184 dan 16.369 ton.



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.32
Luas Panen dan Produksi Padi Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2013



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.33
Luas Panen dan Jumlah Produksi Palawija Menurut Komoditas di Bali Tahun 2013

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus menjaga ketahanan pangan, pemerintah provinsi bali juga telah mengembangkan kegiatan Simantri yaitu mengintegrasikan kegiatan sektor pertanian dengan sektor pendukungnya baik secara vertikal maupun horizontal sesuai potensi masing-masing wilayah dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya lokal yang ada dilaksanakan mulai tahun 2009 sebanyak 10 gapoktan, tahun 2010 sebanyak 40 gapoktan, tahun 2011 sebanyak 150 gapoktan, tahun 2012 sebanyak 125 gapoktan. Selanjutnya pada tahun 2013 dan tahun 2014 kembali kembangkan sebanyak 94 gapoktan dan 83 gapoktan. Dengan demikian sampai akhir tahun 2014 telah terbentuk sebanyak 502 gapoktan.

Tabel 2.34
Jumlah Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Simantri Tahun 2009 - 2014

| No | Tahun | Gapoktan Simantri |
|-------|-------|-------------------|
| 1 | 2009 | 10 gapoktan |
| 2 | 2010 | 40 gapoktan |
| 3 | 2011 | 150 gapoktan |
| 4 | 2012 | 125 gapoktan |
| 5 | 2013 | 94 gapoktan |
| 6 | 2014 | 83 gapoktan |
| TOTAL | | 502 Gapoktan |

Sumber : Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Provinsi Bali

19. Statistik

Sesuai pasal 31 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa rencana pembangunan didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Data dan informasi mempunyai peranan yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Berdasarkan data dan informasi yang benar dan akurat akan dapat dilakukan analisis terhadap indikator keberhasilan pembangunan yang telah dicapai, dan untuk mengidentifikasi kecenderungan perkembangan sektor-sektor pembangunan serta perkiraan kebutuhan data dimasa datang.

Hasil analisis akan menjadi salah satu dasar dalam evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan serta dalam penyusunan rencana pembangunan periode berikutnya, dengan demikian perencanaan dan pelaksanaan rencana pembangunan dapat dilaksanakan sesuai perkembangan di lapangan.

Adapun hasil capaian kinerja pelayanan urusan wajib bidang statistik tahun 2013 antara lain:

- a. Tersusunnya analisis indeks kinerja pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.
- b. Tersusunnya Buku Konsolidasi dan Laporan SAI Dekon/TP, Laporan Hasil Pemantauan Dekon/TP, Daftar kegiatan Dekon/TP.
- c. Tersusunnya Buku Data Bali Membangun, Informasi Hasil Pembangunan Daerah.
- d. Tersusunnya Buku PDRB Provinsi, Kabupaten, dan Kota di Bali.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Analisis kinerja atas layanan urusan pilihan dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja penyelenggaraan urusan pilihan pemerintahan daerah, yaitu bidang urusan pertanian, kehutanan, energi dan sumberdaya mineral, pariwisata, kelautan dan perikanan, perdagangan, industri dan ketransmigrasian.

1. Pertanian

Pembangunan sektor pertanian dalam arti luas diarahkan untuk mendorong kecukupan kebutuhan pangan daerah dan mendorong peningkatan produksi dalam rangka meningkatkan pendapatan

masyarakat melalui pengembangan komoditi sub sektor pertanian tanaman pangan, perkebunan dan peternakan.

a. Pertanian Tanaman Pangan

Komoditas hortikultura yang mengalami penurunan cukup besar dibandingkan tahun 2012 adalah buah rambutan. Produksi buah rambutan selama tahun 2013 mencapai 7.397 ton atau mengalami penurunan 44,04 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk jenis komoditas sayur-sayuran, produksi terbesar pada tahun 2013 didapat pada jenis cabai yang mencapai 35.856 ton atau mengalami peningkatan 20,23 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 29.824 ton. Sebaliknya, komoditas bawang putih adalah yang paling kecil dengan jumlah produksi hanya 48 ton sepanjang tahun 2013. Padahal di tahun 2012, produksi bawang putih mencapai 85 ton. Dengan demikian telah terjadi penurunan produksi sebesar 43,53 persen dalam satu tahun terakhir.

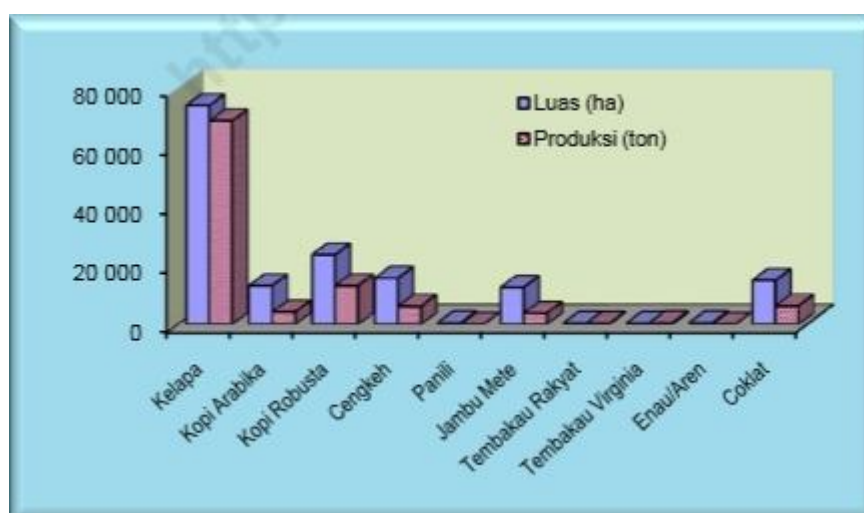
b. Perkebunan

Perkebunan mempunyai kedudukan strategis dalam pengembangan sektor pertanian di Bali. Apalagi perkebunan di Bali merupakan perkebunan rakyat. Peningkatan kualitas dan produksi hasilhasil perkebunan adalah salah satu tujuan pembangunan sub sektor perkebunan. Komoditas hasil perkebunan yang potensial dikembangkan dan memiliki peluang ekspor yang tinggi di Bali adalah kelapa, kopi, cengkeh, vanili, dan jambu mete.

Untuk tanaman kelapa di Bali, berdasarkan data Dinas Perkebunan Provinsi Bali, secara keseluruhan luas arealnya mencapai 74.223 ha pada tahun 2013 meliputi luas areal tanam kelapa dalam 70.905 ha, kelapa hybrida 290 ha, kelapa genjah 2.869 ha, dan kelapa deres 159 ha. Luas areal tanaman kelapa ini mengalami peningkatan 0,54 persen dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 73.825 ha, yakni untuk jenis kelapa dalam 70.824 ha, kelapa hybrida 292 ha, kelapa genjah 2.605 ha, dan kelapa deres 104 ha. Peningkatan luas areal tanaman kelapa ini dibarengi dengan jumlah produksi, yang juga meningkat dalam setahun terakhir ini sebesar 0,86 persen dari 68.521,98 ton di tahun 2012 menjadi 69.108,09 ton di tahun 2013.

Jika dilihat dari produktivitas lahan atau rata-rata produksi per luas areal tanaman kelapa yang menghasilkan selama tahun 2013, maka diperoleh angka produktivitas untuk kelapa dalam 0,94 ton/ha, kelapa hybrida 0,68 ton/ha, kelapa genjah 0,38 ton/ha dan kelapa deres 5,31 ton/ha. Dari sini dapat dilihat bahwa tingkat produktivitas kelapa deres lebih tinggi dari jenis kelapa lainnya. Untuk setiap hektar areal tanaman kelapa deres yang menghasilkan mampu memproduksi rata-rata enam ton, sedangkan jenis kelapa lainnya hanya memproduksi rata-rata di bawah satu ton saja. Tanaman perkebunan lain yang cukup potensial di Bali adalah kopi. Ada dua jenis kopi yang dihasilkan di Bali, yakni kopi arabika dan robusta. Untuk kopi arabika, luas areal tanam secara keseluruhan selama tahun 2013 mencapai 13.112 ha atau meningkat 9,87 persen dari tahun sebelumnya sebesar 11.934 ha.

Peningkatan luas areal tanam juga diikuti oleh peningkatan produksi, yaitu meningkat sebesar 0,36 persen, dari 4.199,76 ton di tahun 2012 menjadi 4.214,89 ton di tahun 2013. Sedangkan untuk kopi robusta, dilihat dari luas areal tanamnya tidak mengalami perubahan, yaitu 23.628 ha dalam satu tahun terakhir. Sedangkan jumlah produksinya menurun 10,75 persen dari 14.680,70 ton menjadi 13.102,92 ton. Sementara itu, untuk tanaman cengkeh, vanili, jambu mete, kapok, kakao, dan tembakau, baik untuk luas areal dan jumlah produksi bervariasi selama periode tahun 2012 – 2013.



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.34
Luas Panen dan Jumlah Produksi Perkebunan Menurut Komoditas di Bali Tahun 2013

c. Peternakan

Ternak dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kelompok, yakni ternak besar (sapi, kerbau, dan kuda), ternak kecil (kambing, domba, dan babi), serta ternak unggas seperti ayam buras, ayam ras petelur, ayam ras potong, dan itik. Dalam kelompok ternak besar, jumlah populasi ternak sapi di Bali mengalami penurunan 26,58 persen, dari 651.216 ekor menjadi 478.146 ekor selama periode tahun 2012 – 2013. Ternak babi turun 3,40 persen. Sama halnya dengan populasi ternak kuda yang juga mengalami penurunan sebesar 13,33 persen. Sedangkan populasi kerbau naik 0,59 persen. Sementara itu, perkembangan jumlah populasi untuk kelompok ternak kecil maupun ternak unggas bervariasi selama periode tahun 2012 – 2013.

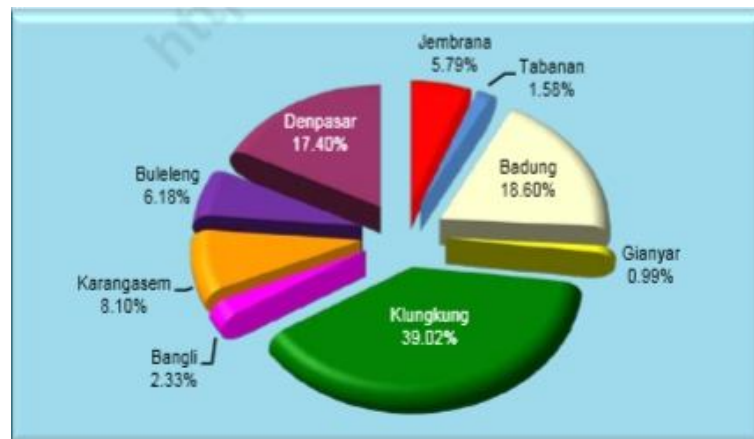


Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.35
Populasi Ternak Menurut Jenisnya di Bali Tahun 2013

2. Kelautan dan Perikanan

Optimalisasi sektor perikanan sebagai pendukung perekonomian Bali perlu ditingkatkan karena ekspor hasil perikanan sangat menjanjikan bagi perolehan devisa Bali ke depan. Berdasarkan data Dinas Perikanan Provinsi Bali, secara keseluruhan jumlah produksi ikan (perikanan laut dan perikanan darat) pada tahun 2013 mencapai 263.971,0 ton atau meningkat 11,08 persen dibandingkan tahun 2012 yang mencapai 237.643,3 ton. Sejalan dengan hal tersebut, peningkatan jumlah produksi ikan tersebut juga dibarengi dengan nilai produksinya yang naik 34,15 persen, dari Rp 1.733.293.745 ribu di tahun 2012 menjadi Rp 2.325.131.719 ribu di tahun 2013.



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.36
Persentase Produksi Ikan Menurut Kabupaten/Kota di Bali
Tahun 2013

3. Kehutanan

Hutan menurut fungsinya dibedakan menjadi hutan lindung, hutan produksi, cagar alam, taman wisata, dan hutan wisata. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Bali, luas kawasan hutan pada tahun 2013 sebesar 130.686,01 hektar atau 23,20 persen dari luas wilayah Bali, meliputi hutan lindung 95.766,06 hektar, hutan produksi terbatas 6.719,26 hektar, hutan produksi tetap 1.907,10 hektar, cagar alam 1.762,80 hektar, taman nasional 19.002,89 hektar, taman wisata alam 4.154,40 hektar, dan taman hutan raya 1.373,50 hektar. Khusus untuk luas hutan wisata berdasarkan fungsinya yang terekam di Balai Konservasi dan SDA Provinsi Bali meliputi lima fungsi hutan, yakni taman wisata alam Penelokan, cagar alam Batukau, taman wisata alam Sangeh, dan taman wisata alam danau Buyan –Tamblingan, dan taman wisata alam Gunung Batur Bukit Payang. Banyaknya pengunjung ke tempat lokasi hutan wisata tersebut mengalami peningkatan 44,10 persen, dari 62.398 orang di tahun 2012 menjadi 89.918 orang di tahun 2013. Selama tahun 2013, kunjungan ke lokasi hutan wisata ini lebih didominasi pengunjung domestik yang mencapai 69.614 orang (77,42%) dibandingkan pengunjung asing yang berjumlah 20.304 orang (22,58%).



Tabel 2.35
Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Bali Tahun 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | Luas Wilayah Area of Regency (ha) | Luas Hutan Area of Forest (ha) | Persentase Luas Hutan Terhadap Luas Percentage of Forest Area to | | |
|--------------------------------|--|--------------------------------------|---|-----------------------------|--|
| | | | Kabupaten Regency (%) | Provinsi Province (%) | Hutan Provinsi Province Forest (%) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Jembrana | 84 180.00 | 42 156.27 | 50.08 | 7.48 | 32.26 |
| 2. Tabanan | 83 933.00 | 9 969.15 | 11.88 | 1.77 | 7.63 |
| 3. Badung | 41 852.00 | 1 779.87 | 4.25 | 0.32 | 1.36 |
| 4. Gianyar | 36 800.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Klungkung | 31 500.00 | 1 048.50 | 3.33 | 0.19 | 0.80 |
| 6. Bangli | 52 081.00 | 9 341.28 | 17.94 | 1.66 | 7.15 |
| 7. Karangasem | 83 954.00 | 14 220.23 | 16.94 | 2.52 | 10.88 |
| 8. Buleleng | 136 588.00 | 51 436.21 | 37.66 | 9.13 | 39.36 |
| 9. Denpasar | 12 778.00 | 734.50 | 5.75 | 0.13 | 0.56 |
| Jumlah / Total : | 563 666.00 | 130 686.01 | - | 23.19 | 100.00 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.36
Luas Kawasan Hutan Menurut Kabupaten dan
Fungsinya di Provinsi Bali Tahun 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | Fungsi Hutan (ha) / Function of Forest (hectares) | | |
|--------------------------------|---|--|---|
| | Hutan Lindung Protection Forest | Hutan Produksi Terbatas Limited Protection Forest | Hutan Produksi Tetap Fixed Protection Forest |
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. Jembrana | 32 974.97 | 2 610.20 | 383.10 |
| 2. Tabanan | 8 668.24 | 0 | 0 |
| 3. Badung | 1 126.90 | 0 | 0 |
| 4. Gianyar | 0 | 0 | 0 |
| 5. Klungkung | 804.50 | 244.00 | 0 |
| 6. Bangli | 6 239.01 | 453.00 | 0 |
| 7. Karangasem | 14 016.12 | 204.11 | 0 |
| 8. Buleleng | 31 936.32 | 3 207.95 | 1 524.00 |
| 9. Denpasar | 0 | 0 | 0 |
| Jumlah / Total : | 95 766.06 | 6 719.26 | 1 907.10 |

Lanjutan tabel 2.30

| Kabupaten/Kota Regency/City | Fungsi Hutan (ha) / Function of Forest (hectares) | | | | Jumlah Total |
|--------------------------------|---|------------------------------------|--|--|-----------------|
| | Hutan Konservasi / Conservation Forest | | | | |
| | Cagar Alam Natural Reserve | Taman Nasional National Park | Taman Wisata Alam Natural Conservation | Taman Hutan Raya Natural Conservation | |
| (1) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| 1. Jembrana | 0 | 6 188.00 | 0 | 0 | 42 156.27 |
| 2. Tabanan | 758.40 | 0 | 542.51 | 0 | 9 969.15 |
| 3. Badung | 0 | 0 | 13.97 | 639.00 | 1 779.87 |
| 4. Gianyar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Klungkung | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 048.50 |
| 6. Bangli | 0 | 0 | 2 649.27 | 0 | 9 341.28 |
| 7. Karangasem | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 220.23 |
| 8. Buleleng | 1 004.40 | 12 814.89 | 948.65 | 0 | 51 436.21 |
| 9. Denpasar | 0 | 0 | 0 | 734.50 | 734.50 |
| Jumlah / Total : | 1 762.80 | 19 002.89 | 4 154.40 | 1 373.50 | 130 686.01 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Beberapa indikator yang terdapat dalam Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral adalah seperti: pertambangan tanpa ijin di Tahun 2010 adalah sebesar 4% di Tahun 2011 adalah sebesar 3%, sedangkan pada Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2013 masing-masing 0%, untuk Tahun 2014 sebesar 2%. Surat ijin pemanfaatan air tanah (SIPA) dengan rekomendasi teknis, capain kinerja di Tahun 2010 adalah sebesar 57 buah, Tahun 2011 adalah sebesar 54 buah, Tahun 2012 sebesar 247 buah, Tahun 2013 sebesar 241 buah, dan pada Tahun 2014 adalah sebesar 257 buah. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB mengalami peningkatan tiap tahunnya, pada Tahun 2010 sebesar 0,65% meningkat menjadi 0,78% pada Tahun 2014. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.37
Capaian Kinerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

| No | Indikator | Capaian Kinerja Setiap Tahun | | | | |
|----|---|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Pertambangan tanpa ijin | 4% | 3% | 0% | 0% | 2% |
| 2 | Surat Ijin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) dengan Rekomendasi Teknis | 57 | 54 | 247 | 241 | 257 |
| 3 | Kontribusi Sektor Pertambangan Terhadap PDRB | 0,65% | 0,68% | 0,73% | 0,75% | 0,78% |

Sumber : Bidang ESDM Dinas PU Provinsi Bali Tahun 2015

5. Pariwisata

Seperti diketahui, pariwisata sampai saat ini masih merupakan motor penggerak ekonomi Bali. Sehingga cerah atau muramnya kondisi ekonomi provinsi yang dikenal dengan julukan Pulau Dewata ini akan sangat bergantung dari kinerja pariwisata secara umum. Memasuki tahun 2013, sejumlah kekhawatiran yang berangkat dari memburuknya ekonomi negara-negara kontributor utama kepariwisataan Bali tampak tidak terbukti. Sampai dengan bulan Desember 2013 kunjungan wisman ke Bali mencapai 3.278.598 orang atau meningkat sebesar 11,16 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pada saat low season jumlah kunjungan wisman ke Bali berkisar antara 230 ribu sampai 260 ribu orang, sementara memasuki high season tingkat kunjungan mencapai 270 ribu orang lebih, dengan tingkat kunjungan tertinggi terjadi pada bulan Agustus (peak season) yaitu sebanyak 309.219 orang.



Tabel 2.38
Banyaknya Wisatawan Mancanegara yang Datang Langsung ke Bali per Bulan Tahun 2009 - 2013

| Bulan Month | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Januari / January | 174 541 | 179 273 | 209 093 | 253 286 | 232 935 |
| 2. Pebruari / February | 147 704 | 191 926 | 207 195 | 225 993 | 241 868 |
| 3. Maret / March | 168 205 | 192 579 | 207 907 | 230 957 | 252 210 |
| 4. April / April | 188 776 | 184 907 | 224 704 | 225 488 | 242 369 |
| 5. Mei / May | 190 803 | 203 388 | 209 058 | 220 700 | 247 972 |
| 6. Juni / June | 200 566 | 228 045 | 245 652 | 244 080 | 275 667 |
| 7. Juli / July | 235 198 | 254 907 | 283 524 | 271 512 | 297 878 |
| 8. Agustus / August | 232 255 | 243 154 | 258 377 | 254 079 | 309 219 |
| 9. September / September | 218 443 | 240 947 | 258 440 | 257 363 | 305 629 |
| 10. Oktober / October | 221 282 | 229 904 | 247 565 | 255 021 | 266 562 |
| 11. Nopember / November | 184 803 | 199 861 | 221 603 | 242 781 | 307 276 |
| 12. Desember / December | 222 546 | 227 251 | 253 591 | 268 072 | 299 013 |
| Jumlah / Total : | 2 385 122 | 2 576 142 | 2 826 709 | 2 949 332 | 3 278 598 |
| Pertumbuhan Growth Rate (%) | 14.39 | 8.01 | 9.73 | 4.34 | 11.16 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Akan tetapi meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara tidak dibarengi dengan Tingkat Penghunian Kamar (TPK). Pada hotel bintang angka TPK turun dari tahun sebelumnya yaitu dari 63,21 persen menjadi 60,68 persen di tahun 2013, sementara pada hotel non bintang, juga terjadi penurunan dari 38,63 persen di tahun 2012 menjadi 36,02 persen di tahun 2013. Meningkatnya jumlah kunjungan wisman tidak diikuti dengan rata-rata lama menginap di hotel berbintang. Untuk hotel bintang, rata-rata lama menginap wisman mencapai 3,30 hari, lebih rendah dari tahun sebelumnya yang mencapai 3,56 hari. Sementara hotel non bintang, rata-rata lama menginap wisman mencapai 3,46 hari, naik dari tahun sebelumnya yang telah mencapai 3,38 hari.

Tabel 2.39
Rata-Rata Lama Menginap Tamu di Hotel Berbintang Menurut Bulan dan Kelas Hotel di Bali Tahun 2013

| Bulan Month | Kelas Hotel / Hotel Class | | | | | (Hari / days) |
|--------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--|
| | Bintang 5 5 Star | Bintang 4 4 Star | Bintang 3 3 Star | Bintang 2 2 Star | Bintang 1 1 Star | Seluruh Kelas Hotel All Classes |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Januari / January | 2.99 | 3.80 | 2.97 | 2.76 | 2.76 | 3.14 |
| 2. Pebruari / February | 2.69 | 3.62 | 4.17 | 2.84 | 2.44 | 2.98 |
| 3. Maret / March | 3.02 | 4.01 | 3.61 | 2.91 | 2.51 | 3.27 |
| 4. April / April | 3.36 | 3.32 | 3.02 | 3.56 | 2.99 | 3.30 |
| 5. Mei / May | 3.09 | 3.18 | 3.29 | 2.60 | 3.08 | 3.12 |
| 6. Juni / June | 3.03 | 2.88 | 3.04 | 2.68 | 3.24 | 2.99 |
| 7. Juli / July | 3.24 | 3.03 | 3.33 | 2.87 | 3.55 | 3.19 |
| 8. Agustus / August | 2.66 | 3.29 | 3.65 | 3.08 | 2.70 | 2.99 |
| 9. September / September | 3.08 | 3.55 | 3.25 | 2.89 | 2.62 | 3.20 |
| 10. Oktober / October | 3.16 | 3.30 | 3.83 | 3.05 | 2.30 | 3.22 |
| 11. Nopember / November | 3.16 | 3.12 | 3.30 | 3.10 | 2.32 | 3.12 |
| 12. Desember / December | 4.13 | 3.94 | 3.73 | 3.11 | 2.56 | 3.84 |
| Rata-rata / Average : | 3.13 | 3.42 | 3.43 | 2.95 | 2.76 | 3.20 |
| 2012 | 3.34 | 3.54 | 3.40 | 3.37 | 2.89 | 3.36 |
| 2011 | 3.61 | 3.42 | 3.65 | 4.07 | 2.32 | 3.67 |
| 2010 | 3.73 | 3.70 | 3.88 | 4.22 | 3.91 | 3.78 |
| 2009 | 3.67 | 3.85 | 3.73 | 3.70 | 3.35 | 3.74 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014



Tabel 2.40
Rata-Rata Lama Menginap Tamu di Hotel Non Bintang dan Akomodasi Lainnya Menurut Kelompok Kamar di Bali Tahun 2013

| Bulan Month | Kelompok Kamar / Rooms Available | | | | | (Hari / days) |
|--------------------------|----------------------------------|---------|---------|----------|-------|--|
| | < 10 | 10 - 24 | 25 - 40 | 41 - 100 | > 100 | Seluruh Kelompok Kamar All Groups |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Januari / January | 2.24 | 2.55 | 2.42 | 2.98 | 2.04 | 2.63 |
| 2. Februari / February | 1.68 | 2.63 | 2.20 | 3.02 | 4.90 | 2.70 |
| 3. Maret / March | 1.51 | 2.30 | 2.48 | 3.49 | 2.76 | 2.61 |
| 4. April / April | 1.44 | 2.37 | 2.11 | 3.78 | 7.79 | 2.84 |
| 5. Mei / May | 1.55 | 2.27 | 2.35 | 3.25 | 4.69 | 2.73 |
| 6. Juni / June | 1.37 | 2.10 | 2.21 | 3.33 | 2.84 | 2.48 |
| 7. Juli / July | 1.54 | 2.44 | 2.39 | 3.70 | 2.22 | 2.84 |
| 8. Agustus / August | 1.57 | 2.38 | 2.45 | 3.56 | 4.25 | 2.84 |
| 9. September / September | 1.38 | 2.22 | 2.16 | 3.70 | 3.14 | 2.70 |
| 10. Oktober / October | 1.68 | 2.56 | 2.57 | 3.58 | 2.73 | 3.02 |
| 11. Nopember / November | 1.66 | 2.41 | 2.45 | 3.73 | 4.52 | 3.25 |
| 12. Desember / December | 1.50 | 2.48 | 2.33 | 3.91 | 3.33 | 3.47 |
| Jumlah / Total : | 1.55 | 2.39 | 2.35 | 3.54 | 3.70 | 2.78 |
| 2012 | 1.65 | 2.41 | 2.26 | 3.46 | 3.31 | 2.85 |
| 2011 | 1.99 | 2.20 | 2.84 | 2.97 | 3.68 | 2.54 |
| 2010 | 2.23 | 2.08 | 2.79 | 2.98 | 2.92 | 2.57 |
| 2009 | 2.27 | 2.19 | 3.07 | 2.87 | 3.79 | 2.72 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

6. Industri

Ekonomi Bali yang dominan dipengaruhi oleh kinerja pariwisata, tentu tidak terlepas dari peranan sektor industri pengolahan, terutama industri kerajinan sebagai pendukung kemajuan kepariwisataan di Bali. Jika dikelompokkan berdasarkan jumlah tenaga kerja yang mampu diserap, sektor industri pengolahan dapat dibedakan menjadi empat subkelompok, yaitu industri rumah tangga, industri kecil, industri sedang, dan industri besar. Dari keempat subkelompok tersebut, industri besar dan sedang tercatat sebagai kelompok yang menghasilkan nilai tambah terbesar, sehingga dirasa penting untuk melihat perkembangannya dari waktu ke waktu. Meski diyakini memiliki manajemen/ pengelolaan yang jauh lebih baik dibanding industri kecil maupun industri rumah tangga, namun keberadaan industri besar dan sedang tetap tidak terlepas dari berbagai permasalahan baik itu akibat faktor eksternal maupun internal. Hal ini tampak jelas jika melihat fluktuasi jumlah perusahaan industri besar dan sedang maupun jumlah tenaga kerja yang mampu diserap.

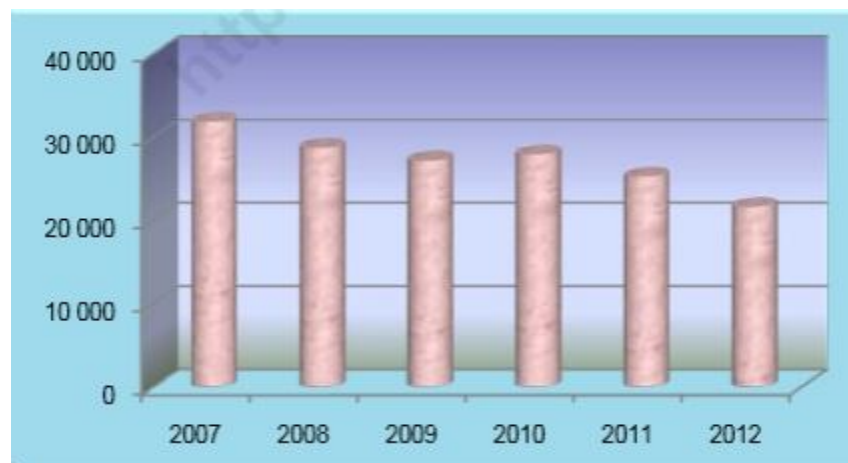
Pada tahun 2010, jumlah perusahaan industri besar dan sedang di Bali mencapai 326 perusahaan dan mampu menyerap 27.938 orang tenaga kerja. Kemudian di tahun 2011 terjadi peningkatan tipis jumlah perusahaan dengan jumlah mencapai 329 perusahaan dan 25.252 orang tenaga kerja. Jumlah tersebut kemudian menurun di tahun selanjutnya

(2012) hingga menjad 318 perusahaan namun jumlah pekerja menurun menjadi 21.645 pekerja.



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.37
Jumlah Industri Besar dan Sedang di Bali Tahun 2007 - 2012



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

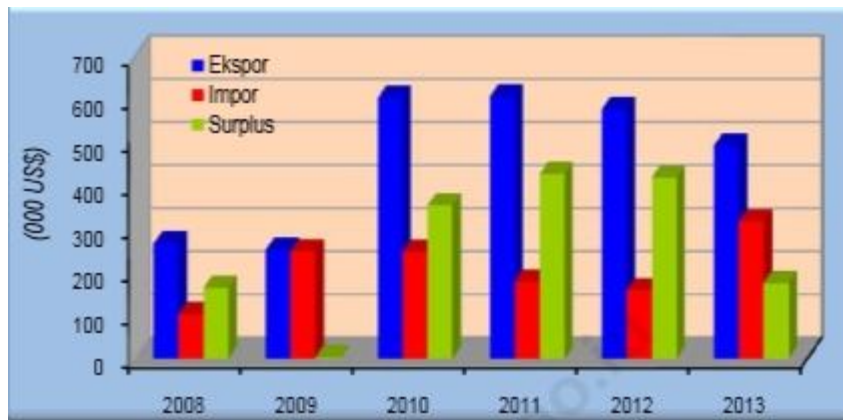
Gambar 2.38
Jumlah Tenaga Kerja Industri Besar dan Sedang di Bali Tahun 2007 – 2012

Dilihat dari jenis barang yang diproduksi, usaha industri pakaian jadi merupakan jenis perusahaan terbanyak dengan 60 perusahaan. Namun untuk penyerapan tenaga kerja, industri makanan masih merupakan penyerap tenaga kerja terbesar, yang mencapai 5.577 orang pekerja. Pada bagian lain, nilai output yang dihasilkan usaha industri besar dan sedang di Bali mencapai Rp 9,04 trilyun di tahun 2012. Sementara biaya input mengalami penurunan 22,33 persen dari Rp 2,15 trilyun menjadi sebesar Rp 1,67 trilyun, sehingga total nilai tambah untuk industri besar dan sedang mencapai Rp 7,08 trilyun.

Dalam hal penciptaan nilai tambah, industri pakaian jadi tercatat sebagai yang paling dominan. Pada tahun 2012, industri jenis ini menyumbang nilai tambah sebesar Rp 2,46 trilyun rupiah atau sekitar 34,75 persen dari total nilai tambah yang diciptakan industri besar dan sedang.

7. Perdagangan

Transaksi berjalan sektor perdagangan luar negeri merupakan salah satu instrumen terpenting dalam memotret sejauh mana perkembangan aktivitas perdagangan (ekspor-impor) yang dilakukan antar negara di kawasan tertentu. Seperti diungkap sebelumnya, transaksi berjalan sektor perdagangan barang luar negeri Provinsi Bali masih menunjukkan angka positif yakni sebesar US\$ 175.931 ribu, 58,15 persen lebih rendah dibanding tahun sebelumnya yang mencapai US\$ 420.345 ribu.



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.39
Posisi Neraca Perdagangan Provinsi Bali Tahun 2008 – 2013

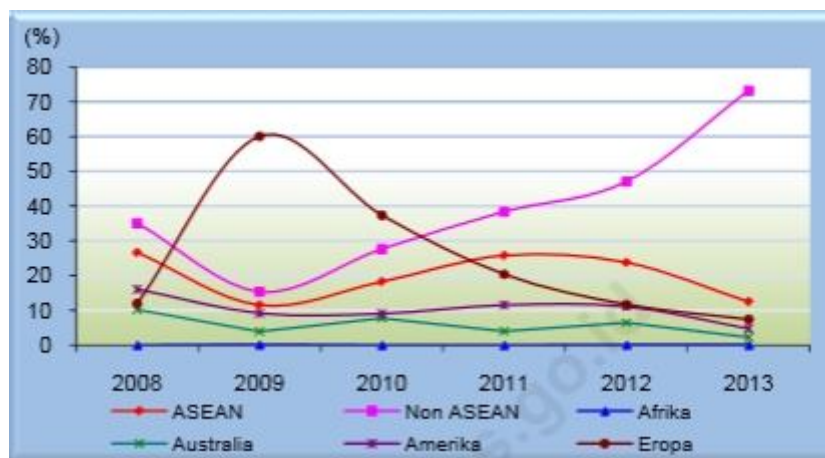
Kawasan Asia masih menjadi pasar utama tujuan ekspor barang dari Bali. Selama tahun 2013 perolehan devisa dari kawasan tersebut mencapai US\$ 177.063 ribu atau 35,78 persen dari total nilai ekspor Bali. Tapi dibanding tahun sebelumnya, ekspor Bali ke kawasan Asia menurun sebesar 17,55 persen. Dari sepuluh negara utama tujuan ekspor selama tahun 2013, tampak Amerika Serikat mendominasi pasar ekspor yang, diikuti oleh Jepang dan Australia.



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.40
Perkembangan Pangsa Ekspor Provinsi Bali Menurut
Kawasan Tujuan Tahun 2008 – 2013

Sedangkan dari sisi impor, sebagian besar impor Bali tahun 2013 berasal dari China diikuti oleh Singapura , Hongkong, Eropa dan Amerika. Nilai impor dari China mencapai US\$ 202.169.536, diikuti oleh Singapura dan Hongkong dengan nilai impor masing-masing mencapai US\$ 27.603.269 dan US\$ 20.947.133



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.41
Perkembangan Pangsa Impor Provinsi Bali Menurut
Kawasan Asal Tahun 2008 - 2013

2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

Aspek daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, nasional atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas



wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia, yang diuraikan sebagai berikut:

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

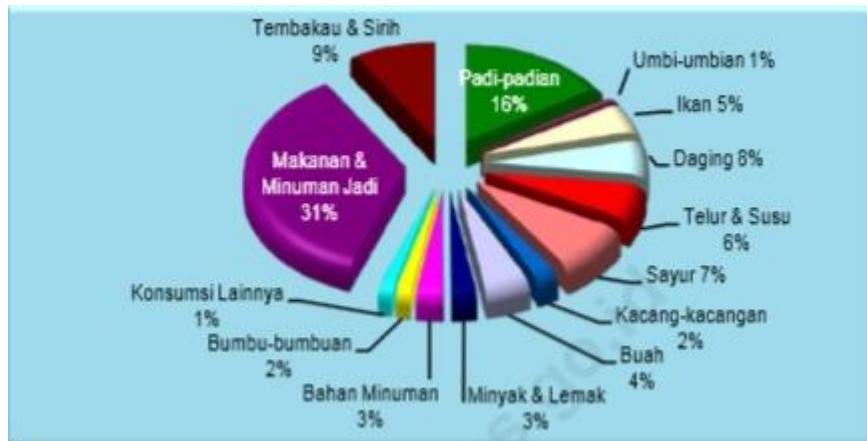
1. Pengeluaran masyarakat pe kapita

Besarnya pengeluaran rumah tangga menunjukkan kemampuan ekonomi daerah dalam mendorong perekonomian Bali. Dari hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2013 pengeluaran masyarakat Bali secara rata-rata mencapai Rp 994.070 per kapita per bulan atau mengalami peningkatan sebesar 9,03 persen dibanding tahun sebelumnya. Peningkatan ini sebagian besar terjadi pada komoditas makanan yaitu dari Rp 365.936 menjadi Rp 422.190 (15,37%). Sementara komoditas bukan makanan meningkat sebesar 4,78 persen, yaitu dari Rp 545.788 menjadi Rp 571.880.

Tabel 2.41
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bahan Makanan Provinsi Bali Tahun 2011 – 2013

| Kelompok Bahan Makanan <i>Food Commodity Group</i> | 2011 | | 2012 | | 2013 | |
|---|--------------------------|--------|--------------------------|--------|--------------------------|--------|
| | Rupiah <i>Rupiahs</i> | % | Rupiah <i>Rupiahs</i> | % | Rupiah <i>Rupiahs</i> | % |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Padi-padian / <i>Cereals</i> | 55 019 | 17.29 | 63 611 | 17.38 | 67 233 | 15.92 |
| 2. Umbi-umbian / <i>Tubers</i> | 1 762 | 0.55 | 1 797 | 0.49 | 2 488 | 0.59 |
| 3. Ikan / <i>Fish</i> | 16 052 | 5.04 | 17 703 | 4.84 | 20 054 | 4.75 |
| 4. Daging / <i>Meat</i> | 18 832 | 5.92 | 28 087 | 7.68 | 23 888 | 5.66 |
| 5. Telur dan Susu <i>Eggs and Milk</i> | 17 628 | 5.54 | 20 900 | 5.71 | 24 207 | 5.73 |
| 6. Sayur-sayuran <i>Vegetables</i> | 24 238 | 7.62 | 25 778 | 7.04 | 32 984 | 7.81 |
| 7. Kacang-kacangan <i>Legumes</i> | 7 583 | 2.38 | 8 251 | 2.25 | 9 470 | 2.24 |
| 8. Buah-buahan / <i>Fruits</i> | 15 838 | 4.98 | 21 981 | 6.01 | 19 317 | 4.58 |
| 9. Minyak dan Lemak <i>Oil and Fats</i> | 10 135 | 3.18 | 11 186 | 3.06 | 10 938 | 2.59 |
| 10. Bahan Minuman <i>Beverages Stuffs</i> | 8 226 | 2.58 | 9 179 | 2.51 | 11 752 | 2.78 |
| 11. Bumbu-bumbuan / <i>Spices</i> | 5 374 | 1.69 | 6 442 | 1.76 | 6 364 | 1.51 |
| 12. Konsumsi Lainnya <i>Miscellaneous Food</i> | 4 574 | 1.44 | 5 350 | 1.46 | 5 942 | 1.41 |
| 13. Makanan dan Minuman Jadi / <i>Prepared food and Beverages Stuffs</i> | 106 228 | 33.38 | 113 737 | 31.08 | 150 708 | 35.70 |
| 14. Tembakau dan Sirih <i>Tobacco and Betel</i> | 26 742 | 8.40 | 31 935 | 8.73 | 36 843 | 8.73 |
| Jumlah / <i>Total</i> : | 318 230 | 100.00 | 365 936 | 100.00 | 422 190 | 100.00 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014



Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Gambar 2.42
Persentase Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kelompok Bahan Makanan Tahun 2013

Jika dilihat berdasarkan wilayahnya, Kota Denpasar dan Kabupaten Badung berturut-turut tercatat sebagai dua daerah yang penduduknya memiliki rata-rata pengeluaran per kapita tertinggi, bahkan jauh lebih tinggi dari rata-rata provinsi. Hal ini tentu menjadi gambaran bahwa penduduk di kedua wilayah tersebut relatif lebih sejahtera dibanding daerah lainnya.

Tabel 2.42
Pengeluaran Rata-rata per Kapita Sebulan Menurut Kabupaten/ Kota dan Jenis Pengeluaran Provinsi Bali Tahun 2012 – 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | 2 0 1 2 | | | 2 0 1 3 | | |
|--------------------------------|-----------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|-----------------|
| | Makanan Food | Bukan Makanan Non Food | Jumlah Total | Makanan Food | Bukan Makanan Non Food | Jumlah Total |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Jembrana | 321 170 | 380 855 | 702 025 | 311 848 | 335 855 | 647 703 |
| 2. Tabanan | 368 998 | 461 667 | 830 666 | 406 732 | 506 906 | 913 638 |
| 3. Badung | 483 372 | 728 313 | 1 211 685 | 504 576 | 827 250 | 1 331 826 |
| 4. Gianyar | 373 502 | 629 403 | 1 002 905 | 389 460 | 570 194 | 959 654 |
| 5. Klungkung | 346 795 | 348 292 | 695 087 | 358 910 | 360 510 | 719 420 |
| 6. Bangli | 284 204 | 280 102 | 564 306 | 307 578 | 307 183 | 614 761 |
| 7. Karangasem | 245 940 | 201 181 | 447 121 | 302 525 | 255 381 | 557 906 |
| 8. Buleleng | 291 180 | 302 447 | 593 627 | 354 023 | 388 892 | 742 914 |
| 9. Denpasar | 432 348 | 929 557 | 1 361 905 | 576 065 | 898 824 | 1 474 889 |
| B A L I | 365 936 | 545 788 | 911 724 | 422 190 | 571 880 | 994 070 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Di sisi lain, terjadi peningkatan pada pengeluaran makanan (secara nominal) yang juga diikuti dengan konsumsi kalori penduduk Bali tercatat mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya. Konsumsi kalori per kapita per hari pada tahun 2013 sebesar 2.056,78

kkal. Sementara konsumsi protein naik menjadi 60,40 gram, lebih tinggi dari tahun sebelumnya yang mencapai 60,12 gram.

Tabel 2.43
Rata-rata Konsumsi Kalori dan Protein per Kapita Sehari Menurut
Kelompok Bahan Makanan Provinsi Bali Tahun 2011 – 2013

| Kelompok Bahan Makanan <i>Food Commodity Group</i> | Kalori / <i>Calorie (Kcal)</i> | | | Protein / <i>Protein (gr)</i> | | |
|---|--------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2011 | 2012 | 2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Padi-padian / <i>Cereals</i> | 1 046.00 | 1 014.23 | 991.09 | 24.48 | 23.75 | 23.19 |
| 2. Umbi-umbian / <i>Tubers</i> | 32.10 | 20.63 | 21.35 | 0.29 | 0.20 | 0.20 |
| 3. Ikan / <i>Fish</i> | 29.02 | 35.07 | 29.00 | 5.05 | 6.07 | 5.08 |
| 4. Daging / <i>Meat</i> | 111.81 | 81.64 | 95.41 | 5.86 | 4.43 | 5.10 |
| 5. Telur dan Susu <i>Eggs and Milk</i> | 45.00 | 47.48 | 50.68 | 2.92 | 3.09 | 3.23 |
| 6. Sayur-sayuran <i>Vegetables</i> | 44.18 | 45.75 | 38.58 | 2.98 | 3.02 | 2.60 |
| 7. Kacang-kacangan <i>Legumes</i> | 58.49 | 57.68 | 52.00 | 5.24 | 5.29 | 4.83 |
| 8. Buah-buahan / <i>Fruits</i> | 59.73 | 45.49 | 61.04 | 0.57 | 0.47 | 0.60 |
| 9. Minyak dan Lemak <i>Oil and Fats</i> | 214.80 | 208.38 | 204.54 | 0.23 | 0.15 | 0.17 |
| 10. Bahan Minuman <i>Beverages Stuffs</i> | 76.04 | 65.85 | 67.06 | 1.09 | 1.00 | 1.12 |
| 11. Bumbu-bumbuan / <i>Spices</i> | 11.86 | 11.71 | 10.42 | 0.64 | 0.58 | 0.56 |
| 12. Konsumsi Lainnya <i>Miscellaneous Food</i> | 42.34 | 40.52 | 42.25 | 0.88 | 0.83 | 0.91 |
| 13. Makanan dan Minuman Jadi / <i>Prepared food and Beverages Stuffs</i> | 360.40 | 344.41 | 393.36 | 11.41 | 11.25 | 12.81 |
| Jumlah / Total : | 2 131.76 | 2 018.83 | 2 056.78 | 61.65 | 60.12 | 60.40 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator yang dapat melihat perkembangan kesejahteraan petani secara umum. Nilai NTP yang lebih dari 100 menunjukkan tingkat kesejahteraan petani yang relatif baik. Selama kurun waktu 2010 hingga 2013 tingkat kesejahteraan petani Bali dipandang cukup baik. Hal ini terlihat dari nilai NTP yang selalu diatas 100. Nilai Tukar Petani (NTP) Bali pada tahun 2013 sendiri yaitu sebesar 103,37

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Infrastruktur wilayah terdiri dari beberapa aspek yaitu tata ruang wilayah, infrastruktur transportasi, perbankan, Hotel, Restoran, dan listrik. Kebutuhan akan infrastruktur wilayah tidak terlepas dari fungsi dan peranannya terhadap pengembangan wilayah, yaitu sebagai pengarah dan pembentuk struktur tata ruang, pemenuhan kebutuhan wilayah, pemacu pertumbuhan wilayah, serta pengikat wilayah.

1. Penataan Ruang

Ketaatan terhadap RTRW dilihat dari persentase di Tahun 2010 adalah sebesar 50%, Tahun 2011 adalah sebesar 65%, Tahun 2012

adalah sebesar 65%, Tahun 2013 adalah sebesar 88% dan Tahun 2014 adalah sebesar 100%. Persentase luas wilayah produktif di Tahun 2010 adalah sebesar 60%, Tahun 2011 sebesar 60%, Tahun 2012 dan Tahun 2013 masing-masing sebesar 68,85% dan pada Tahun 2014 adalah sebesar 68,16%. Persentase luas wilayah industri Tahun 2010 dan Tahun 2011 adalah sama yaitu 0,40% Tahun 2012 adalah sebesar 0,42% Tahun 2013 dan Tahun 2014 persentasenya juga sama yaitu 0,43%. Persentase luas wilayah banjir dari Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2013 adalah sebesar 0,30% sedangkan pada Tahun 2014 mengalami penurunan yaitu sebesar 0,28%. Untuk persentase luas wilayah kekeringan di Tahun 2010 dan Tahun 2011 adalah sebesar 22,21% Tahun 2012 dan Tahun 2013 adalah sebesar 20,27% sedangkan Tahun 2014 adalah sebesar 0,07%. Persentase luas wilayah perkotaan Tahun 2010 dan Tahun 2011 adalah sebesar 8% dan Tahun 2012 sampai dengan Tahun 2014 adalah sebesar 8,33%. Data capaian tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.44
Persentase Ketaatan terhadap RTRW dan Persentase Luas Wilayah

| No | Indikator | Capaian Kinerja Setiap Tahun | | | | |
|----|------------------------------------|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Persentase Ketaatan terhadap RTRW | 50,00 | 65,00 | 65,00 | 88,00 | 100 |
| 2 | Persentase luas wilayah produktif | 60,00 | 60,00 | 68,85 | 68,85 | 68,16 |
| 3 | Persentase luas wilayah industri | 0,40 | 0,40 | 0,42 | 0,43 | 0,43 |
| 4 | Persentase luas wilayah banjir | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,30 | 0,28 |
| 5 | Persentase luas wilayah kekeringan | 22,21 | 22,21 | 20,27 | 20,27 | 20,07 |
| 6 | Persentase luas wilayah perkotaan | 8,00 | 8,00 | 8,33 | 8,33 | 8,33 |

Sumber : Hasil analisis materi teknis RTRWP

2. Sarana Transportasi

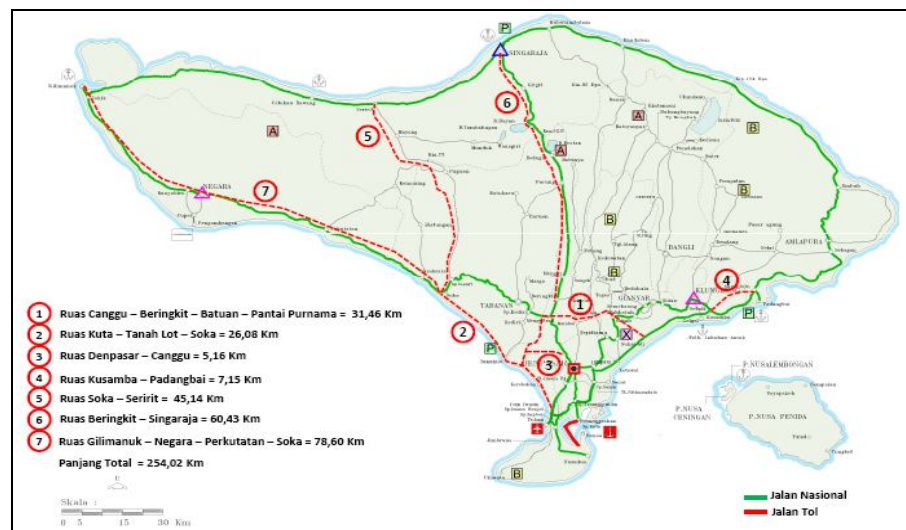
Sarana dan prasarana transportasi terdiri atas sarana prasarana transportasi darat, sarana prasarana transportasi laut dan sarana prasarana transportasi udara.

a. Sarana dan Prasaran Transportasi Darat

Jalan dan jembatan merupakan sarana vital dalam mendukung kelancaran transportasi darat. Jaringan jalan di Bali sampai tahun 2013 yaitu jalan Arteri sepanjang 535,230 km, jalan kolektor I dan II sepanjang 860,53 km dan jalan lokal sepanjang 5.391,43 km. Berdasarkan jenis permukaan, seluruh panjang jalan nasional dan

provinsi telah beraspal. Jumlah seluruh jembatan di Bali sampai dengan tahun 2013 adalah sebanyak 342 buah dengan panjang bentang jembatan 9.029 meter, terdiri dari jembatan nasional 234 buah dengan panjang bentang 6.180,80 meter, jembatan provinsi 108 buah dengan panjang bentang 2.848,20 meter dan jembatan kabupaten 467 buah dengan panjang bentang 6.387,64 meter. Kedepannya untuk memperkecil ketimpangan antar wilayah, mengurangi waktu tempuh serta mengurangi kemacetan direncanakan pengembangan jalan bebas hambatan baik antarkota maupun dalam kota seperti :

- 1) Pembangunan Ruas jalan Kuta-Tanah Lot-Soka
- 2) Pembangunan Ruas jalan Denpasar-Canggu
- 3) Pembangunan Western Ring Road
- 4) Pembangunan Ruas jalan Canggu-Beringkit-Purnama
- 5) Pembangunan Underpass Simpang Tugu Ngurah Rai
- 6) Pelebaran jalan Simpang Tohpati-Pantai Siut
- 7) Pembangunan Shortcut pada ruas jalan Mengwitani-Singaraja
- 8) Pembangunan Shortcut pada ruas jalan Klungkung-Amlapura



Gambar 2.43
Rencana Pembangunan dan Pengembangan Jalan
Di Provinsi Bali

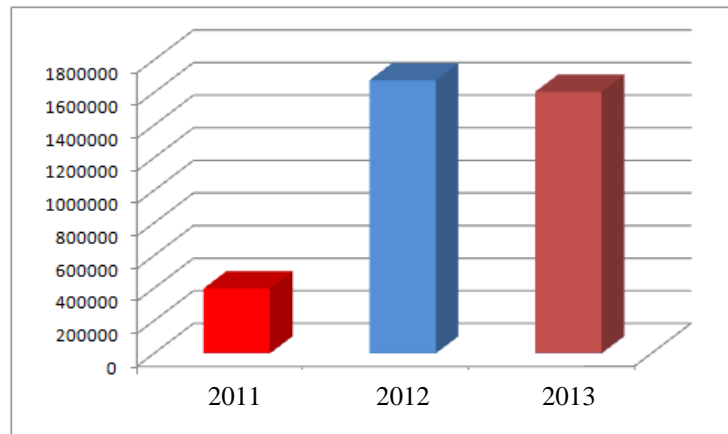
Selain hal tersebut diatas untuk memperlancar transportasi darat, Pemerintah Provinsi Bali juga telah mengembangkan moda transportasi masal yang dikenal dengan Transarbagita. Moda transportasi ini diaplikasikan melalui restrukturisasi jaringan trayek

di Kota Denpasar yang didukung dengan pengembangan jaringan trayek pada daerah sekitarnya. Penggunaan armada bus pada trayek-trayek utama dilaksanakan secara bertahap sesuai skala prioritas serta penggunaan armada angkutan kota pada jaringan trayek cabang dan ranting. Transarbagita direncanakan dapat melayani 17 Jaringan Trayek Utama (Koridor), dimana, 3 Trayek berbasis Bandara, 3 Trayek berbasis Wisata dan 11 Trayek berbasis Komuter yang didukung dengan 17 Jaringan Trayek Cabang pada wilayah Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan.

Sampai dengan tahun 2013, transarbagita telah melayani 2 koridor dari 17 Koridor utama yang direncanakan dengan jumlah penumpang mencapai 801.830 Orang

Tabel 2.45
Perkembangan Jumlah Penumpang Transarbagita
Tahun 2011-2013

| Uraian | Tahun | | |
|------------|---------|-----------|-----------|
| | 2011 | 2012 | 2013 |
| Total | 396,960 | 1,673,913 | 1,603,660 |
| Prosentase | | 76.29 | (6.81) |



Gambar 2.44
Trend Penumpang Transarbagita

b. Sarana dan Prasarana Transportasi Laut

Sampai saat ini di Provinsi Bali terdapat beberapa pelabuhan dan diantaranya merupakan pelabuhan penyeberangan yaitu pelabuhan penyeberangan Gilimanuk-Ketapang yang terletak di ujung Barat Pulau Bali dan Padangbai–Lembar terletak di ujung

Timur Pulau Bali, yang merupakan pelabuhan penyeberangan lintas nasional.

(1) Pelabuhan Penyeberangan Lintas Gilimanuk Ketapang;

Pelabuhan Gilimanuk memiliki 5 buah dermaga yang terdiri dari 2 buah dermaga Movable Bridge (MB), 1 buah dermaga ponton, dan 2 buah dermaga beton (LCM). Dermaga MB merupakan dermaga yang dapat digerakkan turun naik dengan bantuan mesin hidrolik sehingga ketinggian dermaga ini dapat disesuaikan dengan ketinggian landasan kapal. Dermaga MB ini dibangun pada tahun 1996 dan memiliki kemampuan menahan berat 20 ton. Dermaga ponton merupakan dermaga yang terbuat dari drum terapung atau landasan kayu yang dibuat sedemikian rupa. Dermaga ponton ini dibangun pada tahun 1976 dan memiliki kemampuan menahan berat sebesar 10 ton.

Sedangkan Dermaga LCM merupakan dermaga yang terdiri landasan beton tanpa adanya perangkat tambahan, sehingga kapal dapat menambat tanpa diperlukan adanya perangkat tambahan seperti bolder dan fender. Dermaga ini memiliki kemampuan menahan berat diatas 20 ton. Kapal yang biasa berlabuh disini adalah kapal LCT dan kapal motor penumpang.

Pelabuhan Gilimanuk beroperasi selama 24 jam setiap hari kecuali pada hari raya Nyepi. Aktivitas operasional pelabuhan ini harus sejalan dengan aktivitas operasional yang terdapat di Pelabuhan Ketapang karena jika salah satu dari pelabuhan tidak dapat beroperasi akan mempengaruhi aktivitas di pelabuhan pasangannya. Adapun pembagian jadwal untuk masing-masing armada sebagai berikut : Angkutan normal bongkar dari suatu kapal dibatasi hanya 15 menit; Angkutan normal muat dari suatu kapal dibatasi hanya 15 menit; Waktu persiapan yang disediakan untuk masing-masing kapal dibatasi selama 15 menit. Kapasitas parkir siap muat sebanyak 145 unit, terdiri dari 60 unit mobil sedan, 35 unit bus dan 50 unit truck. Sampai saat ini jumlah kapal yang

beroperasi sebanyak 30 unit dengan kapasitas muat per hari 8.051 penumpang dan 2.786 unit kendaraan

(2) Pelabuhan Penyeberangan Lintas Padangbai-Lembar

Sarana dan prasarana yang tersedia pada pelabuhan penyeberangan lintas Padangbai (Bali)-Lembar (NTB) sampai dengan tahun 2013 terdiri dari 2 unit dermaga, kapasitas parkir 120 unit terdiri dari 50 unit mobil sedan dan 70 unit bus/truk, dan jumlah kapal yang beroperasi 14 unit dengan kapasitas muat penumpang 2.326.800 orang dan kapasitas muat kendaraan 458.000 unit. Intensitas angkutan pelabuhan penyeberangan lintas Padangbai (Bali) - Lembar (Lombok) berdasarkan perkembangan lalu lintas muatan 2009 – 2013 untuk penumpang rata-rata naik 9,46%, barang naik 13,55% dan muatan kendaraan roda 2 naik 13,33% dan kendaraan roda 4 naik 4,18%.

(3). Pelabuhan Benoa

Pelabuhan Benoa terletak di Propinsi Bali secara administratif tercakup pada Kabupaten Badung dan Kota Denpasar atau tepatnya pada 1150 12' 30" garis Bujur Timur dan 080 44' 22" Lintang Selatan, yaitu di bagian selatan Pulau Bali atau tepatnya di Teluk Benoa Denpasar Selatan. Luas perairan pelabuhan teluk Benoa 227,6 ha dan lahan daratan 52,5 ha.

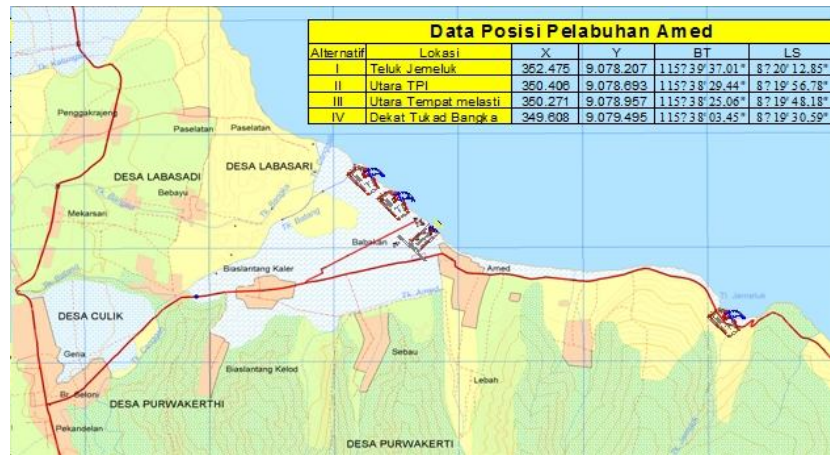
Sampai dengan tahun 2013 prasarana yang tersedia meliputi alur pelayaran dengan panjang 3.600 meter; lebar 150 meter dan kedalaman -9,50 meter Low Water Surface (LWS). Dermaga penumpang kapal cruises/container dengan panjang 290 meter dan kolam pelabuhan berukuran 150 x 400 m², kedalaman -9,00 m LWS; kolam pelabuhan dengan kedalaman -4,00 m LWS dengan fasilitas dermaga marina 30 meter; dermaga kapal Mabua 20 meter; dermaga kapal Bali Hai 20 meter; kolam pelabuhan 350 x 750 m² kedalaman -7,00 m LWS dengan fasilitas dermaga umum panjang 206 meter dan dermaga khusus Pertamina 2 unit panjang 40 meter; dermaga Kapal Perikanan Samudera Besar (PSB) panjang 60 meter; kolam pelabuhan khusus perikanan 150 x 900 m² dengan

kedalaman –5,0 m LWS dengan fasilitas dermaga beton 150 meter dan 8 unit dermaga swasta total panjang dermaga 403 meter; terminal penumpang 1.300 m²; terminal peti kemas 6.400 m² dan prasarana jalan masuk pelabuhan 23 m x 2,9 km. Pelabuhan benoa juga berfungsi sebagai pelabuhan ikan, ekspor dan impor dengan total tonnase barang mencapai 927.081 ton.

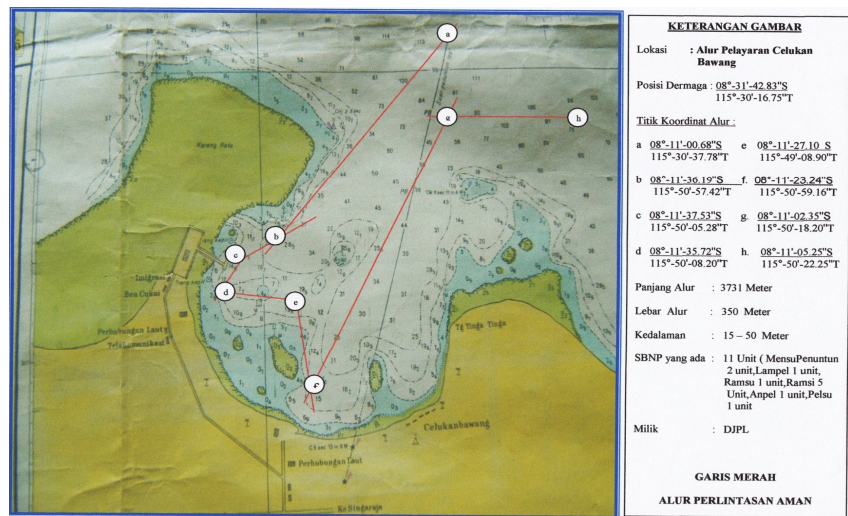
(4) . Pelabuhan Celukan Bawang

Pelabuhan Laut Celukan Bawang terletak di bagian Utara Pulau Bali. Pada Tahun 2013 prasarana yang tersedia terdiri atas 3 unit dermaga umum dengan panjang masing-masing 50 meter, 58 meter, dan 160 meter; dengan kedalaman kolam rata-rata –14,0 m LWS; batching plant Semen Tonasa dengan kapasitas 600.000 ton per tahun; lapangan penumpukan 5.600 m²; dan gudang penumpukan 90 m². Sesuai dengan kondisi prasarana yang tersedia, Pelabuhan Celukan Bawang mampu untuk melayani kapal barang dengan kapasitas maksimum 10.000 DWT atau setara dengan kapasitas kapal penumpang 20.000 DWT. sampai dengan bulan Nopember tahun 2013 jumlah bongkar barang mencapai 742.958 ton dan muat barang mencapai 581 ton. Total keseluruhan bongkar muat barang di pelabuhan Celukan bawang adalah 743.539 ton.

Pemerintah Provinsi Bali, bersama dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten kedepannya telah merencanakan pembangunan pelabuhan baru yakni Pelabuhan Amed di Kabupaten Karangasem serta dilakukan pengembangan terhadap pelabuhan-pelabuhan yang sudah ada seperti Pelabuhan Celukan Bawang di Kabupaten Buleleng. Pelabuhan Gunaksa di Kabupaten Klungkung, Pelabuhan Tanah Ampo di Kabupaten Karangasem.



Gambar 2.45
Rencana Pembangunan Pelabuhan Amed



Gambar 2.46
Rencana Pengembangan Pelabuhan Celukan Bawang

c. Sarana Prasarana Transportasi Udara

Sarana dan prasarana angkutan udara di Bali ditunjang oleh keberadaan Bandar Udara Ngurah Rai yang terletak di bagian Selatan Pulau Bali dan berfungsi untuk pelayanan penerbangan domestik dan internasional, serta lapangan terbang Letkol Wisnu yang terletak di bagian Utara Pulau Bali dan masih berfungsi untuk pelayanan pesawat sejenis Cassa.

Bandar Udara Internasional Ngurah Rai, mempunyai luas area 295,30 ha. Prasarana yang tersedia meliputi: landasan pacu (runway) 45 x 3.000 meter untuk pendaratan dan tinggal landas pesawat terbang kapasitas maksimum jenis B-747; parallel taxiway 23 x 3.000 meter dan exit taxiway 7 buah; tempat parkir pesawat (apron) seluas 214.457 m² dengan kapasitas 38 unit terdiri atas 9



unit jenis B-747, 2 unit jenis A-330, 2 unit jenis MD-11, dan 25 unit jenis A-320 untuk target penerbangan 81.100 pergerakan pesawat per tahun.

Selain itu juga tersedia terminal penumpang internasional seluas 63.246 m² untuk target penumpang 6.100.000 orang per tahun; terminal penumpang domestik 10.520 m² untuk target penumpang 3.400.000 orang per tahun; terminal kargo internasional seluas 2.680 m² untuk target 116.000 ton per tahun; terminal kargo domestik seluas 3.658 m² target 31.900 ton per tahun; car parking seluas 1.287 m², kapasitas 1.287 lot; sistem navigasi udara ILS; Rescue and Fire Fighting (ICAO) Category 9; fuel supply kapasitas 20,040 kl; water supply kapasitas 3.670 m³/detik; electric 4.190 KVA, dan akses road 2 jalur masing-masing 2 lajur.

3. Perbankan

Peranan perbankan dalam perekonomian bisa dibilang tidak terbantahkan. Bank di satu sisi adalah penghimpun dana masyarakat maupun perusahaan (sumber pembiayaan untuk modal/investasi) sementara disisi lain Bank juga menjadi penyalur dana bagi sektor-sektor produksi maupun kebutuhan konsumsi masyarakat. Secara umum, pola penyimpanan dana jenis simpanan berjangka deposito bank dalam rupiah maupun valuta asing masih merupakan pilihan utama masyarakat.

Berdasarkan data Kantor Bank Indonesia, Denpasar, posisi penggalangan dana pada akhir tahun 2013 untuk pola penyimpanan jenis ini mencapai Rp 22.065.275 juta. Jumlah ini naik 18,47 persen dari tahun 2012 senilai Rp 18.625.208 juta. Dari jumlah tersebut, Rp 10.591.146 juta (48,00 persen) tersimpan di bank pemerintah, Rp. 8.277.367 juta (37,51 persen) bank swasta nasional, dan Rp 3.196.763 juta (14,49 persen) di Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

Dari beberapa jenis deposito berjangka yang ada, deposito berjangka dengan tenggang waktu satu bulan masih merupakan pilihan utama dari sebagian besar masyarakat, di mana penggalangan dana pada deposito jenis ini mencapai Rp 9.137.705 juta atau 41,41 persen dari seluruh deposito berjangka yang ada. Dana-dana yang terkumpul dari masyarakat kemudian disalurkan kembali dalam bentuk pinjaman perbankan. memperlihatkan bahwa posisi pinjaman perbankan dalam



rupiah dan valas pada akhir tahun 2013 mencapai Rp 65.163.098 juta. Menurut jenis penggunaannya, baik itu penggunaan untuk bank pemerintah, bank swasta nasional, maupun BPR, total pinjaman terbesar digunakan untuk pinjaman modal kerja dan konsumsi sementara yang digunakan untuk investasi masih relatif kecil yaitu hanya sebesar 27,32 persen.

4. Hotel dan Restoran

Perkembangan Hotel Berbintang di Provinsi Bali dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 terus mengalami peningkatan dari sebanyak 155 hotel pada tahun 2010 menjadi 277 hotel pada tahun 2013 dengan jumlah kamar mencapai sebanyak 24.860 kamar.

Tabel 2.46
Banyaknya Hotel Berbintang di Bali Menurut Lokasi dan Kelas Hotel Tahun 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | Kelas Hotel / Hotel Class | | | | | Jumlah Total |
|--------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Bintang 5 5 Star | Bintang 4 4 Star | Bintang 3 3 Star | Bintang 2 2 Star | Bintang 1 1 Star | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Jembrana | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 2. Tabanan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 3. Badung | 40 | 46 | 37 | 12 | 11 | 146 |
| 4. Gianyar | 6 | 7 | 3 | 1 | 1 | 18 |
| 5. Klungkung | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 6. Bangli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Karangasem | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| 8. Buleleng | 1 | 2 | 8 | 2 | 1 | 14 |
| 9. Denpasar | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 31 |
| Jumlah / Total : | 54 | 62 | 63 | 24 | 24 | 227 |
| 2012 | 52 | 59 | 59 | 25 | 23 | 218 |
| 2011 | 51 | 53 | 52 | 23 | 19 | 198 |
| 2010 | 37 | 48 | 35 | 26 | 9 | 155 |
| 2009 | 37 | 41 | 35 | 27 | 9 | 149 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.47
Banyaknya Kamar yang Tersedia pada Hotel Berbintang di Bali Menurut Lokasinya Tahun 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | Banyaknya Kamar yang Tersedia / Kelas Hotel Number of Rooms Available / Hotel Class | | | | | Jumlah Total |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|
| | Bintang 5 5 Star | Bintang 4 4 Star | Bintang 3 3 Star | Bintang 2 2 Star | Bintang 1 1 Star | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| 1. Jembrana | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 77 |
| 2. Tabanan | 326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 |
| 3. Badung | 8 834 | 5 935 | 2 931 | 831 | 364 | 18 895 |
| 4. Gianyar | 362 | 219 | 68 | 10 | 20 | 679 |
| 5. Klungkung | 0 | 0 | 62 | 12 | 48 | 122 |
| 6. Bangli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Karangasem | 33 | 132 | 88 | 14 | 20 | 287 |
| 8. Buleleng | 32 | 92 | 352 | 45 | 40 | 561 |
| 9. Denpasar | 1 590 | 1 085 | 467 | 473 | 298 | 3 913 |
| Jumlah / Total : | 11 177 | 7 463 | 4 045 | 1 385 | 790 | 24 860 |
| 2012 | 10 803 | 7 548 | 3 729 | 1 351 | 784 | 24 215 |
| 2011 | 10 469 | 6 887 | 3 215 | 1 340 | 883 | 22 794 |
| 2010 | 10 462 | 6 064 | 2 485 | 1 676 | 446 | 21 133 |
| 2009 | 8 977 | 5 349 | 2 299 | 1 782 | 277 | 18 684 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014



Sementara itu restoran dan rumah makan, dari tahun ke tahun juga mengalami kecenderungan meningkat. Sampai dengan tahun 2013, jumlah restoran dan rumah makan di Bali sebanyak 1.069 buah dengan daya tampung/kapasitas tempat duduk sebanyak 41.843 kursi.

Tabel 2.48
Banyaknya Restoran dan Rumah Makan Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2009 - 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | Tahun / Year | | | | |
|--------------------------------|--------------|-------|-------|-------|-------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Jembrana | 133 | 134 | 136 | 136 | 136 |
| 2. Tabanan | 78 | 79 | 39 | 40 | 40 |
| 3. Badung | 635 | 629 | 625 | 623 | 96 |
| 4. Gianyar | 244 | 242 | 242 | 238 | 378 |
| 5. Klungkung | 28 | 37 | 39 | 39 | 31 |
| 6. Bangli | 43 | 40 | 39 | 39 | 17 |
| 7. Karangasem | 99 | 95 | 95 | 95 | 246 |
| 8. Buleleng | 63 | 53 | 53 | 53 | 53 |
| 9. Denpasar | 370 | 376 | 377 | 76 | 72 |
| Jumlah / Total : | 1 693 | 1 685 | 1 645 | 1 339 | 1 069 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

Tabel 2.49
Banyaknya Tempat Duduk dari Restoran dan Rumah Makan Dirinci Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2009 - 2013

| Kabupaten/Kota Regency/City | Tahun / Year | | | | |
|--------------------------------|--------------|--------|--------|--------|--------|
| | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Jembrana | - | - | - | - | - |
| 2. Tabanan | - | - | - | 470 | 470 |
| 3. Badung | 42 558 | 42 076 | 41 864 | 41 744 | 7 836 |
| 4. Gianyar | 9 876 | 9 844 | 9 777 | 9 556 | 13 955 |
| 5. Klungkung | 960 | 1 168 | 1 198 | 1 198 | 951 |
| 6. Bangli | 3 811 | 3 001 | 3 040 | 3 136 | 3 610 |
| 7. Karangasem | 3 407 | 3 222 | 3 222 | 3 222 | 6 229 |
| 8. Buleleng | 2 670 | 2 145 | 2 117 | 2 117 | 2 117 |
| 9. Denpasar | 19 381 | 19 623 | 19 771 | 7 025 | 6 675 |
| Jumlah / Total : | 82 663 | 81 079 | 80 989 | 68 468 | 41 843 |

Sumber : Bali Dalam Angka Tahun 2014

5. Listrik dan Air Bersih

Rasio ketersediaan daya listrik pada Tahun 2010 adalah sebesar 64,72%, Tahun 2011 sebesar 68,86%, Tahun 2012 sebesar 74,54%, Tahun 2013 dan Tahun 2014 masing-masing sebesar 78,13% dan 85,12%. Dan untuk capaian kinerja presentase rumah tangga yang menggunakan listrik di Bali pada Tahun 2010 adalah sebesar 64,72%, Tahun 2011 sebesar 68,86%, Tahun 2012 sebesar 74,54%, Tahun 2013 sebesar 77,15% dan pada Tahun 2014 adalah sebesar 80,37%. Data capaian tersebut diatas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral

| No | Indikator | Capaian Kinerja Setiap Tahun | | | | |
|----|--|------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Rasio Ketersediaan Daya Listrik | 64,72% | 68,86% | 74,54% | 78,13% | 85,12% |
| 2 | Presentase rumah tangga yang menggunakan listrik | 64,72% | 68,86% | 74,54% | 77,15% | 80,37% |

Sumber : Bidang ESDM Dinas PU Provinsi Bali Tahun 2015

Seperti disebutkan sebelumnya bahwa sampai saat ini tingkat pelayanan air bersih perpipaan di perkotaan telah mencapai 81,29%, dilayani melalui sambungan rumah 137.744, sambungan dan keran umum/hidran umum sebanyak 730 sambungan. Tingkat pelayanan tertinggi untuk air bersih perpipaan di perkotaan berada di Kabupaten Buleleng (97,27 %) dan terendah di Kabupaten Karangasem (43,28 %). Sementara itu pelayanan air bersih perdesaan dengan sistem perpipaan sampai saat ini melayani 68,72% penduduk perdesaan dengan pelayanan tertinggi berada di Kabupaten Gianyar 95,96% dan terendah di Kabupaten Jembrana 35,42%

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Dalam memacu pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Bali mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia dalam upaya peningkatan penanaman modal atau investasi untuk mengolah potensi ekonomi menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan modal yang berasal baik dari dalam maupun luar negeri.

Tingkat investasi dipengaruhi oleh banyak faktor dan salah satu diantaranya adalah situasi keamanan, ketentraman, stabilitas sosial dan politik di wilayah Bali. Dengan terciptanya iklim investasi yang kondusif maka diharapkan akan mampu mendorong minat investor untuk berinvestasi di daerah Bali.

Saat ini kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah Bali relatif aman, stabil dan terkendali. Namun demikian masih sering terjadi tindakan kriminal seperti kasus narkoba, pembunuhan, kejahatan seksual, penganiayaan, pencurian, pemalsuan uang dan lainnya,

Minat investor untuk menanamkan modalnya sangat dipengaruhi oleh sering tidaknya terjadi kekacauan di suatu wilayah khususnya daerah Bali seperti adanya unjuk rasa/demo masalah politik, ekonomi, pemogokan kerja.

Saat ini kondisi keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah Bali relatif aman, stabil dan terkendali. Sepanjang tahun 2013, jumlah perkara pidana yang masuk ke pengadilan tinggi Bali sebanyak 2.266 kasus atau menurun 11,28 persen dari tahun lalu yang mencapai 2.554 kasus. Pada bagian lain, jumlah perkara pidana yang diputuskan mencapai 2.321 kasus atau turun 6,97 persen dari tahun lalu sebanyak 2.495 kasus. Sementara itu, jumlah perkara perdata yang masuk selama tahun 2013 sebanyak 1.631 kasus atau mengalami kenaikan 4,69 persen dari tahun lalu sebanyak 1.558 kasus. Sedangkan perkara perdata yang diputuskan sebanyak 1.697 kasus atau meningkat 14,51 persen dari tahun sebelumnya 1.482 kasus. Pada konteks lain, jumlah pelanggaran lalu lintas berdasarkan laporan Kepolisian Daerah Bali sepanjang tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 4,74 persen atau sebanyak 69.101 kasus. Dari sisi kenakalan remaja/penyalahgunaan narkoba di wilayah Bali terjadi 842 kasus selama tahun 2013. Angka ini turun 2,77 persen dari tahun sebelumnya yang mencapai 866 kasus.

2.1.4.2 Sumber Daya Manusia

Berdasarkan angka proyeksi penduduk tahun 2014 tercatat jumlah penduduk di Bali sebanyak 4.104,9 ribu jiwa yang terdiri dari 2.066,7 ribu jiwa (50,35%) penduduk laki-laki dan 2.038,2 ribu jiwa (49,65%) penduduk perempuan. Penduduk Bali terbanyak ada pada kelompok umur (5-9 tahun) yakni mencapai 352,3 ribu jiwa atau 8,58 persen, diikuti pada kelompok umur (10-14) tahun sebanyak 337,5 ribu jiwa atau 8,22 persen, kelompok umur (35-39) tahun sebanyak 333,6 ribu jiwa atau 8,12 persen dan kelompok umur tua (>64 tahun) sebanyak 194,7 ribu jiwa atau 4,74%.

Kemudian dilihat dari pendidikan, sampai dengan tahun 2013 tingkat pendidikan penduduk Bali didominasi tamatan SLTA sederajat sebesar 32,86 persen, tamatan SD sederajat sebesar 25,12 persen, tamatan SLTP sederajat sebesar 18,55 persen dan tamatan Diploma dan Sarjana sebesar 11,47 persen. Sementara yang tidak menamatkan pendidikan sama sekali hanya sebesar 12,01 persen.



Tabel 2.51
Persentase Penduduk Usia 15 Tahun ke Atas Menurut Ijasah Tertinggi yang Ditamatkan dan Kabupaten/Kota di Bali Tahun 2013

| Kabupaten / Kota <i>Regency / City</i> | Ijasah Tertinggi yang Dimiliki / <i>Educational Attainment</i> | | | | | |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| | Tidak Punya | SD Sederajat | SLTP Sederajat | SLTA Sederajat | DI / DII / DIII | DIV / S1 / S2 / S3 |
| | <i>Not Belonging</i> | <i>Elementary Schools</i> | <i>Junior High Schools</i> | <i>Senior High</i> | <i>Diploma I / II / III</i> | <i>Diploma IV / S1 / S2 / S3</i> |
| | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. Jembrana | 13,71 | 38,47 | 19,15 | 24,25 | 1,15 | 3,27 |
| 2. Tabanan | 12,29 | 27,95 | 20,09 | 30,52 | 4,12 | 5,03 |
| 3. Badung | 8,52 | 19,78 | 13,99 | 41,92 | 7,03 | 8,77 |
| 4. Gianyar | 10,44 | 21,43 | 19,65 | 37,26 | 4,16 | 7,06 |
| 5. Klungkung | 16,06 | 25,88 | 20,95 | 29,32 | 2,76 | 5,03 |
| 6. Bangli | 11,82 | 45,10 | 19,79 | 17,97 | 2,04 | 3,29 |
| 7. Karangasem | 22,37 | 33,11 | 19,71 | 19,53 | 1,68 | 3,61 |
| 8. Buleleng | 20,98 | 30,22 | 22,26 | 22,00 | 1,61 | 2,93 |
| 9. Denpasar | 3,97 | 14,12 | 16,43 | 44,53 | 7,31 | 13,64 |
| BALI | 12,01 | 25,12 | 18,55 | 32,86 | 4,34 | 7,13 |

Sumber : BPS Provinsi Bali

2.2 Evaluasi Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintah sampai Tahun 2014 dan Realisasi RPJMD

Target Pembangunan Provinsi Bali tahun 2013-2018 telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sesuai Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2014, dan evaluasi tahun 2014 merupakan tahun pertama yang merupakan “tonggak awal” pencapaian pembangunan untuk lima tahun ke depan.

Berdasarkan RPJMD tersebut diatas, Pemerintah Provinsi Bali dalam setiap tahunnya telah melaksanakan 26 Urusan Wajib dan 7 Urusan Pilihan. Program-program dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RKPD, KUA, PPAS, dan APBD. Adapun evaluasi hasil penyelenggaraan capaian urusan pemerintahan daerah sampai dengan tahun 2014 disesuaikan target yang ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Bali Tahun 2008-2013, yaitu sebagai berikut :



Tabel 2.52
Evaluasi Indikator Kinerja Daerah Terhadap
Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Provinsi Bali

| NO | ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH | *Kondisi Kinerja Awal Periode RPJMD* | capaian 2013 | Target Capaian Kinerja Tahun 2014 | | TARGET TAHUN 2015 | TARGE T TAHUN 2016 |
|-------|---|--|-----------------|--------------------------------------|-----------|-------------------------|-----------------------------|
| | | | | target | realisasi | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) |
| A. | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | |
| A.1 | Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | |
| A.1.1 | Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | |
| | 1. Pertumbuhan PDRB | 6,65 | 6,05 | 6,08-6,73 | 6,72 | 6,44-7,13 | 6,83- 7,56 |
| | 2. Laju Inflasi | 4,71 | 7,35 | 5,70 – 6,22 | 8,43 | 4,40 – 4,74 | 5,53 – 5,95 |
| | 3. PDRB per Kapita harga berlaku (jt/th) | 20,8 | | 26,36 - 28,58 | 33,13 | 29,37 - 30,05 | 33,26 - 34,34 |
| | 4. Indeks Gini | 0,402 | 0,4 | 0,367-0,356 | 0,4220 | 0,346- 0,333 | 0,325- 0,310 |
| | 5. Persentase penduduk miskin | 3,95 | 4,49, | 3,90-3,82 | 4,76 | 3,86-3,78 | 3,83- 3,75 |
| | 6. Index Pembangunan Manusia (IPM) | 73,49 | 74,11 | 74,46-74,67 | BT | 74,91- 75,22 | 75,35- 75,75 |
| | 7. Angka Kriminalitas (jumlah kasus/10.000 penduduk) | 21,00 | 0,84 | 15,00 | BT | 14,00 | 13,00 |
| A.2. | Fokus Kesejahteraan Masyarakat | | | | | | |
| A.2.1 | Bidang Urusan Pendidikan | | | | | | |
| | 1. Angka Melek Huruf | 89.17 | 97,03 | 89.42 | 95,48 | 89.67 | 89.92 |
| | 2. Angka rata-rata lama sekolah | 8.62 | 8,58 | 8.87 | 8,4 | 9.12 | 9.37 |
| | 3. Angka partisipasi kasar | | | | | | |
| | a SD/MI/Paket A | 108.52 | 107,89 | 108.95 | 107,97 | 109.45 | 110.00 |
| | b SMP/MTs/Paket B | 103.51 | 106,73 | 104.25 | 106,74 | 105.50 | 106.95 |
| | c SMA/SMK/MA/Paket C | 87.44 | 92,4 | 89.00 | 101,40 | 90.60 | 91.80 |
| | 4. Angka pendidikan yang ditamatkan | | | | | | |
| | a SD/MI/Paket A | 93.93 | 100,00 | 94.75 | 100,00 | 95.80 | 96.90 |
| | b SMP/MTs/Paket B | 100,00 | 99,61 | 100,00 | 99,96 | 100,00 | 100,00 |
| | c SMA/SMK/MA/Paket C | 94.84 | 99,95 | 95.66 | 99,64 | 96.75 | 97.50 |
| | 5. Angka partisipasi murni | | | | | | |



| | | | | | | | | |
|-------|------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | a | SD/MI/Paket A | 98.50 | 95,29 | 98.60 | 97,21 | 98.65 | 99.00 |
| | b | SMP/MTs/Paket B | 82.89 | 85,24 | 82.90 | 86,85 | 83.00 | 84.05 |
| | c | SMA/SMK/MA/Paket C | 65.98 | 77,11 | 66.00 | 76,13 | 67.00 | 68.00 |
| A.2.2 | Bidang Urusan Kesehatan | | | | | | | |
| | 1. | Angka kematian bayi | 29 | 5,5 | | 5,86 | | |
| | 2. | Angka usia harapan hidup | 70,78 | 71,2 | 70,80 - 70,84 | | 71,09 - 71,14 | 71,51 - 71,58 |
| | 3. | Balita gizi buruk | 86 bayi (1.7%) | 0,31% | 1,5% | 96 Bayi | 1,4% | 1,3% |
| A.2.3 | Bidang Urusan Ketanagakerjaan | | | | | | | |
| | 1. | Rasio penduduk yang bekerja (%) | 98,11 | 98,2 | 98,355 | 98,09 | 98,65 | 99.00 |
| | 2. | Tingkat Pengangguran (%) | 2,04 | 1,79 | 1,95 - 2,01 | 1,90 | 1,96 - 2,00 | 1,88 - 1,96 |
| A.3. | Fokus Seni Budaya dan Olah raga | | | | | | | |
| A.3.1 | Bidang Urusan Kebudayaan | | | | | | | |
| | 1. | Jumlah grup kesenian | 11.851 | 2.878 | 11.875 | 2.893 | 11.890 | 11.900 |
| | 2. | Jumlah gedung kesenian | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 13 |
| A.3.2 | Bidang Urusan Pemuda dan Olah Raga | | | | | | | |
| | 1. | Jumlah klub olahraga | 2059 | 120 | 2059 | 2.059 | 2059 | 2059 |
| | 2. | Jumlah gedung olahraga | 69 | 21 | 69 | 69 | 70 | 70 |
| B. | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | |
| B.1. | Fokus Pelayanan Urusan Wajib | | | | | | | |
| B.1.1 | Bidang Urusan Pendidikan | | | | | | | |
| - | Pendidikan dasar | | | | | | | |
| | 1. | Angka partisipasi sekolah | | | | | | |
| | 1 | SD/MI/Paket A | 98.50 | 99,27 | 98.60 | 92,69 | 98.70 | 98.80 |
| | 2 | SMP/MTs/Paket B | 82.89 | 95,83 | 83.04 | 95,26 | 83.14 | 83.29 |
| | 2. | Rasio ketersediaan sekolah | | | | | | |
| | 1 | SD/MI (per 10.000 jml pend.) | 62.00 | 64,57 | 62.15 | 62,70 | 62.35 | 62.50 |
| | 2 | SMP/MTs (per 10.000 jml pend.) | 24.00 | 22,87 | 24.10 | 23,55 | 24.25 | 24.35 |
| | 3. | Rasio guru-murid | | | | | | |
| | 1 | SD/MTs (per 1.000 murid) | 27.41 | 17,19 | 27.56 | 26,47 | 27.66 | 27.76 |



| | | | | | | | | |
|-------|--------------------------------------|---|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | 2 | SMP/MTs (per 1.000 murid) | 13.87 | 10,65 | 13.97 | 12,17 | 14.07 | 14.17 |
| - | Pendidikan Menengah | | | | | | | |
| | 1 | Angka partisipasi sekolah | 65.98 | 70,98 | 66.08 | 76,13 | 66.18 | 66.28 |
| | 2 | Rasio ketersediaan sekolah (per 10.000 jml pend.) | 10.00 | 19,46 | 20.00 | 80,29 | 30.00 | 40.00 |
| | 3 | Rasio guru-murid | | | | | | |
| | 1 | SMA/MA (per 1.000 murid) | 78.18 | 104,52 | 78.28 | 80,84 | 78.43 | 78.58 |
| | 2 | SMK (per 1.000 murid) | 68.35 | 101,28 | 66.50 | 71,59 | 66.65 | 66.80 |
| - | Fasilitas pendidikan (%) | | | | | | | |
| | 1 | Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik | 56.03 | 91,86 | 61.63 | 74,36 | 67.79 | 74.57 |
| | 2 | Sekolah pendidikan SMA/MA/SMK kondisi baik | 50.58 | 72,34 | 55.63 | 90,29 | 61.20 | 67.32 |
| - | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) (%) | | | | | | | |
| | 1 | Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | 58.64 | | 64.50 | 67,92 | 70.95 | 78.04 |
| - | Angka Putus Sekolah (%) | | | | | | | |
| | 1 | Angka Putus Sekolah SD/MI | 0.12 | 0,098 | 0.10 | 0,09 | 0.09 | 0.08 |
| | 2 | Angka Putus Sekolah SMP/MTs | 0.31 | 0,23 | 0.30 | 0,16 | 0.29 | 0.28 |
| | 3 | Angka Putus Sekolah SMA/SMK/MA | 0.23 | 0,56 | 0.22 | 0,29 | 0.21 | 0.20 |
| - | Angka Kelulusan (%) | | | | | | | |
| | 1 | Angka Kelulusan SD/MI | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| | 2 | Angka Kelulusan SMP/MTs | 99,75% | | 99,75% | 99,80% | 99,75% | 99,75% |
| | 3 | Angka Kelulusan SMA/SMK/MA | 99,95% | | 99,95% | 99,70% | 99,95% | 99,95% |
| | 4 | Angka Melanjutkan SD/MI ke SMP/MTs | 80,00% | 78,14% | 80,00% | 99,42% | 80,00% | 80,00% |
| | 5 | Angka Melanjutkan SMP/MTs ke SMA/SMK/MA | 70,00% | 97,19% | 70,00% | 95,94% | 70,00% | 70,00% |
| | 6 | Guru yg memenuhi kualifikasi S1/D-IV | 70,00% | 74,00% | 75,00% | 78,00% | 80,00% | 85,00% |
| B.1.2 | Bidang Urusan Kesehatan | | | | | | | |
| | 1. Rasio posyandu per satuan balita | | 14,038 | | 14,038 | 14,038 | 14,038 | 14,038 |
| | 2. - Rasio puskesmas/1000 pddk | | 0,030 | 0,028 | 0,030 | 0,030 | 0,030 | 0,031 |
| | - Rasio poliklinik/1000 pdk | | 0,032 | | 0,032 | 0,027 | 0,032 | 0,032 |
| | - Rasio Pustu/1000 pddk | | 0,13 | 0,122 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |



| | | | | | | | |
|--------------|--|--------|---------|--------|--------|--------|--------|
| | 3. Rasio rumah sakit per satuan penduduk/1000 pddk | 0,013 | 0,0121 | 0,013 | | 0,013 | 0,014 |
| | 4. Rasio dokter per satuan penduduk | | | | | | |
| | a. Rasio dokter Spesialis/100.000 pddk | 9,32 | 16,97 | 9,32 | 17,5 | 9,321 | 9,322 |
| | b. Rasio dokter umum/100.000 pddk | 23,77 | 27,93 | 23,77 | 27,5 | 23,775 | 23,78 |
| | c. Rasio dokter gigi/100.000 pddk | 7,91 | 8,28 | 7,91 | 8,4 | 7,915 | 7,92 |
| | 5. Rasio tenaga medis/100.000 penduduk | 40,99 | 244,64 | 41,000 | | 41,050 | 41,100 |
| | a. Rasio bidan/100.000 pddk | | | | 71,6 | | |
| | b. Rasio perawat/100.000 pddk | | | | 123,2 | | |
| | 6. Cakupan komplikasi kebidanan yang tertangani | 65,15 | | 80% | 77,07% | 80% | 80% |
| | 7. Cakupan pertolongan persalinan ditolong tenaga kesehatan | 95,73 | | 100% | 97,63% | 100% | 100% |
| | 8. Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) | 96,21% | | 100% | 96,5% | 100% | 100% |
| | 9. Cakupan balita gizi buruk tertangani | 100% | | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 10. Cakupan penemuan dan penanganan penderita TBC BTA(%) | 78% | 8,959,% | 78% | 71,5% | 78% | 70% |
| | 11. Cakupan penemuan dan penanganan penderita HIV-AIDS (%) | 30% | | 30% | | 40% | 60% |
| | 12. Cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD | 100 | 96,05 | 100% | 88% | 100% | 100% |
| | 13. Cakupan Pengguna JKBM | 58,19 | 84,58 | 100% | 83,1% | 100% | 100% |
| | 14. Cakupan kunjungan puskesmas | 62,35% | | 62,35% | 72,48% | 62,40% | 62,50% |
| B.1.3 | Bidang Urusan Pekerjaan Umum | | | | | | |
| | 1. Proporsi panjang jaringan jalan provinsi dalam kondisi mantap | 86 | 83 | 86,45 | 82,64 | 88,04 | 90,62 |
| | 2. Rasio jaringan irigrasi | 53,2 | 41,05 | 55,00 | 56,85 | 60,00 | 65,00 |
| | 3. Persentase rumah tinggal bersanitasi | 62,41 | | 63,66 | | 64,93 | 66,23 |
| | 4. Rasio tempat pembuangan sampah/TPS (per 1000 pend.) | 79,36 | | 79,45 | | 79,55 | 79,70 |
| | 5. Drainase dalam kondisi baik | 70,00 | | 70,00 | | 70,00 | 80,00 |
| | 6. Luas irigasi kab. dalam kondisi baik | 96,15 | | 98,53 | | 98,53 | 98,53 |
| B.1.4 | Bidang Urusan Perumahan | | | | | | |
| | 1. - Cakupan pelayanan air minum perkotaan | 65,00 | | 70,00 | | 75,00 | 80,00 |



| | | | | | | | |
|-------|--|-------------|---------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| | - Cakupan pelayanan air minum perdesaan | 55,00 | | 58,00 | | 62,00 | 65,00 |
| | 2. Rumah tangga pengguna listrik (RT) | 846728,00 | 856.498,00 | 905998,00 | 923.373,00 | 969417,00 | 1037276,00 |
| | 3. Lingkungan pemukiman yang tertata (%) | 25,00 | | 35,00 | | 45,00 | 55,00 |
| | 4. Persentase cakupan Bedah Rumah (rumah layak huni) | 36,57% | 1302 unit 60% | 2.500 Unit | 60% | 3.350 Unit | 3.350 Unit |
| B.1.5 | Bidang Urusan Penataan Ruang | | | | | | |
| | 1. Persentase ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB (RTH Publik) | 20,00 | | 22,00 | | 22,00 | 24,00 |
| | 2. Persentase bangunan yg ber-IMB persatuan bangunan | 75,00 | | 75,00 | | 75,00 | 75,00 |
| B.1.6 | Bidang Urusan Perencanaan Pembangunan | | | | | | |
| | 1. Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% |
| | 2. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% |
| | 3. Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% |
| | 4. Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD (%) | 100% | 100% | 100% | | 100% | 100% |
| B.1.7 | Bidang Urusan Perhubungan | | | | | | |
| | 1. Jumlah arus penumpang angkutan umum | | | | | | |
| | a Dengan Angkutan Bus | NA | | - | 12.572.272 | - | - |
| | b Dengan Angkutan Kapal Laut | 10643550 | | 11294889 | 15.781.597 | 11948037 | 12647337 |
| | c Dengan Pesawat Udara | 15655557,74 | 8.658.711 | 17064557,93 | 2.491 | 18600368,14 | 20274401,28 |
| | 2. Ijin trayek | NA | | - | | - | - |
| | 3. Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis | | | | | | |
| | a Pelabuhan Laut | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | b Bandara Udara | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | c Terminal Bis | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| | 4. Jumlah Angkutan darat | 239701 | | 242098,01 | 88.347 | 244518,9901 | 246964,18 |
| | 5. Jumlah Pemasangan rambu-rambu | 401,5 | | 442 | 211 | 486 | 535 |
| B.1.8 | Bidang Urusan Lingkungan Hidup | | | | | | |
| | 1. Persentase penanganan sampah | 67,10 | 53,00 | 70,00 | 65,00 | 72,00 | 76,00 |



| | | | | | | | | |
|--------|----|--|---------------|--------|--------|------------------------------------|--------|--------|
| | | 2. Persentase Penduduk berakses air minum | 80,43 | 55,00 | 81,00 | PU | 82,00 | 83,00 |
| | | 3. Pencemaran status mutu air sungai utama | status sedang | 100,00 | baik | kurang baik hasil diatas baku mutu | baik | baik |
| | | 4. Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal (%) | 100,00 | 90,48 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| | | 5. Persentase tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk | 79,36% | | 79,45% | PU | 79,55% | 79,70% |
| | | 6. Penegakan hukum lingkungan (%) | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| B.1.9 | | Bidang Pengelolaan Bencana | | | | | | |
| | 1. | Jumlah Dokumen yang tersedia guna kesiapsiagaan PB | - | 100% | 2 | 100% | 2 | 2 |
| | 2. | Jumlah Peta evakuasi tsunami/Peta dan rambu rawan bencana yang tersusun dan dipasang pada daerah rawan bencana untuk pemantauan dan kesiapsiagaan PB | - | 100% | 34 | 100% | 34 | 34 |
| | 3. | Peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat dalam kesiapsiagaan menghadapi PB (%) | - | 100% | 20% | 100% | 20% | 20% |
| | 4. | Jumlah Terbentuknya Desa tangguh guna kesiapsiagaan menghadapi bencana | - | 100% | 1 | 100% | 1 | 1 |
| | 5. | Jumlah Daerah beresiko yang terpantau dan siapsiaga menghadapi bencana | - | 100% | 9 | 100% | 9 | 9 |
| | 6. | Jumlah menera yang efektif menjalankan fungsi pelayanan Tsunami early warning sistem | - | 100% | 6 | 100% | 6 | 6 |
| | 7. | Prosentase kejadian bencana yang terpenuhi pelayanan tanggap darurat dan logistik | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 8. | Prosentase tertanganinya bantuan pasca bencana secara cepat dan tepat sasaran sesuai laporan data yang benar dan akurat | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| | 9. | Prosentase kerusakan dan kerugian pasca bencana per tahun yang termonitor dengan laporan pemantauannya | - | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| B.1.10 | | Bidang Urusan Pertanahan | | | | | | |
| | | 1. Persentase luas lahan bersertifikat (jumlah tanah bersertifikat) | 51,80 | 54,12 | 56,00 | 55,75 | 58,00 | 60,00 |



| | | | | | | | |
|--------|---|---------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 2. Persentase penyelesaian kasus tanah Negara | 60,00 | - | 65,00 | - | 68,00 | 70,00 |
| | 3. Persentase penyelesaian izin lokasi | 75,00 | - | 78,00 | - | 80,00 | 82,00 |
| B.1.11 | Bidang Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil | | | | | | |
| | 1. Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk | | 0,62 | 0,82 | | 0,85 | 0,88 |
| | 2. Persentase kepemilikan KTP | | | 82 | | 85 | 88 |
| | 3. Rasio bayi berakte kelahiran | 46,23% (2008) | | 50% | | 55% | 60,00% |
| | 4. Persentase pasangan berakte nikah | 50% | | 55% | | 60% | 65,00% |
| | 5. Ketersediaan database kependudukan skala provinsi | ada | | ada | | ada | ada |
| | 6. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK | sudah | | sudah | | sudah | sudah |
| B.1.12 | Bidang Urs. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | |
| | 1. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah | 39,00 | 43,75% | 39,30% | 44,18% | 39,50% | 39,70% |
| | 2. Partisipasi perempuan di lembaga swasta | 45,50 | 45,45% | 45,80% | 44,39% | 46,00% | 47,00% |
| | 3. Persentase KDRT | 0,70% | 0,051% | 0,006 | 0,051% | 0,005 | 0,004 |
| | 4. Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur | | | | | | |
| | 5. Partisipasi angkatan kerja perempuan | 45,47% | 45,95% | 47% | 48,25% | 50% | 53% |
| | 6. Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| B.1.13 | Bidang Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera | | | | | | |
| | 1. Total Fertility Rate (TFR) | 2,3 | | 2,2 | | 2,2 | 2,1 |
| | 2. Persentase current user pemakai kontrasepsi modern | 59,6% | 84,75 | 60,68% | 82,94 | 61,76% | 62,84% |
| | 3. Proporsi pemakai kontrasepsi jangka panjang | 25,3% | 53,41 | 27,30% | 50,86 | 29,30% | 31,30% |
| | 4. Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I | 17,39 | 17,17 | 15,00% | 16,35% | 10,00% | 7,00% |
| B.1.14 | Bidang Urusan Sosial | | | | | | |
| | 1. Jumlah Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi | 77 | 93,00 | 77 | 80,00 | 77 | 77 |



| | | | | | | | |
|--------|---|---------|---------|-------------|---------|-------------|-------------|
| | 2. PMKS yg memperoleh bantuan sosial (%) | 3,99 | 4,10 | 5% | 52,01 | 7% | 10% |
| | 3. Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%) | 1,95 | 2,50 | 3% | 3,93 | 5% | 7% |
| B.1.15 | Bidang Urusan Ketenagakerjaan | | | | | | |
| | 1. Rasio penduduk yang bekerja (%) | 98,11 | 98,2 | 98,355 | 98,09 | 98,65 | 99,00 |
| | 2. Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun (%) | 2,11 | 1,90 | 2,00 | 2,00 | 1,95 | 1,75 |
| | 3. Tingkat partisipasi angkatan kerja | 78,91 | 84,67 | 80,00 | 74,91 | 85,00 | 90,00 |
| | 4. Pencari kerja yang ditempatkan (%) | 64,79 | | 70,00 | | 80,00 | 90,00 |
| | 5. Tingkat pengangguran terbuka | 2,04 | 1,79 | 1,95 - 2,01 | | 1,96 - 2,00 | 1,88 - 1,96 |
| B.1.16 | Bidang Urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | |
| | 1. Persentase koperasi aktif | 90,19 | 90,28 | 91,00 | 88,92 | 92,00 | 93,00 |
| | 2. Jumlah UKM non BPR/LK UKM | 262.560 | 265.558 | 270.000 | 265.558 | 275.000 | 280.000 |
| | 3. Usaha Mikro dan Kecil | 262000 | | 1000 | | 1000 | 1000 |
| B.1.17 | Bidang Urusan Penanaman Modal | | | | | | |
| | 1. Jumlah investor (PMDN+PMA) | 6033 | 4.428 | 4180 | 5262 | 5200 | 6225 |
| | a PMDN (Proyek) | 5738 | 5.299 | 4000 | 5017 | 5000 | 6000 |
| | b PMA (Proyek) | 295 | 197 | 180 | 245 | 200 | 225 |
| | 2. Jumlah nilai inventasi PMDN dan PMA (trilyun rupiah) | 12,10 | 11 | 6,70 | 6,99 | 9,51 | 11,79 |
| | 3. Rasio daya serap tenaga kerja | 40250 | 1.610 | 28644 | 23.253 | 35633 | 42657 |
| B.1.18 | Bidang Urusan Kebudayaan | | | | | | |
| | 1. Penyelenggaraan festival seni dan budaya | 30,00 | 32,00 | 35,00 | 40,00 | 40,00 | 45,00 |
| | 2. Jumlah Sarana penyelenggaraan seni dan budaya | 2871 | 10 | 2871 | 1.684 | 2871 | 2871 |
| | 3. Jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan | 502 | 17.596 | 502 | 17.596 | 502 | 502 |
| B.1.19 | Bidang Urusan Kepemudaan dan Olahraga | | | | | | |
| | 1. Jumlah organisasi pemuda | 4451,00 | | 4451,00 | | 4451,00 | 4451,00 |
| | 2. Jumlah organisasi olahraga | 50,00 | 120,00 | 50,00 | | 50,00 | 50,00 |



| | | | | | | | |
|--------|---|----------|---------|----------|----|----------|----------|
| | 3. Jumlah kegiatan kepemudaan | 39,00 | 19,00 | 45,00 | | 50,00 | 55,00 |
| | 4. Jumlah kegiatan olahraga | 62,00 | 30,00 | 65,00 | | 70,00 | 75,00 |
| | 5. Jumlah Lapangan / gelanggang olahraga | 69,00 | | 69,00 | | 69,00 | 69,00 |
| B.1.20 | Bidang Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | | | | | | |
| | 1. Jumlah pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP | 125 | 72 | 120 | 80 | 125 | 130 |
| | 2. Jumlah pembinaan politik daerah | 72 | 72 | 80 | 80 | 85 | 90 |
| B.1.21 | Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | |
| | 1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk | 2,75 | 3,47 | 2,8 | | 2,86 | 2,91 |
| | 2. Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk | 56,72 | | 57,85 | | 59,01 | 60,19 |
| | 3. Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 |
| | 4. Jumlah Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah | 1 sistem | | 1 sistem | | 1 sistem | 1 sistem |
| | 5. Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | 6. Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten (%) | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 100,00 |
| | 7. Jumlah Sistim Informasi Manajemen Pemda | 43 | | 43 | | 43 | 43 |
| B.1.22 | Bidang Urusan Ketahanan Pangan | | | | | | |
| | 1. Regulasi ketahanan pangan (buah) | 3 perda | | 1 perda | | 1 perda | 1 perda |
| | 2. Ketersediaan pangan utama (ton) | | | | | | |
| | a Padi | 865.554 | 882.092 | 850000 | | 855434 | 860834 |
| | b Jagung | 61.873 | | 83131 | | 76883 | 74415 |
| | c Kedelai | 8.210 | 7.435 | 9118 | | 9116 | 9112 |
| | d Kacang Tanah | 11.616 | 11.024 | 13010 | | 12695 | 12389 |
| | e Ubi Kayu | 147.201 | 57.572 | 169084 | | 166062 | 163093 |
| | f Kacang Hijau | 1.529 | 1.186 | 793 | | 846 | 882 |
| | g Ubi Jalar | 65.132 | 60.754 | 81316 | | 84593 | 88002 |
| B.1.23 | Bidang Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa | | | | | | |
| | 1. Persentase kelompok lembaga pemberdayaan masyarakat yg sudah dibina | 100% | | 100% | | 100% | 100% |



| | | | | | | | |
|--------|---|-----------|--------|---------|--------|---------|---------|
| | 2. Persentase kelompok PKK yg sudah dibina | 100% | | 100% | | 100% | 100% |
| | 3. Persentase kemiskinan pada desa Gerbangsadu (82 desa) | 35% | 30% | 30% | | 25% | 20% |
| | 4. Jumlah Posyandu aktif | 4867 unit | | 100% | | 100% | 100% |
| | 5. Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat (%) | 46 kec. | | 100% | | 100% | 100% |
| B.1.24 | Bidang Urusan Statistik | | | | | | |
| | 1. Buku Provinsi Dalam Angka” | 1 buku | 1% | 1 buku | | 1 buku | 1 buku |
| | 2. Buku ”PDRB ” | 1 buku | 1% | 1 buku | | 1 buku | 1 buku |
| B.1.25 | Bidang Urusan Perpustakaan | | | | | | |
| | 1. Jumlah perpustakaan (Desa,Sekolah, Ibadah, Umum) | 3912 | 3.044 | 5 | - | 5 | 5 |
| | 2. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun | 58723 | 67.919 | 59723 | 60.723 | 60223 | 60723 |
| | 3. Jumlah Pengadaan Koleksi buku | 1550 | 1.550 | 2000 | 2.000 | 2500 | 3000 |
| B.1.26 | Bidang Urusan Kearsipan | | | | | | |
| | 1. Persentase pengelolaan arsip secara baku (benar) dari seluruh SKPD | 100 | 100 | 18 | 55,81 | 20 | 20 |
| | 2. Jumlah Peningkatan SDM pengelola kearsipan (orang) | | 4 | 40 | 35 | 40 | 45 |
| B.1.27 | Bidang Urusan Komunikasi dan Informatika | | | | | | |
| | 1. Jumlah penyiaran radio | 71 | | 71 | 60 | 71 | 71 |
| | 2. Jumlah penyiaranTV lokal | 7 | | 7 | 10 | 7 | 7 |
| | 3. Jumlah penyiaran dari pusat | 11 | | 11 | | 11 | 11 |
| | 4. Website milik pemerintah daerah | 43 | | 43 | 43 | 43 | 43 |
| B.2. | Fokus Pelayanan Urusan Pilihan | | | | | | |
| B.2.1 | Bidang Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan | | | | | | |
| | 1. Regulasi ketahanan pangan (buah) | 3 perda | | 3 perda | | 4 perda | 4 perda |
| | 2. Ketersediaan pangan utama (ton) | | | | | | |
| | a Padi | | 865554 | 882.092 | 850000 | | 855434 |
| | b Jagung | 61873 | | 83131 | | 76883 | 860834 |
| | c Kedelai | 8210 | 7.435 | 9118 | | 9116 | 74415 |
| | d Kacang Tanah | 11616 | 11.024 | 13010 | | 12695 | 9112 |
| | e Ubi Kayu | 147201 | 57.572 | 169084 | | 166062 | 12389 |
| | f Kacang Hijau | 1529 | 1.186 | 793 | | 846 | 163093 |
| | g Ubi Jalar | 65132 | 60.754 | 81316 | | 84593 | 882 |



| | | | | | | | |
|-------|---|--------------|------------|---------------|------------|---------------|---------------|
| | 3. Produktivitas padi (kw/ha) | 58,09 | 59,19 | | 59,85 | 60,51 | 88002 |
| | 4. Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB | 16,84 | | 19,77 - 20,94 | | 18,15 - 21,06 | 17,54 - 19,78 |
| | 5. Bina kelompok petani berupa simantri (unit) | 325 | 94 | 525 | | 650 | 800 |
| B.2.2 | Bidang Urusan Kehutanan | | | | | | |
| | 1. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis (Ha) | | 1.857,5 | | 975 | | |
| | Terwujudnya penambahan luas penutupan lahan bervegetasi pada lahan kritis di dalam dan di luar kawasan hutan melalui: | | | | | | |
| | - RHL di dalam kawasan hutan seluas 1000 Ha/th | 6.950 ha | | 1.000 ha | | 1.000 ha | 1.000 ha |
| | - RHL di luar kawasan hutan seluas 2000 Ha/th | 12.053 ha | | 2.000 ha | | 2.000 ha | 2.000 ha |
| | - Demplot RHL kritis di dalam kws hutan seluas 5 ha/th | - | | 5 ha | | 5 ha | 5 ha |
| | - Rehabilitasi hutan dan lahan kritis | 46.128,81 ha | 1857,5 Ha | 640 ha | 975 Ha | 640 ha | 640 ha |
| | 2. Kerusakan Kawasan Hutan (Ha) | 12.400 ha | 159,5 | 250 ha | 696,80 | 250 ha | 250 ha |
| B.2.3 | Bidang Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral | | | | | | |
| | 1. Pertambangan tanpa ijin | 70% | 79,89 | 65% | 71,97 | 60% | 55% |
| | 2. Surat Ijin Pemanfaatan Air Tanah (SIPA) dengan Rekomendasi Teknis | 50% | 241,00 | 60% | 257% | 70% | 80% |
| | 3. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB | 2,546 | 0,750 | 2,696 | 0,780 | 2,660 | 2,612 |
| B.2.4 | Bidang Urusan Pariwisata | | | | | | |
| | 1. Kunjungan wisata manca negara (orang) | 3,1 juta | 3.278.598 | 3,4 juta | 3.766.638 | 3,7 juta | 4,1 juta |
| | 2. Kunjungan wisatawan domestik (orang) | 6,2 juta | 6.976.535 | 6,6 juta | 6.392.461 | 7,0 juta | 7,5 juta |
| | 3. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB (%) | 62,00 | 69,15 | 63,00 | 75 | 65,00 | 67,00 |
| B.2.5 | Bidang Urusan Kelautan dan Perikanan | | | | | | |
| | 1. - Produksi Perikanan (%) | 100% | 63,54 | 102 | 85,60 | 104 | 106 |
| | - Produksi Perikanan (ton) | 415.513,00 | 263.970,51 | 423822 | 220.990,77 | 432296 | 440912 |
| | 2. Konsumsi Ikan (kg/kapita/th) | 30,61 | 30,58 | 31,46 | 31,17 | 32,31 | 33,16 |
| | 3. Cakupan bina kelompok nelayan % | 50,00 | 2,98 | 60,00 | 4,65 | 70,00 | 80,00 |
| | 4. Produksi perikanan kelompok nelayan % | 50,00 | 48,95 | 60,00 | 53,80 | 70,00 | 80,00 |
| B.2.6 | Bidang Urusan Perdagangan | | | | | | |
| | 1. Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB | 30,23 | 29,89 | 37,50 - 38,64 | - | 37,49 - 37,78 | 37,52 - 37,74 |



| | | | | | | | |
|--------------|--|-------------|---------|---------------|---------|---------------|---------------|
| | 2. Pertumbuhan Ekspor Bersih Perdagangan (%) | 817.348.855 | | 14,88 - 17,60 | 3,65 | 7,20 - 9,16 | 7,56 - 10,10 |
| | 3. Cakupan bina kelompok pedagang/usaha informal (%) | 100,00 | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| B.2.7 | Bidang Urusan Perindustrian | | | | | | |
| | 1. Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB | 14,63 | | 23,14 - 23,94 | - | 23,68 - 24,63 | 23,87 - 25,08 |
| | 2. Pertumbuhan Industri (UKM). | 77.808 | 11,905 | 77.900 | 12,084 | 78.000 | 78.100 |
| | 3. Cakupan bina kelompok pengrajin | 37,70 | | 45,00 | 360 | 60,00 | 75,00 |
| | | | | | | | |
| C | ASPEK DAYA SAING DAERAH | | | | | | |
| C.1. | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | | | | | | |
| C.1.1 | Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | |
| | 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita (jt/th) | 13,13 | 11,93 | 13,97 | BT | 14,85 | 15,86 |
| | 2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita | - | 2275830 | 8,01 | BT | 8,70 | 9,51 |
| | 3. Produktivitas total daerah | 40,86 | | 44,72 | BT | 48,87 | 53,67 |
| C.1.2 | Bidang Urusan Pertanian | | | | | | |
| | 1. Nilai Tukar Petani | 108,02 | | 110,19 | 104,19 | 112,39 | 114,64 |
| C.2. | Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur | | | | | | |
| C.2.1 | Bidang Urusan Perhubungan | | | | | | |
| | 1. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan (km/unit) | 0,0038 | | 0,0050 | | 0,0050 | 0,0050 |
| | 2. Jumlah orang/barang yang terangkut angkutan umum | | | | | | |
| | 3. Jumlah orang/barang melalui dermaga, bandara, terminal per tahun | 26.299.108 | | 28.359.447 | | 30.548.405 | 32.921.738 |
| C.2.2 | Bidang Urusan Penataan Ruang | | | | | | |
| | 1. Ketaatan terhadap RTRW | 22% | 88% | 33% | 0,88 | 67% | 67% |
| | 2. Luas wilayah produktif (Ha) | 388089 | 68,85 | 384208 | 68,85 | 380327 | 376446 |
| | 3. Luas wilayah industri (Ha) | 2387 | 0,43 | 2435 | 0,43 | 2483 | 2531 |
| | 4. Luas wilayah banjir (Ha) | 100 | 0,30 | 95 | 0,30 | 90 | 85 |
| | 5. Luas wilayah kekeringan (Ha) | 114256 | 182,15 | 113113 | 1735,57 | 111970 | 110827 |
| | 6. Luas wilayah perkotaan (Ha) | 72399 | 8,33 | 73847 | 8,33 | 73847 | 73847 |



| | | | | | | | |
|-------|---|-----------------|------|-----------|------|-----------|-----------|
| C.3. | Fokus Iklim Berinvestasi | | | | | | |
| C.3.1 | Bidang Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian | | | | | | |
| | 1. Angka kriminalitas (jumlah kasus/10.000 pendd) | 21 (th 2011) | 19,7 | 15 | 12 | 14 | 13 |
| | 2. Jumlah demo (buah) | 136 kali (100%) | 69 | 80% | 37 | 60% | 40% |
| | 3. Jumlah Penyelesaian Kasus Pelanggaran Perda/Pergub | 1194 | 521 | 300 kasus | 307 | 300 kasus | 300 kasus |
| | 3. Jumlah Perda yang mendukung iklim usaha | 4 perda | 4 | 5 perda | 4 | 5 perda | 6 perda |
| | 4. Jumlah Nasabah Jamkrida | 3456,00 | 3313 | 6000,00 | 4313 | 7000,00 | 8000,00 |

2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah

Permasalahan dalam pembangunan daerah dan dikaitkan dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah antara lain adalah sebagai berikut :

Urusan Wajib

1. Pendidikan

- APK PAUD baru mencapai 67,92% sehingga ada lagi 32,08% anak yang berumur 0- 6 tahun belum tertampung pada lembaga PAUD .
- Penuntasan wajib belajar sembilan tahun masih menemui beberapa kendala terbukti masih terdapat anak putus sekolah pada jenjang SD sejumlah 414 siswa atau 0,09% dari jumlah siswa 422.895 orang sedangkan pada jenjang SMP sebanyak 318 siswa atau 0,16% dari jumlah siswa 190.672 orang , siswa SD yang tidak melanjutkan ke SMP sebanyak 2.469 siswa atau 4,06%.
- Masih ditemui gedung sekolah rusak serta sarana pendidikan berupa alat praktek dan buku pelajaran yang tidak memadai.
- Masih terdapat siswa putus sekolah Jenjang SMA/MA/SMK sebanyak 466 siswa atau 0,29% dari jumlah siswa 159.648 orang. Dari tamatan SMP sejumlah 60.799 orang, yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah sebanyak 2.763 orang atau 4,06 %.
- Jumlah guru yang belum memenuhi kwalifikasi pendidikan S1/D4 masih cukup banyak yakni 21.13 %



- f) Penyebaran Guru kurang proporsional dengan beban kerja, akibatnya banyak guru yang belum bisa memenuhi kewajiban beban kerja minimal 24 jam tatap muka
- g) Guru kejuruan pada SMK masih kurang terutama guru yang mempunyai keahlian masing-masing jurusan sehingga akibatnya proses PBM tidak berjalan sesuai harapan karena dibimbing oleh guru yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi guru sehingga ada kecendrungan kualitas lulusan SMK kurang terampil.

2. Kesehatan

- a) Dalam proses integrasi JKBM ke JKN, semua kab/kota siap terutama dalam hal data cakupan kepesertaan by name by address
- b) Belum optimalnya sistem rujukan, berdampak Kekurangan tempat tidur kelas III di RS
- c) Masih rendahnya konsumsi garam beryodium akibat distribusi yang belum merata serta pemahaman masyarakat masih rendah
- d) Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi relatif masih menjadi masalah akibat kompetensi tenaga kesehatan masih kurang dan Pemantauan Wilayah Setempat belum optimal
- e) Pemberian ASI eksklusif pada bayi umur < 6 bln masih rendah serta pemahaman tentang ASI eksklusif masih kurang
- f) Masih ditemukan kasus balita gizi buruk
- g) Kurangnya pemahaman tentang pola konsumsi makan dan penyakit2 yang menyertai
- h) Kasus HIV-AIDS terutama penularan melalui hubungan seksual cenderung meningkat
- i) Masih minimnya pemahaman dan pengetahuan tentang pencegahan penanggulangan HIV-AIDS di masyarakat.
- j) Belum bersinerginya komponen masyarakat, LSM dan jajaran terkait dalam pembinaan masyarakat dalam rangka pencegahan penanggulangan HIV-AIDS di Provinsi Bali.
- k) Masih adanya stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV-AIDS (ODHA) di masyarakat se-Bali.
- l) Bangunan fisik RS Indera Jalan Angsoka belum memadai untuk pelayanan kesehatan indera secara paripurna oleh karena jumlah kunjungan yang terus meningkat dan belum memenuhi Permenkes No.340 Tahun 2010 tentang klasifikasi RS



- m) Belum optimalnya peran pelayanan kesehatan primer dalam upaya penanganan kesehatan jiwa, sehingga informasi dan data tentang penderita gangguan jiwa belum optimal, akses dan keterjangkauan pelayanan kesehatan jiwa menjadi masalah

3. Pekerjaan Umum

- a) Pertambahan penduduk yang cepat mengakibatkan adanya kebutuhan air yang meningkat baik untuk irigasi pertanian dan air minum.
- b) Debit air untuk Irigasi setiap tahun mengalami penurunan.
- c) Dibutuhkan alokasi dana yang sangat besar untuk membangun dan operasional serta pemeliharaan jaringan air limbah,
- d) Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang air limbah untuk menjaga kualitas lingkungan.
- e) Potensi sumber air baku untuk Penyediaan Air Minum penyebarannya tidak merata pada kabupaten/ kota.

4. Perumahan

- a) Berkembangnya bangunan baru yang kurang sesuai dengan peraturan daerah khususnya tentang arsitektur bali yang disebabkan oleh belum semua kabupaten / kota mempunyai peraturan daerah tentang bangunan gedung.
- b) Munculnya kawasan kumuh baru diperkotaan.

5. Penataan Ruang

- a) Belum lengkapnya peraturan pendukung pelaksanaan penataan ruang, seperti pedoman penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi dan Kab/Kota dalam bentuk Peraturan Menteri.
- b) Kurangnya komitmen pemerintah daerah (SKPD) terhadap pentingnya rencana tata ruang dalam proses perencanaan pembangunan.
- c) Belum memadainya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia dibidang penataan ruang.

6. Perencanaan Pembangunan

- a) Tenaga fungsional peneliti, fungsional perencana dan tenaga yang berlatar belakang pendidikan statistik yang ada kurang memadai jumlahnya
- b) Dalam Penyusunan Program sulit merencanakan anggaran dengan terbatasnya pagu, tetapi dalam pelaksanaanya banyak belanja yang



tidak terduga harus didanai sehingga sulit tercapainya efisiensi.

- c) Monitoring pada beberapa kegiatan khususnya prasarana wilayah tidak dapat dilakukan dengan optimal karena kurangnya dukungan sarana mobilitas.
- d) Penempatan pegawai yang belum sesuai dengan kualifikasi pendidikan.

7. Perhubungan

- a) Masih tingginya kecelakaan lalu lintas di Provinsi Bali, dimana rata – rata korban jiwa meninggal akibat kecelakaan lalu lintas mencapai 1,5 jiwa/hari.
- b) Rendahnya penggunaan angkutan umum, dimana pangsa pasar angkutan umum sebesar 5% masih berada jauh dibawah prosentase ideal sebesar 70 % dari total perjalanan.
- c) Terjadinya kemacetan lalu lintas dimana kecepatan rata – rata ruas jalan berada di bawah 40 km/jam.
- d) Pembangunan jalan baru tidak mampu mengimbangi peningkatan jumlah kendaraan yang sangat pesat hingga mencapai 12% per tahun, sedangkan pembangunan jalan baru hanya \pm 1% per tahun.
- e) Kemampuan jalan masih terbatas, untuk di beberapa ruas jalan masih dilalui oleh kendaraan yang melebihi kemampuan jalan.
- f) Penggunaan prasarana jalan banyak yang tidak sesuai dengan fungsinya, akibat pengembangan di sekitar atau sepanjang jalan tidak sesuai dengan peruntukan dan pemanfaatannya.
- g) Kapasitas dan kualitas pelayanan prasarana transportasi dalam mendukung aksesibilitas arus barang dan penumpang belum dilaksanakan secara optimal;
- h) Kemampuan pengembangan sistem jaringan prasarana transportasi yang handal dan terintegrasi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, keseimbangan pembangunan dan konektivitas antar wilayah, dan mendorong potensi ekonomi di daerah perdesaan masih terbatas;
- i) Ketimpangan pembangunan bidang perhubungan udara antara Bali Utara dan Bali Selatan.

8. Lingkungan Hidup

- a) Kualitas air sungai, air laut, air danau dan mata air di beberapa lokasi di Bali telah terindikasi terjadi pencemaran oleh bahan-bahan organik dan anorganik yang ditunjukkan oleh terlampauinya baku mutu parameter BOD, COD, Phospat, Nitrat, Total Coliform, serta meningkatnya interusi air laut.
- b) Masih terindikasi terjadinya emisi GRK dan penggunaan Refrigran/Pendingin mengandung bahan perusak ozon.
- c) Masih rendahnya sosialisasi dan upaya gerakan aksi mitigasi/adaptasi perubahan iklim.
- d) Masih teridentifikasinya kerusakan terumbu karang.
- e) Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup.
- f) Belum optimalnya pengawasan dan pelaporan terhadap pelaksanaan kegiatan yang wajib dokumen lingkungan (AMDAL, UKL/UPL, dan SPPL).
- g) Rendahnya jumlah dan kapasitas sumber daya manusia penilai AMDAL yang berlisensi, Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD) dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup (PPNSLH).
- h) Belum optimalnya keberadaan pos pengaduan penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup (P3SLH).
- i) Belum optimalnya pengendalian tata ruang.
- j) Belum adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi.
- k) Belum optimalnya sistem informasi data, pelaporan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

9. Pertanahan

- a) Terdapat BMD dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa ijin.
- b) Terdapat aset tanah belum bersertifikat.
- c) Beberapa pengurus barang/pembantu pengurus barang yang ada di SKPD belum mengikuti diklat pengelolaan BMD.
- d) Penyampaian laporan BMD beberapa SKPD tidak tepat waktu, sehingga mempengaruhi rekapitulasi akhir laporan BMD tingkat provinsi.



10. Kependudukan dan Catatan Sipil

- a) Belum on-line nya data yang ada pada server provinsi ke Kabupaten/Kota dan ke Pusat

11. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a) Untuk Program /kegiatan yang ada Tim, dengan melibatkan Organisasi Profesi dan SKPD yang ada di lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, anggota Timnya sering berganti-ganti yang disebabkan karena kesibukan masing-masing SKPD /Instansi terkait.
- b) Terbatasnya sumber tenaga manusia, sarana dan prasarana kurang memadai.
- c) Kegiatan monitoring tidak dapat dilaksanakan dengan optimal karena dukungan sarana mobilitas sangat kurang.
- d) Belum tersedia data terpilah tentang gender.
- e) Rendahnya pemahaman konsep gender dan PUG di masyarakat.
- f) Belum maksimal perencanaan dan penganggaran responsip gender
- g) Masih kurangnya akses,partisipasi,control dan manfaat kepada kaum perempuan dalam pembangunan
- h) Masih banyak kasus kekerasan yang tidak dilaporkan

12. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahteraan

- a) Kurangnya kesadaran, pengertian serta pemahaman masyarakat kurang mampu akan pentingnya berpartisipasi dalam program KB dalam mewujudkan Keluarga Sejahtera;
- b) Kurangnya dukungan politis, sosial, budaya serta belum optimalnya advokasi, KIE dan akses bagi masyarakat kurang mampu terhadap informasi maupun pelayanan KB.

13. Sosial

- a) Terbatasnya SDM pada Dinas Sosial Provinsi Bali baik kuantitas dan kualitasnya
- b) Banyaknya masyarakat miskin yang menghuni Rumah Tak Layak Huni (RTLH) yang masih memerlukan bantuan Bedah Rumah

14. Ketenagakerjaan

- a) Belum semua pencari kerja yang telah dilatih dapat tersalurkan, karena kesempatan kerja tidak sebanding dengan dengan pencari kerja.



- b) Belum dapat dimanfaatkannya peluang kerja ke luar negeri secara optimal karena belum semua tenaga kerja memenuhi syarat keterampilan yang dibutuhkan
- c) Lemahnya jiwa wirausaha bagi tenaga kerja.
- d) Belum sepenuhnya dipahami hakekat hubungan industrial oleh pengusaha dan karyawan.

15. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

- a) Kemampuan SDM koperasi dan UMKM dalam bidang Manajemen Kewirausahaan dan Penguasaan Teknologi masih terbatas
- b) Kemampuan Koperasi dan UMKM untuk mengakses permodalan lembaga keuangan masih lemah
- c) Kemampuan Pemasaran Produk Unggulan Koperasi dan UMKM masih lemah
- d) Penyampaian laporan keragaan koperasi dan UMKM dari Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten/Kota belum tertib.
- e) Petugas Pelaksana Penilai Kesehatan KSP/USP koperasi yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan sangat kurang.

16. Penanaman Modal

- a) Belum meratanya sebaran investasi antar wilayah dan antar sektor.
- b) Masalah penyediaan lahan dan insentif daerah bagi penanaman modal.
- c) Belum optimalnya kegiatan promosi investasi secara terpadu antar Kabupaten/Kota.
- d) Belum memadainya informasi potensi investasi di masing-masing Kabupaten/Kota.
- e) Belum memadainya infrastruktur di masing-masing Kabupaten, khususnya di wilayah Bali Utara, Bali Timur dan Bali Barat

17. Kebudayaan

- a) Kecendrungan terjadinya konflik atau sengketa di Desa Pakraman dipicu oleh masalah-masalah yang terkait dengan pemanfaatan Laba, Tapal batas desa, Pemanfatan Setra, Pemekaran Desa Pakraman, Prilaku krama yang dianggap bertentangan dengan Desa Kala Patra/kesepakatan Krama setempat.



- b) Lemahnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) sebagai akibat belum dapat sepenuhnya dilakukannya inventarisasi dan penetapan status hukum hasil karya seni dan budaya.

18. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

- a) Terdapat BMD dimanfaatkan oleh pihak lain tanpa ijin.
- b) Terdapat aset tanah belum bersertifikat.
- c) Beberapa pengurus barang/pembantu pengurus barang yang ada di SKPD belum mengikuti diklat pengelolaan BMD.
- d) Penyampaian laporan BMD beberapa SKPD tidak tepat waktu, sehingga mempengaruhi rekapitulasi akhir laporan BMD tingkat provinsi.
- e) Jumlah dan kualitas tenaga fungsional di bidang diklat utamanya Widyaiswara, pengembang kurikulum, ahli media pembelajaran, dan ahli evaluasi diklat masih sangat terbatas untuk menjangkau target peserta yang besar.
- f) Penyelenggaraan diklat aparatur yang belum sepenuhnya dikaitkan dengan pola pembinaan karier, baik dalam penempatan jabatan maupun penilaian prestasi kerja.
- g) Belum terintegrasinya penyelenggaraan diklat yang dilaksanakan SKPD sehingga kebijakan diklat satu pintu oleh lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan diklat belum berjalan optimal.
- h) Pengelolaan keuangan dan aset daerah sering menjadi temuan hasil pemeriksaan BPK RI serta penanganan tindak lanjut yang belum maksimal
- i) Pelaksanaan program unggulan Pemerintah Provinsi Bali yang sudah berjalan masih perlu ditingkatkan pelaksanaannya
- j) Terbatasnya kuantitas dan kualitas aparatur dalam melaksanakan tugas Penegakan Perda , menangani ketentraman dan ketertiban umum,
- k) Belum optimalnya koordinasi internal dan eksternal dalam melaksanakan tugas operasional
- l) Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan tugas operasional Satpol PP.



19. Ketahanan Pangan

- a) Sebagaimana masyarakat masih memiliki daya beli yang rendah.
- b) Harga pangan pada saat hari besar keagamaan cenderung meningkat.
- c) Belum optimalnya penganekaragaman pola konsumsi pangan masyarakat.
- d) Sebagian masyarakat masih bergantung pada konsumsi beras.

20. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Kurangnya kemampuan aparat pemerintah desa/kelurahan yang mengakibatkan lemahnya kerjasama antar lembaga kemasyarakatan yang bermuara pada kurang maksimalnya pemberdayaan dan pelayanan masyarakat..
- b) Belum optimalnya sinergitas pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa antara pemerintah provinsi dengan Pemerintah Kab/kota sehingga sasaran belum dapat dicapai secara optimal.

21. Statistik

- a) Masih lambatnya proses pengumpulan data dalam rangka Pengolahan, Updating serta Analisis Data dan Statistik Daerah yang disebabkan kurang responnya dari SKPD dan Instansi Pemerintah,
- b) Daerah data yang akan digunakan dalam penyusunan Buku GIS masih perlu disempurnakan sehingga direncanakan akan di cetak pada Tahun 2015.

22. Kearsipan

- a) Belum terwujudnya pemerataan pembinaan kearsipan di lingkungan provinsi Bali.
- b) Kekurangan dana yang mendukung berbagai kegiatan.
- c) Kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan.

23. Komunikasi dan Informatika

- a) Masih rendahnya kemampuan SDM aparatur pemerintah dalam penguasaan Teknologi Informasi (TI).
- b) Keberadaan jumlah menara telekomunikasi (tower) yang ada di Bali sudah melebihi kebutuhan sehingga sangat mengganggu keserasian dan keamanan lingkungan.
- c) Masih rendahnya akses informasi kepada masyarakat sehingga kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.



- d) Sikap apatis dan kurang pemahaman warga masyarakat terhadap manfaat penyiaran yang sangat relative rendah dan disisi lain keinginan masyarakat untuk mengikuti siaran dari lembaga penyiaran relative tinggi.
- e) Dukungan terhadap pelaksanaan sosialisasi kebijakan publik dan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran belum memadai, sehingga belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat
- f) Keterbatasan jumlah kanal/frekuensi dan penyebarannya tidak merata di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.

24. Perpustakaan

- a) Minat baca masyarakat masih rendah.
- b) Belum terwujudnya secara menyeluruh penyediaan bahan pustaka baik untuk perpustakaan umum maupun sekolah.
- c) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung.
- d) Membaca belum menjadi kegemaran atau budaya bagi masyarakat.
- e) Kompetensi Pustakawan perlu ditingkatkan dan terbatasnya jumlah Pustakawan.
- f) Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait perpustakaan belum optimal.
- g) Pemberdayaan Perpustakaan kurang optimal.
- h) Apresiasi penyelamatan dan pemberdayaan naskah kuno sebagai warisan budaya masih rendah.
- i) Diversifikasi layanan perpustakaan belum memenuhi kebutuhan pemustaka.

Urusan Pilihan :

1. Pertanian

1.1. Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan

- a) Belum Tergarapnya Potensi Pertanian Secara Optimal
- b) Adanya Alih Fungsi Lahan dan pemilikan petani lahan sempit
- c) Keterbatasan Air Irigasi
- d) Akses Pemasaran Dan Permodalan Petani Lemah
- e) Penguasaan teknologi bagi petani lemah
- f) Adanya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT)
- g) Mutu produksi dan sistem perbenihan masih belum memadai



1.2. Sub Sektor Perkebunan

- a) Tingkat produktivitas kebun masih dibawah standar teknis
- b) Serangan hama Penggerak Buah kakao (PBK) dan busuk buah pada tanaman kakao serta JAP pada jambu mete masih tinggi dan belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Akhir-akhir ini ditemukan penyakit VSD pada Kakao yang belum dapat diatasi dengan baik.
- c) Terbatasnya kemampuan kelompok tani/subak abian untuk dapat memanfaatkan skim kredit yang tersedia.
- d) Kurang seimbangnya jumlah petugas lapangan (UML) yang tersedia dengan jumlah petani subak abian yang dibina.

1.3. Sub Sektor Peternakan

- a) Masih adanya pengeluaran Sapi bibit yang illegal dan pengeluaran sapi potong melebihi kapasitas produksi
- b) Masih terdapat pemotongan sapi betina produktif.
- c) Ketersediaan pakan terbatas, harga pakan terus meningkat.
- d) Kurangnya ketersediaan air untuk peternakan khususnya di daerah kering
- e) Akses pemasaran dan permodalan peternak masih lemah.
- f) Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) seperti Rabies dan Flu Burung.

2. Kehutanan

- a) Tingginya tekanan terhadap hutan baik berupa pemanfaatan untuk kegiatan non kehutanan maupun kerawanan kawasan hutan berupa penebangan liar dan peredaran hasil hutan illegal, penyerobotan kawasan hutan dan kebakaran hutan
- b) Luasnya kawasan hutan yang perlu mendapat rehabilitasi dengan lokasi tersebar pada semua tipe dan fungsi hutan ;
- c) Penanganan keamanan hutan sering tumpang tindih dan saling lempar tanggung jawab antara instansi satu dengan lainnya ;
- d) Perilaku masyarakat di sekitar kawasan hutan masih rendah dan pemberdayaannya belum ditangani secara terpadu, sehingga peran serta dalam pembangunan kehutanan sering menimbulkan konflik kepentingan ;

- e) Belum tuntasnya pemetaan otonomi di bidang kehutanan mengakibatkan terhambatnya penataan kelembagaan dan penataan mekanisme koordinasi antara instansi yang menangani kehutanan baik Pusat, Provinsi maupun Kabupaten/Kota, sehingga sering terjadi tumpang tindih dan kerancuan pelaksanaan kegiatan ;
- f) Rendahnya produktivitas rata – rata lahan hutan ;
- g) Kualitas sumber daya hutan yang masih rendah akibat banyaknya gangguan hama dan kebakaran hutan serta tekanan akibat kondisi sosial ekonomi masyarakat yang belum memadai perlu mendapat perhatian
- h) Banyaknya habitat flora dan fauna yang rusak akibat berbagai macam gangguan termasuk perambahan, pencurian dan kebakaran ;
- i) Pemanfaatan kawasan hutan yang belum optimal terlihat dari produktivitas lahan dan nilai tambah yang masih rendah.

3. Energi dan Sumber Daya Mineral

- a) Peraturan perundang-undangan yang tidak mendukung pelaksanaan pengelola bidang ESDM
- b) Keterbatasan personil teknis
- c) Terbatasnya pembiayaan APBD untuk mengembangkan bidang ESDM

4. Pariwisata

- a) Kurang optimalnya promosi pariwisata Bali sebagai destinasi pariwisata secara terpadu.
- b) Lemahnya kualitas sumber daya pariwisata.

5. Kelautan dan Perikanan

- a) Armada perikanan masih didominasi oleh perahu tanpa motor/motor tempel sehingga produktivitas/produksi nelayan relatif masih rendah
- b) Ketersediaan benih ikan dan mutu benih untuk usaha budidaya ikan belum memadai
- c) Harga pakan cenderung mengalami peningkatan namun tidak diikuti dengan peningkatan harga jual komoditas perikanan budidaya
- d) Kemampuan SDM pengelola sektor kelautan dan perikanan masih relatif rendah dan dukungan tenaga teknis petugas penyuluh lapangan belum optimal, baik dari segi jumlah maupun kualitas



6. Perdagangan

- a) Pelayanan Kemetrolagian di Kab/Kota belum terwujudnya tertib ukur karena keterbatasan Sumber Daya Manusia, sarana prasarana dan rendahnya pemahaman pelaku usaha akan ketepatan hasil pengukuran
- b) Pelayanan pengujian mutu barang yang ada di laboratorium UPT-BPSMB masih sangat terbatas
- c) Peningkatan pengetahuan aparaturnya /eksportir terhadap kebijakan ekspor/impor masih terbatas

7. Industri

- a) Hasil karya cipta dari perajin milik perorangan pendaftaran HKI sudah menunjukkan peningkatan namun hasil karya cipta masyarakat bali (Foklor) masih perlu perhatian serius.
- b) Pembangunan gedung mesin pengolahan pupuk organik tidak dapat direalisasikan karena masalah lokasi yang belum disepakati oleh PemKab Buleleng dan lahan yang rencananya akan digunakan telah diserahkan untuk pembangunan Rumah Sakit Pratama oleh Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten Buleleng.